



Karantina Dicabut
Denmark secara bertahap mencabut kebijakan karantina untuk atasi Covid-19.
INTERNASIONAL/HLM 4



Anggaran Darurat
Negara-negara menggelontorkan triliunan dollar AS untuk memerangi Covid-19.
OPINI/HLM 6



Opsi Oktober 2021
Menpora menilai Oktober 2021 ideal untuk penyelenggaraan PON Papua.
OLAHRAGA/HLM 14

KAMIS, 16 APRIL 2020

www.kompas.id

@hariankompas

@hariankompas

@hariankompas

Politik Tuna-empati

ANALISIS POLITIK

AZYUMARDI AZRA

Profesor Sejarah UIN Syarif Hidayatullah;
Anggota KK AIP



Perjuangan menghadapi virus korona baru penyebab Covid-19 bakal berlangsung panjang, khususnya di Tanah Air. Ini dapat dilihat dari skenario beberapa ahli tentang tingkat dan durasi pandemi Covid-19 di Indonesia.

Dalam skenario moderat, jumlah warga positif Covid-19 sekitar 60.000 orang jika kebijakan komprehensif penjarakan fisik dan sosial disertai penegakan hukum tegas. Kasus positif Covid-19 bisa lebih sedikit apabila karantina wilayah diberlakukan, bukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Skenario terburuk terjadi jika tiada kebijakan tegas dan ketat dalam penjarakan fisik dan sosial; atau PSBB tak mampu menertibkan warga yang tidak disiplin, yang tetap berpindah dari wilayah merah ke tempat lain. Jika ini terjadi, diperkirakan jumlah kasus positif korona bisa lebih dari 2 juta orang.

Dalam berbagai skenario, grafik pandemi diperkirakan mulai melandai akhir Mei atau awal Juni. Namun, ini tidak berarti berakhirnya pandemi. Bukan tidak mungkin datang gelombang baru mutasi Covid-19.

Terlepas dari skenario itu, korban berjatuhan kian banyak. Korban ini bukan hanya mereka yang meninggal akibat Covid-19, melainkan juga mereka yang terkapar secara ekonomi akibat wabah korona. Makin banyak warga kehilangan pendapatan akibat kebijakan penjarakan sosial dan fisik.

Jumlah itu kian banyak saat PSBB diberlakukan di Provinsi DKI Jakarta, Jumat (10/4/2020), kemudian diikuti daerah lain. Jumlah warga terdampak ekonomi-sosial Covid-19 sampai pekan lalu diperkirakan 5,28 juta orang; menjadi tambahan 7,05 juta penganggur yang sudah ada sebelumnya.

(Bersambung ke hlm 15 kol 6-7)

PANGAN

Peningkatan Stok Butuh Dana Tambahan

JAKARTA, KOMPAS — Badan usaha milik negara menjadi ujung tombak pemerintah untuk menyerap dan menjaga agar harga di tingkat petani, peternak, petambak, dan nelayan tetap layak. Namun, upaya mengamankan stok dan harga di tingkat produsen pangan tersebut membutuhkan sokongan, terutama anggaran yang cukup.

Tuntutan untuk memperkuat stok pangan dalam negeri menguat di tengah pandemi Covid-19. Disrupsi pada produksi dan rantai pasok pangan global akibat pandemi berpotensi memicu krisis pangan. Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), Indonesia dapat mengatasi ancaman krisis pangan melalui strategi yang memprioritaskan kesejahteraan produsen pangan.

Presiden Joko Widodo memberi perhatian pada peringatan FAO soal potensi gangguan pangan akibat pandemi. Dalam rapat terbatas tentang penanganan Covid-19 dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin silam, Presiden meminta jajarannya mendorong produksi pangan dalam negeri.

Pemintaan lesu

Pada saat yang sama, para produsen menghadapi kenyataan pahit. Nelayan, misalnya, kesulitan menjual tangkapan karena permintaan lesu. Harga ikan pun anjlok. Adapun peternak ayam skala kecil terpaksa memangkas produksi karena harga jual anjlok.

Petani tebu yang bersiap panen dan memasuki musim giling khawatir harga gula tertekan pelanggaran impor gula. Petani

(Bersambung ke hlm 15 kol 1-2)

INDEKS



klik.kompas.id/pandemi-demokrasi

Sore Bersama
Suzuki XL7

KENDARA/HLM 13

Covid-19 dan Demokrasi

Lebih dari 40 negara, termasuk RI, menunda pemilu akibat Covid-19.

KOMPAS.ID

Diduga Ceroboh
Komnas HAM menilai penembakan yang diduga dilakukan prajurit TNI dan menewaskan dua orang di Papua sebagai tindakan ceroboh.

UMUM/HLM 15

READ EDITORS' CHOICE IN ENGLISH kompas.id

DKK untuk Penanganan Covid-19

Pandemi Covid-19 mengguncang dunia, termasuk Indonesia. Hingga Rabu (15/4/2020) siang tercatat 5.136 orang positif terjangkit Covid-19 dan 469 orang di antaranya meninggal di Tanah Air.

Pembaca dapat menyalurkan dana untuk membantu penanganan Covid-19 melalui Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas (DKK) di nomor rekening 012.3021433, BCA Cabang Gajah Mada, Jakarta.

Rekening sumbangan dibuka hingga akhir April 2020. Yayasan DKK telah menyalurkan secara bertahap sumbangan yang diterima dan akan terus menyalurkan semua sumbangan. Laporan dapat diikuti di harian Kompas dan Kompas.id. Berikut daftar penyumbang sementara:

1.759 Tahir	500.000.000	1.767 Henry Jatmiko Kart	500.000
1.760 Drs A Mukti Harap	250.000	1.768 Wahyu Ruspono	300.000
1.761 Ekomoed Hita Ma	10.000.000	1.769 Dami	450.000
1.762 Cathrina Hutagalung	500.000	1.770 Pughu Bodro Isawan	1.000.000
1.763 Agustina Gautama	300.000	1.771 Thomas Tematang	15.000
1.764 Satya Wisnu Wardi	1.000.000	1.772 Khendy	1.000.000
1.765 Riniwati Ima Susilana	300.000	1.773 Christison Kumaw	1.000.000
1.766 Tuti Gunawan	2.500.000	1.774 NN	200.000

Jumlah diterima sampai Rabu (15/4), pukul 13.16: Rp 3.110.968.546

Baca juga di halaman 15

Warga Masih Abaikan PSBB

Aktivitas di luar rumah dan pelanggaran ketentuan masih banyak terjadi selama pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar. Tanpa ketegasan menegakkan aturan, kebijakan itu tak akan efektif.



KOMPAS/RIZA FATHONI

JAKARTA, KOMPAS — Penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Jakarta dan sekitarnya belum sepenuhnya berjalan efektif. Warga masih banyak yang beraktivitas di luar rumah dan mengabaikan ketentuan PSBB. Ketegasan pemerintah dalam menegakkan aturan PSBB dan kepatuhan masyarakat amat dibutuhkan agar kebijakan itu efektif mengatasi penyebaran virus korona baru penyebab Covid-19.

Jalan-jalan utama di sebagian wilayah DKI Jakarta, Rabu (15/4/2020), masih ramai. Di ruas Jalan Matraman Raya, MT Haryono, dan Gatot Subroto, misalnya, mobil dan sepeda motor masih banyak melintas. Padahal, PSBB hampir berjalan sepekan di Jakarta dan kemarin beberapa wilayah di sekitarnya, yaitu Bogor, Depok, dan Bekasi, mulai menerapkan pembatasan serupa.

Di sejumlah ruas jalan di pinggir Jakarta, seperti Jalan Raya Bogor dan Jalan Raya

>> BACA JUGA:

Aktivitas Ekonomi

Aktivitas ekonomi ditingkatkan demi pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar di wilayah Jabodetabek yang lebih efektif.

KOMPAS.ID

klik.kompas.id/aktivitasekonomi

BACA JUGA HLM 3, 5, DAN 12

Pondok Gede, masih banyak sepeda motor yang berboncengan dan tidak mengenakan masker. Sebagian pengendara belum mengetahui ketentuan bahwa pengendara sepeda motor hanya boleh membawa penumpang jika satu alamat. Itu pun keduanya wajib memakai masker dan sarung tangan.

Hamdi Widodo (36), pengendara yang ditemui di Jalan Raya

(Bersambung ke hlm 15 kol 3-5)



KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Polisi bersenjata lengkap berjaga di Stasiun Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada hari pertama penerapan pembatasan sosial berskala besar di wilayah itu, Rabu (15/4/2020) (atas). Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kiri) memimpin kirab pelantikan Ahmad Riza Patria (kanan) sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta sisa masa jabatan 2017-2022 di Istana Negara, Jakarta, Rabu. Pelantikan wakil gubernur kali ini mengikuti protokol pencegahan Covid-19, antara lain menerapkan jaga jarak atau *physical distancing*.

Evaluasi Pelaksanaan PSBB di Jakarta dan Sekitarnya

DKI Jakarta Kota Bogor Kota Depok

Sosialisasi PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) yang menyebabkan kepadatan penumpang, terutama di jam-jam sibuk.

Jam operasional KA pukul 06.00-18.00 dikeluarkan pekerja karena masih banyak yang bekerja lebih dari pembatasan itu.

Pekerja dengan tujuan Jakarta masih memadati Stasiun KA Bogor.

Masih ada pemanfaatan sarana fitness di hotel.

Sejumlah wilayah masih mengadakan ibadah shalat Jumat.

Banyak pengendara motor yang tidak mematuhi larangan berboncengan serta tidak mengenakan masker.

Masih banyak pengendara mobil dan sepeda motor tidak mengenakan masker.

Penyaluran bantuan untuk keluarga miskin tidak sinkron dengan data di lapangan sehingga banyak warga yang belum menerima.

Pengendara sepeda motor yang berboncengan, tetapi beda domisili.

Sumber: Pemberitaan Kompas, Dirangkum Litbang Kompas/KPP

INFOGRAFIK DICKY

PENANGANAN COVID-19

150.000 Reagen Tiba Pekan Ini

JAKARTA, KOMPAS — Sebanyak 150.000 reagen untuk mendukung pemeriksaan sampel Covid-19 dengan metode *polymerase chain reaction* akan tiba pekan ini. Reagen ini dibutuhkan untuk mengatasi keterbatasan persediaan di sejumlah laboratorium.

"Distribusi reagen sesuai kebutuhan laboratorium berdasarkan analisis epidemiologi," kata Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Agus Suprpto di Jakarta, Rabu (15/4/2020).

Sebanyak 44 laboratorium siap melaksanakan pemeriksaan Covid-19 agar pengujian sampel virus SARS-CoV-2 pemicu Covid-19 bisa dilakukan secara masif. Kapasitas total seluruh laboratorium itu 3.200 sampel per hari.

Dalam Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor 234 Tahun 2020 disebutkan, semua laboratorium rumah sakit, laboratorium klinik, laboratorium virologi, dan laboratorium lembaga riset perguruan tinggi yang memenuhi syarat bisa melaksanakan pemeriksaan *real time polymerase chain reaction* (RT-PCR) SARS-CoV-2.

Tes PCR

Menurut juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menargetkan melakukan tes PCR sebanyak 10.000 spesimen per hari demi mempercepat penanganan pasien dan membatasi penyebaran penyakit itu.

Selain mendatangkan 150.000 reagen untuk melaksanakan tes PCR, pihaknya melakukan konversi alat tes cepat molekuler untuk tes Covid-19. Kini 900 mesin siap dipakai dan 305 mesin lainnya masih menanti *cartridge*.

Per 15 April 2020, dari pemeriksaan PCR terhadap 36.431 spesimen, ada 5.136 kasus positif Covid-19. Jumlah pasien meninggal 469 jiwa dan 446 pasien sembuh. Adapun jumlah

(Bersambung ke hlm 15 kol 6-7)

2 Politik & Hukum

Pelantikan dengan Protokol Pencegahan Covid-19



KOMPAS/WAWAN H PIABOWO

Para tamu undangan memberikan selamat kepada I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi yang dilantik sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) antarwaktu periode 2017-2022 dan Benny Rhamdani yang dilantik sebagai Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/4/2020). Pelantikan pejabat negara kali ini dilakukan dengan tetap mengikuti protokol pencegahan Covid-19, yang salah satunya menerapkan anjuran jaga jarak. Tamu undangan yang hadir dibatasi sekitar 20 orang. Sebelum mengikuti kegiatan, semua tamu undangan juga menjalani tes cepat deteksi Covid-19.

Perppu Perlu Fokus pada Pilkada 2020

Pemerintah membentuk tim perumus perppu penundaan Pilkada 2020. Perubahan desain pilkada serentak dinilai tak perlu masuk perppu itu.

JAKARTA, KOMPAS — Peraturan pemerintah pengganti undang-undang terkait penundaan Pilkada 2020 akibat pandemi Covid-19 diharapkan fokus pada pengaturan waktu dan mekanisme penundaan, pelantikan tahapan, serta anggaran. Perppu itu dinilai tidak perlu menyertakan perubahan mendasar desain keserentakan pilkada serentak nasional.

Penundaan Pilkada 2020 di 270 daerah yang sedianya berlangsung pada 23 September disepakati dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian serta penyelenggara pemilu, Selasa (14/4/2020). Pilkada ditunda pada Desember 2020, tetapi bisa mundur memperhatikan perkembangan penanganan wabah Covid-19.

Komisi II DPR juga mengusulkan kepada pemerintah agar pilkada disesuaikan dengan masa jabatan satu periode lima tahun sehingga pilkada digelar pada 2020, 2022, 2023, 2025, dan seterusnya. Ini diusulkan jadi bagian perubahan Pasal 201 UU No 10/2016 tentang Pilkada melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Adapun dalam desain UU No 10/2016, pilkada serentak nasional diselenggarakan pada 2024.

Terkait hal itu, Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Padang, Feri Amsari, Rabu (15/4), mengatakan perppu sebaiknya tidak mengatur perubahan desain keserentakan pilkada. Hal itu sebaiknya dibahas dalam revisi UU Pemilu yang sudah masuk Program Legislasi Nasional DPR.

Secara substansial, usulan tersebut tetap harus menyesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang memberikan enam pilihan plus model pemilu serentak. Hanya pemilihan DPR, DPD, dan presiden serta wakil presiden yang tidak bisa dipisahkan keserentakannya. Pengaturan keserentakan lainnya, seperti pilkada serta pemilihan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, diserahkan kepada pembuat undang-undang, yakni pemerintah dan DPR.

Selain itu, Feri juga mengingatkan bahwa penyelenggara pemilu belum melakukan simulasi terkait sejumlah alternatif model keserentakan yang muncul setelah putusan Mahkamah Konstitusi itu. Hal ini membuat belum ada pemetaan problematika dari setiap pilihan model yang ada.

Oleh karena itu, menurut Feri, perppu seyogianya hanya mengatur pengunduran waktu terkait penyelenggaraan pilkada serentak 2020. Kalaupun ada yang ingin ditambahkan, hal itu mesti bersifat mendorong proses penyelenggaraan pemilu.

Hasil kajian Pusako, Netgrit, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), serta Rumah Kebangsaan terkait perppu penundaan pilkada menunjukkan perlunya pengisian kelemahan hukum terkait pilkada lanjutan atau susulan setelah penundaan akibat wabah Covid-19 yang skalanya begitu luas. Sebab, dalam UU No 10/2016, pengaturan penundaan hanya diperuntukkan bagi daerah-daerah tertentu.

Dalam kajian itu, pilkada di-

nilai paling baik dilakukan setelah Juni 2021 dengan mempertimbangkan anggaran, waktu, situasi sosial masyarakat, dan masa akhir jabatan kepala daerah. Hal lain yang diusulkan, perppu juga mengatur anggaran pilkada agar tidak lagi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tetapi bersumber dari APBN.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar saat dihubungi mengatakan, telah ada tim pemerintah yang merumuskan perppu penundaan pilkada. Tim itu terdiri dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Ditanya kapan draf tersebut akan disampaikan kepada Presiden, Bahtiar tak menjawab rinci. "Draf perppu sedang dirumuskan oleh tim pemerintah," katanya.

Kajian komprehensif

Menyikapi usulan perubahan desain pilkada berbasis periode jabatan kepala daerah, Bahtiar menyampaikan, hingga kini, pemerintah belum bersikap atas usulan Komisi II DPR. Sebab, penerapan Putusan MK Nomor 55/PUU-XII/2019 berkaitan langsung dengan substansi UU No 7/2017 tentang Pemilu.

"Putusan MK tersebut berimplikasi pada desain pemilu dan pilkada secara lengkap sehingga tak bisa serta-merta hanya mengubah keserentakan pilkada," ucapnya.

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mengingatkan, penataan jadwal pilkada tetap tak boleh menghilangkan de-

sain keserentakan pemilu.

"Kalau memang DPR serius ingin melakukan penataan itu, situasi sosial masyarakat, dan masa akhir jabatan kepala daerah, hal lain yang diusulkan, perppu juga mengatur anggaran pilkada agar tidak lagi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tetapi bersumber dari APBN."

Ia tidak sepakat apabila penataan jadwal pilkada hanya didasari pada masa jabatan satu periode lima tahun. Belajar dari penyelenggaraan Pemilu 2019, pengambilan keputusan opsi penataan jadwal pilkada harus menjadi bagian dari mewujudkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilu, peningkatan literasi demokrasi bagi pemilih, serta efektivitas sistem presidensial.

"Jangan sekadar berorientasi pada periode masa jabatan. Kalau itu, kan, orientasinya sangat politis. Tetapi juga harus holistik, melihat kepentingan penataan jadwal pemilu sesuai dengan tujuan untuk efektivitas pemerintahan dan penyelenggaraan pemilu yang betul-betul demokratis," tutur Titi.

Anggota Komisi Pemilihan Umum, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, saat dihubungi usai dilantik oleh Presiden, mengatakan, dirinya menghormati proses dan hasil rapat dengar pendapat yang dilakukan. Secara prinsip, kata Raka, hal itu perlu dilihat dari aspek hukum komprehensif.

Hal ini dinilai penting untuk memberikan payung hukum yang memadai. Selain itu, yang juga penting adalah penguatan aspek manajemen pelaksanaan tahapan. (INK/DEA/BOW)

PENANGANAN COVID-19

Penyisiran APBD Belum Juga Tuntas

AMBON, KOMPAS — Sejumlah pemerintah daerah masih belum tuntas menyisir anggaran daerahnya untuk direalokasikan guna penanganan Covid-19. Penyisiran dan realokasi diperkirakan sudah tuntas pekan ini atau sebelum tenggat yang diberikan pemerintah pusat, 23 April 2020.

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), hingga Rabu (15/4/2020), masih ada 17 pemerintah daerah (pemda) yang belum melaporkan hasil pengutamaan dan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna penanganan Covid-19. Pemda dimaksud adalah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, dan 15 pemerintah kabupaten (kabup) di Papua.

Sekretaris Daerah Maluku Kasrul Selang melalui pesan singkat kepada *Kompas*, Rabu, mengatakan, hingga kini proses penyisiran APBD masih terus dilakukan.

"Hingga saat ini masih dilakukan rasionalisasi minimal 50 persen dari belanja barang atau modal. Mungkin Jumat (17/4) sudah bisa rampung sehingga bisa diketahui besarnya," katanya.

Bendahara Fraksi Partai Golkar DPRD Maluku Anos Yermias membenarkan hal itu. Hingga kini, organisasi perangkat daerah dan komisi terkait di DPRD sedang melakukan sinkronisasi postur anggaran. Setelah disetujui bersama, hasilnya akan dibawa ke Rapat Paripurna DPRD Maluku untuk disahkan.

Untuk tahun 2020, APBD Maluku sebesar Rp 3,2 triliun. Dari jumlah itu, alokasi belanja barang dan modal sekitar 35 persen atau setara dengan Rp 1,1 triliun.

Menurut Anos, di antara pos yang menurut rencana direalokasi untuk penanganan Covid-19 adalah pembangunan gedung dan pengadaan barang yang tidak mendesak. "Contohnya, pembangunan kantor Perusahaan Daerah Panca Karya, kami minta tidak perlu dilakukan tahun ini. Semua fraksi di DPRD Maluku tidak keberatan," ujarnya.

Hasil realokasi akan digunakan untuk memberikan bantuan sosial bagi warga di Maluku yang terimbas pandemi Covid-19. Sebagaimana diberitakan *Kompas* pekan lalu, kalangan ekonomi lemah, seperti buruh serabutan, tukang ojek, pengemudi becak, pedagang kaki lima, dan sopir angkutan, menenggeluh kehilangan pendapatan. Buce (34), sopir angkutan di Ambon, misalnya, terpaksa berhenti bekerja karena penghasilan dalam satu hari jauh di bawah biaya operasional.

"Isi bahan bakar Rp 100.000, sementara hanya bisa dapat Rp 70.000," katanya. Sebelumnya, ia bisa meraup penghasilan hingga Rp 300.000 per hari. Penumpang angkutan berkurang setelah orang-orang memilih tinggal di rumah demi mencegah penyebaran Covid-19. Adapun Pemprov Papua telah tuntas merealokasi anggarannya. Ketua Harian Satuan Tugas Pengendalian, Pencegahan, dan Penanganan Virus Korona Papua Welliam Manderi mengatakan, total anggaran yang direalokasi mencapai Rp 342 miliar.

Pos anggaran yang direalokasi bersumber dari tujuh kegiatan, antara lain perjalanan dinas, sosialisasi, kegiatan simulasi, dan bimbingan teknis. "Realokasi anggaran ini di seluruh instansi bersumber dari APBD. Anggaran ini sangat berguna untuk instansi teknis yang bertugas dalam penanganan virus korona dan dampak ekonomi," ujarnya.

Selamatkan warga

Untuk 15 pemkab di Papua yang belum tuntas merealokasi anggarannya, Pemprov Papua akan kembali mengingatkan agar proses itu dipercepat. "Kami akan kembali mengeluarkan surat edaran. Kami berharap mereka berkomitmen menyelamatkan warganya dari Covid-19 dengan menyediakan anggaran yang cukup," kata Welliam.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Najmul Akhyar mengatakan, pihaknya akan turut mengingatkan pemda yang belum me-

laporkan realokasi APBD untuk penanganan Covid-19. Sebab, jika tidak, pemda bakal kesulitan mendanai masalah yang timbul sebagai dampak Covid-19. Pada akhirnya, yang dirugikan adalah masyarakat.

"Saya akan coba hubungi teman-teman pemda yang belum merealokasi dana. Apa kesulitan mereka menyisir APBD? Selama ini banyak pemda yang berkonsultasi dengan Apkasi tentang realokasi dana ini. Dan, mereka cukup responsif untuk melaksanakan sejumlah aturan dari Kemendagri," tuturnya.

Menurut Najmul, banyak kegiatan pemda yang harus dibatalkan karena pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Karena itu, seharusnya tidak ada alasan bagi pemda untuk tidak mengalokasikan anggaran guna penanganan Covid-19.

Ditanya soal kecukupan anggaran daerah, ia mengatakan, rata-rata pemda belum bisa memprediksi karena situasi pandemi yang terus berubah. Namun, daerah sebenarnya bisa mengantisipasi kekurangan dana dengan menyisir secara cermat belanja yang tidak menjadi prioritas.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto mengatakan, dari yang telah dilaporkan ke Kemendagri, total hasil realokasi APBD untuk penanganan Covid-19 mencapai Rp 56,24 triliun.

Sesuai Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 pada 2 April 2020, anggaran diarahkan untuk tiga prioritas, yaitu penanganan kesehatan, dampak ekonomi, dan penyediaan jaring pengaman sosial.

Terkait 17 pemda yang belum melapor, Ardian berharap mereka segera menuntaskan proses realokasi. "Kami berharap mereka lebih responsif merealokasikan APBD-nya. Apalagi, Presiden juga sudah menegur daerah yang belum mengutamakan anggarannya untuk penanganan Covid-19," ujar Ardian.

(DEA/FRN/FLO/CIP/OKA)

Menjalankan Tugas



KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Warga berjaga di gang yang ditutup sementara di sekitar Jalan Otto Iskandardinata, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/4/2020). Warga secara sukarela menjalankan tugas kewargan (civic duty) di tengah pembatasan sosial berskala besar guna mencegah penyebaran Covid-19.

KILAS POLITIK & HUKUM

Tugas Prabowo untuk Rektor Baru Unhan

Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut Laksamana Muda Amarulla Octavian resmi dilantik menjadi Rektor Universitas Pertahanan (Unhan) menggantikan Letnan Jenderal Tri Legionosuko. Upacara pelantikan dipimpin langsung Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2020). Dalam rilis yang diterima *Kompas*, Menhan saat menyampaikan amanatnya menugaskan Amarulla untuk segera menyiapkan pembentukan fakultas kedokteran militer. Beberapa program studi direncanakan menghasilkan para perwira Korps Kesehatan TNI yang cakap menghadapi wabah penyakit, seperti pandemi Covid-19. Unhan juga harus memiliki fakultas farmasi militer guna menyiapkan obat-obatan yang dibutuhkan rakyat. (*)/APA

Kejagung Teliti Perbaikan Berkas Kasus Paniai

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah memperbaiki berkas penyelidikan kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia berat di Paniai, Papua, tahun 2014, seperti permintaan Kejaksaa Agung (Kejagung). Berkas pun telah kembali diserahkan kepada Kejagung. Ini seperti disampaikan oleh Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik di Jakarta, Rabu (15/4/2020). Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono membenarkan hal itu. Berkas nantinya akan diteliti kembali oleh jaks di Direktorat HAM Berat Kejagung. Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat Wahyudi Djafar berpandangan, peluang penyelesaian kasus Paniai sangat besar. Sebab, peristiwa itu belum lama terjadi. Kuncinya, tinggal komitmen dari Kejagung untuk menyelesaikannya. (NAD)

LEGISLASI

Pembahasan Perppu No 1/2020 Tunggu Masa Sidang DPR Berikutnya

JAKARTA, KOMPAS — DPR kemungkinan membahas Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Menjadi Undang-Undang pada masa persidangan saat ini. Padahal, jika mengacu Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945, pembahasan seharusnya baru dilakukan pada masa persidangan DPR berikutnya.

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Rabu (15/4/2020), mengatakan, saat ini DPR sedang fokus membantu pemerintah dalam penanganan Covid-19. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 itu pun menjadi salah satu hal penting yang akan dibahas. Namun, pembahasannya masih menunggu rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR.

"Nanti itu akan kami bahas, mungkin sebelum reses," katanya. Masa persidangan DPR saat ini atau masa persidangan ketiga berakhir pada 12 Mei

2020. DPR kemudian memasuki masa reses sebelum memulai masa sidang keempat.

Pada 2 April lalu, pemerintah telah menyerahkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penetapan Perppu No 1/2020 Menjadi UU.

Perppu No 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan ditetapkan tanggal 31 Maret 2020.

Kekebalan hukum

Salah satu pasal di dalamnya menuai kritik publik karena dianggap memberikan kekebalan hukum. Pasal yang dimaksud adalah Pasal 27 Ayat (2). Pasal itu mengatur, anggota, sekretaris, anggota sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK); pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin

Perppu tersebut seharusnya tidak dibahas pada masa persidangan DPR yang berlangsung saat ini.

Charles Simabura

Simpanan; dan pejabat lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan perppu tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai aturan perundang-undangan.

Namun, pengajar hukum tata negara Universitas Andalas, Padang, Charles Simabura, menilai, perppu tersebut seharusnya tidak dibahas pada masa persidangan DPR yang berlangsung saat ini, tetapi pada masa sidang berikutnya. Ini mengacu pada Pasal 22 UUD 1945. Karena itu, dia mempertanyakan sikap pemerintah yang telah menyerahkan draf RUU pene-

tapan perppu itu ke DPR.

"Perppu ini, kan, ditetapkan tanggal 31 Maret 2020, sementara masa sidang ketiga DPR dibuka pada 30 Maret 2020. Tetapi, kenapa RUU perppu ini diserahkan kepada DPR pada 2 April 2020," katanya.

Peneliti Kode Inisiatif, Viola Reininda, mengingatkan, kalau DPR mau membahasnya pada masa sidang saat ini, DPR harus mencermati substansinya, terutama Pasal 27. Pasal itu dinilai berbahaya karena memberikan kekebalan hukum dan berpotensi menyimpangi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Anggaran TNI

Komisi I DPR menyetujui usulan penambahan anggaran sebesar Rp 3,285 triliun yang diajukan oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Persetujuan diberikan saat Komisi I rapat kerja dengan Panglima TNI, Rabu siang.

"Namun, dana kontingensi yang TNI usulkan sebesar Rp 3,285 triliun itu baru akan kami

pakai jika kondisi darurat di masyarakat akibat pandemi Covid-19 yang semakin menghebat dan tidak terkendali. Akan tetapi, jika kondisinya aman dan terkendali, dana tambahan tersebut tidak akan TNI gunakan. Hanya, DPR sekarang sudah menyetujui jika terjadi apa-apa dan TNI menggunakannya," kata Hadi saat dikonfirmasi *Kompas* pada Rabu malam.

Anggaran tambahan itu salah satunya untuk membantu penanganan kesehatan. TNI disebutkan memiliki 109 rumah sakit yang bisa ditingkatkan kemampuannya menjadi rumah sakit rujukan Covid-19. Namun, untuk itu, diperkirakan butuh dana Rp 1,81 triliun, di antaranya untuk menyediakan ruang-ang bertekanan negatif serta alat kesehatan, seperti alat pelindung diri dan ventilator.

Adapun Rp 1,46 triliun sisanya untuk pengerahan 95.000 personel TNI selama 150 hari. Selama 90 hari untuk operasi kontingensi dan 60 hari untuk tahap rehabilitasi atau rekonstruksi. (REK/EDN)

Dana Bencana Covid-19 Rawan Dikorupsi

Prinsip kehati-hatian dan transparansi dalam pengelolaan dana penanganan Covid-19 perlu dikedepankan untuk menghindari korupsi.

JAKARTA, KOMPAS — Dana penanganan Covid-19 senilai Rp 405 triliun yang dianggarkan pemerintah rawan dikorupsi. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian perlu diterapkan dalam mengelola dana tersebut sehingga penumpang gelap yang hanya mencari keuntungan pribadi dapat dicegah.

Kemungkinan penyalahgunaan wewenang ataupun dana bantuan Covid-19 kian terbuka lebar karena Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 memberi hak imunitas dari gugatan perdata dan tuntutan pidana bagi pihak-pihak yang melaksanakan perppu.

Sekretaris Kabinet Indonesia Bersatu II Dipo Alam, dalam diskusi bertajuk "Waspada Moral Hazard KPK Belum Mati, Kawal Rp 405 Triliun Dana Corona", Rabu (15/4/2020), mengingatkan, Perppu No 1/2020 memudahkan seseorang untuk menyalahgunakan kekuasaannya.

Sesepat dengan Dipo, Ketua Dewan Pengurus Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial Didik J Rachbini mengatakan, perppu itu memungkinkan adanya penumpang gelap yang mencoba mencari keuntungan sendiri. Dengan adanya pasal proteksi dari gugatan perdata dan pidana, pemerintah dapat dengan mudah melakukan penyelewengan karena tak bisa dituntut.

Alhasil, kasus pelanggaran yang dilakukan Staf Khusus Presiden Andi Taufan Garuda Putra bisa terjadi. Menurut Didik, Andi dengan mudah menggunakan kekuasaannya untuk mencari keuntungan pribadi. Ia mengirimkan surat berkop Sekretariat Kabinet kepada camat seluruh Indonesia agar bisa membantu perusahaannya.

Staf khusus milenial Presiden Joko Widodo itu telah meminta maaf terkait dengan keberadaan surat tersebut. Surat itu merupakan permohonan agar para camat mendukung edukasi dan pendataan kebutuhan alat pelindung diri demi melawan Covid-19 yang dilakukan perusahaan pribadi Andi, yaitu PT Amarta Mikro Fintek. Selain memohon maaf, Andi telah menarik kembali surat itu.

Tak hanya Andi, sebagian kalangan juga menyoroti penunjukan perusahaan milik stafus presiden menjadi salah satu mitra pelatihan daring beranggarkan Rp 5,6 triliun, dari total anggaran Rp 20 triliun, dalam program Kartu Prakerja. Ada delapan perusahaan aplikasi yang ditunjuk pemerintah menjadi mitra sehingga masing-masing perusahaan berpotensi meraup uang dari program tersebut Rp 700 miliar.

Pendiri Perhimpunan Pendidikan Demokrasi Rachland Nashidik, yang juga politisi Partai Demokrat, mengatakan, penunjukan perusahaan stafus itu hanya merupakan bukti bahwa pemerintah sangat percaya diri kekuasaannya mengatasi hukum. Tidak ada transparansi dan akuntabilitas dalam proses itu. Uang negara dige-

lontorkan pada pihak-pihak hanya berdasarkan kedekatan kekuasaan. Rasa percaya diri itu, menurut dia, bisa bersumber pada pasal "kekebalan hukum" dalam Perppu No 1/2020.

Menurut Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Prakerja Panji Winantya Ruky, pemerintah tidak melakukan penunjukan untuk platform digital yang akan bekerja dalam program Kartu Prakerja. Kedepan platform digital itu dapat bekerja sama dengan pemerintah karena memenuhi persyaratan sebagaimana disebut dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No 3/2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden No 36/2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

"Tidak ada penunjukan dan pengarahannya. Platform itu harus bersaing untuk dapat melayani masyarakat dan mana pelatihan yang dapat membantu masyarakat," kata Panji.

Secara terpisah, Staf Khusus Presiden, yang juga pendiri Ruangguru, Adamas Belva Syah Devara menegaskan, dirinya tidak ikut dalam pengambilan keputusan apa pun dalam program Prakerja, termasuk penganggaran dan mekanisme penentuan mitra kerja. Semua itu dilakukan Kemenko Perekonomian dan Manajemen Pelaksana (PMO).

"Dapat dicek di semua daftar kehadiran rapat mengenai Prakerja bersama Kemenko dan PMO, saya tidak pernah hadir," kata Belva.

Menurut Belva, mitra kerja resmi pemerintah dalam Prakerja mengikuti proses seleksi sejak akhir 2019. Program Skill Academy sudah didirikan sejak tahun lalu dan merupakan ekstensifikasi dari produk Ruangguru. Sejauh ini, program itu sudah berjalan dengan lebih dari 1 juta pengguna. Dengan demikian, menurut Belva, wajar jika Ruangguru terpilih menjadi salah satu mitra.

Saat ini, Belva mengaku sedang mengonfirmasi kepada pihak Istana Kepresidenan tentang adanya kemungkinan konflik kepentingan dirinya sebagai mitra. Jika ada, Belva mengaku siap mundur dari posisi staf khusus presiden secepatnya.

Transparan

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi mendorong kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan institusi pemerintah lainnya untuk transparan dalam mengelola dana bantuan. Transparansi tersebut diwujudkan dengan mengadministrasikan dan mempublikasikan segala bentuk sumbangan dan bantuan yang diterima terkait penanganan Covid-19.

"Instansi dapat memanfaatkan situs resmi untuk memublikasikan penerimaan dan penggunaan bantuan yang diterima. Melalui situs itu, instansi juga disarankan melakukan pemutakhiran data setiap hari sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pe-

merintah," kata Ketua KPK Firli Bahuri.

Anjuran itu tertuang dalam surat resmi KPK tertanggal 14 April 2020 yang telah dikirimkan kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di tingkat nasional ataupun daerah dan juga kepada pimpinan kementerian, lembaga, pemda, dan instansi terkait lainnya. Firli menjelaskan, surat itu untuk menjawab kecurigaan sejumlah instansi akan adanya potensi gratifikasi atas penerimaan sumbangan dari masyarakat. (PDS/NAD/LAS)

Dengungkan Toleransi



Co-founder Ruangguru.com Iman Usman saat menyampaikan materi dalam acara Creator Muda Summit 2020 di Art: 1 New Museum, Jakarta, Rabu (15/4/2020).



UMKM Tetap Optimis di Tengah Pandemi COVID-19 Bangun Bisnis dari Rumah bersama BANK BRI

Sebagai bentuk dukungan BANK BRI pada program pemerintah untuk melakukan *Physical Distancing*, BANK BRI menawarkan berbagai kemudahan dan akses layanan perbankan digital bagi para pelaku UMKM di seluruh Indonesia agar tetap optimis dan produktif dalam menjalankan usaha dari rumah.



Dukungan Pemasaran & Pemberdayaan

Saatnya mengubah metode pemasaran *offline* menjadi *online* melalui aplikasi Indonesia Mall. Indonesia Mall merupakan kerjasama BANK BRI di bidang *e-commerce* untuk mendorong UMKM *Go Online* agar dapat meningkatkan jangkauan penjualan produk UMKM dan memberikan dampak positif bagi ekonomi kerakyatan di Indonesia.

Tingkatkan kompetensi melalui program edukasi dan pembinaan dalam hal pengembangan usaha melalui aplikasi UMKM Smart.

Tersedia di Google play

Gunakan Kemudahan Permodalan dengan KUR 6% dan Kredit UMKM dari BANK BRI



Nikmati kemudahan pengajuan KUR BRI dan Kredit UMKM BRI melalui <https://eform.bri.co.id/> atau melalui Agen BRILink maupun melalui Unit Kerja BANK BRI terdekat. Setelah data atau dokumen masuk, Petugas BANK BRI akan segera menghubungi nasabah dan membantu proses pinjaman melalui aplikasi BRISpot Mikro & Ritel.



Tuntaskan Semua Transaksi melalui BRImo



Nikmati berbagai kemudahan transaksi dan pembayaran angsuran dimana saja dan kapan saja melalui aplikasi BRImo.



Nikmati Berbagai Keringanan & Dukungan Finansial dari BANK BRI

Untuk menjaga keberlangsungan usaha dari para pelaku UMKM dalam menghadapi pandemi COVID-19, BANK BRI memberikan relaksasi angsuran bagi pelaku UMKM yang usahanya terdampak.



Andi Taufan Garuda (kiri) dan Adamas Belva Syah Devara (ketiga dari kiri) saat diperkenalkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai Staf Khusus Presiden dari kalangan milenial di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Pelajaran dari New York

Lonjakan kasus kematian di kota New York, Amerika Serikat, mesti menjadi pelajaran berharga dalam penanganan penyakit Covid-19. Tes masif penting sebelum pemerintah mengambil kebijakan.

NEW YORK, RABU — Jumlah kasus meninggal akibat penyakit Covid-19 di kota New York, Amerika Serikat, meningkat tajam, Rabu (15/4/2020). Kenaikan pesat jumlah kasus wafat terjadi setelah otoritas setempat menambahkan warga yang diduga meninggal karena Covid-19, tetapi tak sempat menjalani tes.

Sebelumnya kasus seperti ini belum masuk ke dalam penghitungan. Pendekatan ini kemungkinan diikuti kota-kota lain dan bisa memicu terjadi lonjakan kasus kematian di AS.

Otoritas kesehatan kota New York melaporkan, ada 3.778 kasus kematian. Para dokter, berdasarkan gejala dan rekam medis, diyakini Covid-19 sebagai penyebab kematian. Namun, ribuan warga yang meninggal itu belum pernah menjalani tes.

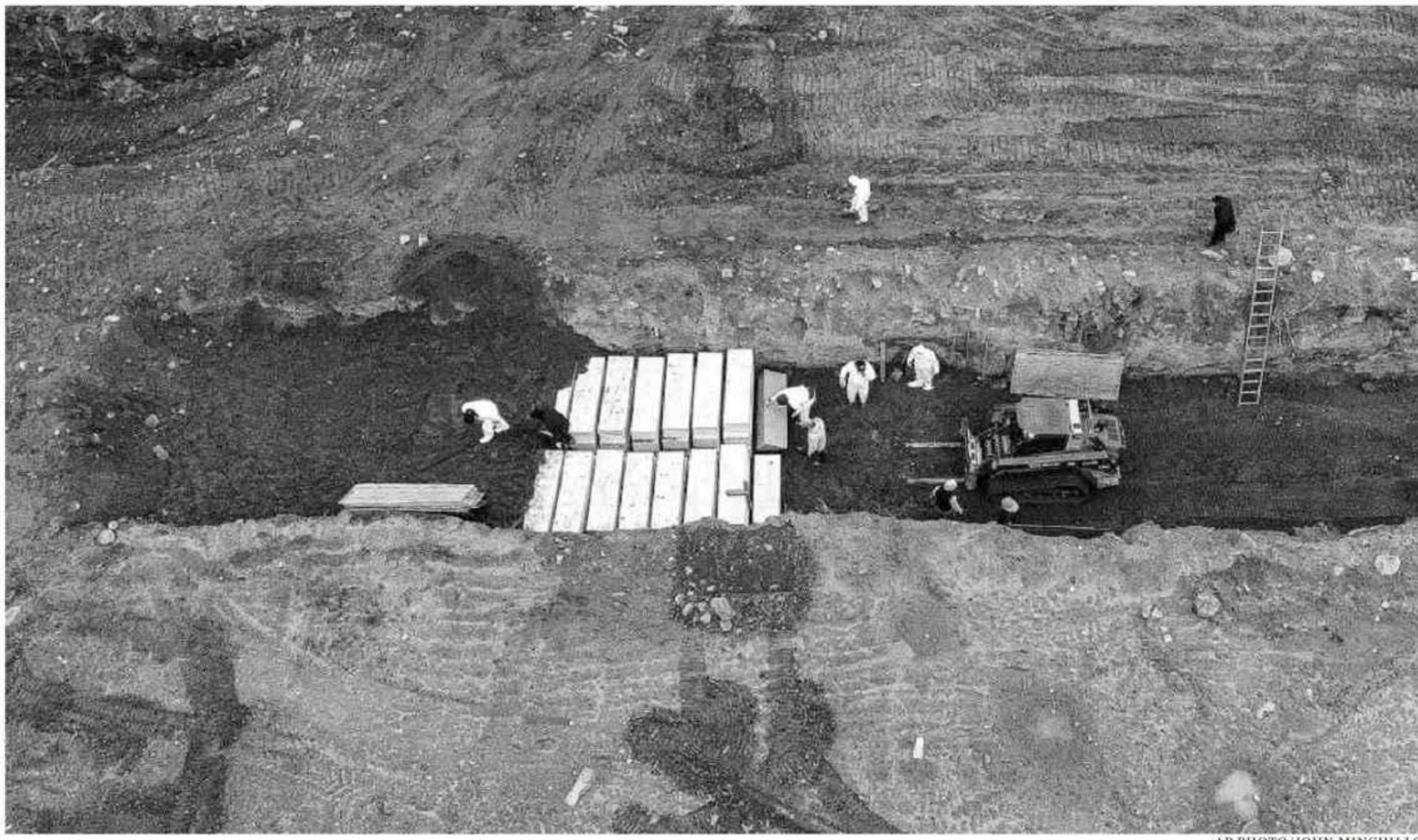
Angka itu merupakan akumulasi jumlah kematian yang tercatat sejak 11 Maret 2020. Tanggal itu dipilih sebagai awal penghitungan karena pada hari itu terdeteksi kasus meninggal pertama di AS akibat Covid-19.

Kematian akibat Covid-19 yang sudah terkonfirmasi di laboratorium sebanyak 6.589 kasus. Dengan demikian, kematian akibat Covid-19 di kota New York lebih dari 10.000 kasus. Ini kurang lebih sepertiga dari sekitar 28.000 kasus meninggal di AS.

Tanpa konfirmasi lab

Perubahan penghitungan kasus kematian itu terjadi karena selama ini penghitungan jumlah kematian hanya berdasarkan konfirmasi laboratorium. Penghitungan dengan cara itu gagal merekam mereka yang sakit dan meninggal di rumah sebelum korban itu menjalani tes Covid-19. Padahal, berdasarkan gejala dan rekam medis, banyak kematian tanpa uji laboratorium tetapi mengarah pada positif Covid-19.

"Di balik setiap kematian ada teman, anggota keluarga, dan orang-orang terkasih. Kami fokus untuk memastikan bahwa setiap warga kota New York yang meninggal karena Co-



Para pekerja memakai alat pelindung diri saat menguburkan jenazah di Hart Island, Bronx, New York, Amerika Serikat, 9 April 2020. Kasus kematian akibat Covid-19 melonjak di kota New York, Selasa (14/4/2020), setelah para pejabat memasukkan para korban terduga Covid-19, tetapi mereka meninggal tanpa pernah diuji di laboratorium.

vid-19 dihitung," kata Oxiris Barbot, komisaris kesehatan dari Departemen Kesehatan kota New York.

"Selain akan menunjukkan dampak tragis virus korona baru (SARS-CoV-2) pada kota kita, data ini juga membantu kami untuk mengetahui seberapa besar pandemi ini dan akan menjadi panduan kami di dalam mengambil setiap keputusan."

"Data ini mencengangkan," ujar Andrew Noymer, Associate Professor Kesehatan Masyarakat di University of California Irvine, seperti dikutip media utama AS, *New York Times*.

Jumlah kasus kematian yang baru di kota New York itu, menurut Noymer, memberikan gambaran "realitas serius yang menunjukkan bahwa kasus-

kasus kematian akibat penyakit Covid-19 telah melebihi kematian akibat penyebab lain".

Lonjakan kematian yang terjadi di New York kemungkinan bisa saja terjadi di kota-kota di AS, atau kota lain di dunia. Para pejabat kesehatan mengatakan, perhitungan atas berapa jumlah sebenarnya korban meninggal dari pandemi Covid-19 ini menghadapi berbagai tantangan. Tantangan termasuk seperti korban meninggal, tetapi ternyata memiliki penyakit penyerta lain atau bawaan.

Tes masif peting

Hal yang dilakukan otoritas kota New York berbeda dengan apa yang dilakukan Pemerintah Negara Bagian New York. Gubernur New York Andrew M

Cuomo mengatakan, data kasus meninggal akibat Covid-19 resmi dihitung dari pasien positif penyakit Covid-19 dan meninggal di rumah sakit.

Cara ini berbeda dengan yang dilakukan otoritas kota New York, yakni turut menghitung data kematian pasien positif Covid-19 dan meninggal di rumah atau rumah sakit. Ada korban tidak terdeteksi melalui pemeriksaan laboratorium, tetapi turut dihitung.

Tindakan kota New York dengan memasukkan kasus kematian dari terduga Covid-19 sebagai kasus kematian menjadi gambaran betapa pentingnya melakukan tes laboratorium masif. Tes sebanyak mungkin penting untuk mengetahui siapa saja yang sudah

terinfeksi dan segera diberi tindakan penting.

Pada Rabu (8/4/2020), BBC melaporkan ada dua alasan mengapa tes menjadi penting dalam menghadapi pandemi Covid-19. Ini untuk mendiagnosis individu dan untuk mengetahui sejauh mana virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19 telah menyebar. Dengan mengetahui sebaran penyakit Covid-19, pemerintah terbantu untuk menetapkan rencana, termasuk mengantisipasi kebutuhan tempat tidur dan ruang perawatan.

Selain itu, hasil tes masif juga bisa menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan seputar pembatasan sosial dan jaga jarak fisik. (AP/REUTERS/ADH)

DAMPAK COVID-19

Resesi Terburuk, Baru Pulih Tahun Depan

WASHINGTON DC, RABU — Dana Moneter Internasional memproyeksikan, pandemi Covid-19 kini mendorong ekonomi global ke dalam resesi terdalam selama seabad ini, yakni membuat produk domestik bruto dunia tumbuh negatif 3 persen tahun ini. Namun, ekonomi global diproyeksikan kembali pulih dengan akselerasi tinggi pada 2021.

Kepala Ekonom Dana Moneter Internasional (IMF) Gita Gopinath dalam presentasi World Economic Outlook, Selasa (14/4/2020), mengatakan, nilai ekonomi global yang terpengas tahun ini lebih besar dari akumulasi ekonomi Jerman dan Jepang. "Kerugian kumulatif terhadap produk domestik bruto (PDB) global sepanjang 2020 dan 2021 dari krisis akibat pandemi bisa sekitar 9 triliun dollar AS, lebih besar dari gabungan ekonomi Jepang dan Jerman," kata Gopinath.

Dengan sebagian besar ekonomi global ditutup di tengah upaya penanggulangan virus dan menjaga sistem kesehatan agar tidak runtuh, IMF memperingatkan "adanya risiko parah dari hasil yang lebih buruk". Hal itu diproyeksikan karena "ketidakpastian ekstrem di sekitar kekuatan pemulihan". Ekonomi global diperkirakan kembali tumbuh hingga 5,8 persen pada 2021, dengan syarat pandemi berakhir pada paruh kedua 2020. Namun, IMF kesulitan dalam membuat perkiraan akurat di tengah situasi yang berubah begitu cepat saat ini.

Pandemi Covid-19 telah membuat macetnya perjalanan dan memaksa bisnis, toko, dan restoran tutup di mayoritas tempat di dunia. "Hasil pertumbuhan yang jauh lebih buruk mungkin saja terjadi," kata IMF. "Yakni jika langkah-langkah pandemi dan pengendaliannya lebih lama atau jika efek lanjutannya secara luas muncul karena penutupan perusahaan dan pengangguran yang mengiringi."

Tak dapat dihindari

IMF mengatakan, kemungkinan penurunan ekonomi global tahun ini adalah yang terburuk sejak Depresi Besar tahun 1930-an. Judul laporan yang digunakan IMF kali ini adalah Penutupan Besar (*The Great Lockdown*). Laporan dirilis menjelang pertemuan semi virtual IMF dan Bank Dunia.

Kontraksi ekonomi tahun ini merupakan kontraksi pertama sejak krisis keuangan global 2009. Namun, ditegaskan, tekanan ekonomi kali ini hampir tidak dapat dibandingkan dengan kondisi akhir dekade 2000-an. Pada krisis keuangan 2009, penurunan ekonomi hanya mencapai 0,1 persen dan ekonomi pasar berkembang masih tumbuh dengan kecepatan solid.

Dalam depresi hampir seabad yang lalu, ekonomi global mengalami kontraksi sekitar 10 persen. Ekonomi negara-negara maju kala itu menyusut 16 persen dari tahun 1929 hingga 1932. Tahun ini, negara-negara maju diperkirakan tertekan sekitar 6 persen. Perlambatan parah itu, menurut IMF, tidak dapat dihindari, tetapi langkah-langkah fiskal, moneter, dan finansial dapat mengurangi tekanan negara-negara.

Banyak pemerintah bersama bank sentral telah menerapkan belanja besar-besaran yang memompa likuiditas ke dalam sistem keuangan guna mencegah gangguan. Gopinath mengatakan, akan lebih banyak lagi yang dibutuhkan setelah krisis kesehatan ini berakhir. "Setelah pemulihan terjadi dan melewati fase pandemi untuk negara maju, penting menambah stimulus fiskal lebih luas," ujarnya.

Dikatakan, pengeluaran besar-besaran akan menyebabkan peningkatan tajam utang pemerintah dan tingkat defisit. Total utang secara global kini sudah lebih dari 80 persen dari PDB global. Jika pemulihan dimulai pada 2021 dan dengan suku bunga rendah, maka perlahan-lahan tingkat utang akan turun. Namun, beberapa negara akan membutuhkan pembebasan dari kewajiban utang mereka. (AFP/REUTERS/BEN)

KILAS LUAR NEGERI

Uni Eropa: Sikap Trump Tidak Beralasan

Uni Eropa menilai tindakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang membekukan pendanaan pada Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di masa kritis ini "tidak beralasan". Justru sekarang masanya setiap negara harus bersatu melawan pandemi Covid-19. Kepala Kebijakan Luar Negeri UE Josep Borrell, Rabu (15/4/2020), mengatakan, blok UE yang beranggotakan 27 negara sangat menyesalkan sikap Trump yang membekukan pendanaan AS bagi WHO. Badan kesehatan dunia itu diperlukan "lebih dari sebelumnya" untuk memerangi pandemi Covid-19. Borrell mengatakan, "Hanya dengan bekerja sama kita bisa menghadapi krisis yang tak kenal batas negara ini." Sebelumnya Trump menilai, dukungan dana dihentikan karena WHO gagal menghentikan pandemi di seluruh dunia, yang kini menginfeksi hampir 2 juta orang dan membunuh 127.000 orang. (AP/REUTERS/ADH)

KILASAN KAWAT SEDUNIA



Seminole

Seorang nenek berusia 93 tahun di Seminole, Pittsburgh, Pennsylvania, Amerika Serikat, menggunakan kekuatan internet untuk memengaruhi dunia. Ia membuat heboh dunia maya setelah fotonya yang meminta belas kasihan karena kehabisan bir beredar viral. Sang nenek tampak berdiri di jendela rumahnya sambil memegang satu kaleng bir di tangan kanannya dan sebuah plakat putih bertulisan "I need more beer!" (saya butuh bir lagi). Ia kehabisan stok karena tidak ada pasokan lagi setelah pemerintah setempat menerapkan kebijakan penguncian. Dalam wawancara dengan televisi lokal, KDKA-TV, sang nenek tampil gembira di balkon rumahnya dengan dua telapak tangannya menggenggam sekaleng bir kesukaan dan dia guncang-guncang. Rupanya dia telah berhasil mencuri perhatian pemasok untuk memberinya 150 kaleng lagi bir. Sang nenek mengatakan, dengan minum bir, dia merasa lebih rileks di tengah pandemi—yang telah membunuh lebih dari 3.000 orang di panti jompo di AS. Sebuah foto lain pun dipasang lagi di Facebook dengan tulisan "I got more beer!" (Saya telah mendapatkan bir lagi). Foto-fotonya disukai jutaan orang. (AP/CAL)



Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen (kanan) saat berbicara dengan beberapa siswa ketika sekolah mulai dibuka kembali di Lykkebo School, Kopenhagen, Rabu (15/4/2020). Denmark mulai membuka secara bertahap kebijakan penguncian dengan mengizinkan sekolah-sekolah dibuka kembali, Rabu.

DENMARK

Kebijakan Karantina Dicabut Bertahap

KOPENHAGEN, RABU — Setelah selama satu bulan menjalani karantina akibat pandemi Covid-19, Denmark mulai membuka kembali tempat penitipan anak, taman kanak-kanak, dan sekolah dasar secara bertahap mulai Rabu (14/4/2020). Sementara sekolah menengah tetap belajar jarak jauh dan mulai ke sekolah per 10 Mei 2020.

Denmark menjadi negara pertama di Eropa yang mencabut karantina. Austria sudah mengumumkan rencananya untuk mencabut kebijakan karantina, tetapi belum juga diwujudkan dan masih harus memastikan keamanan kondisi kesehatan penduduknya ketika karantina itu dicabut.

Namun, tidak semua sekolah mau dan meminta lebih banyak waktu untuk menyesuaikan dengan aturan kesehatan. Hanya separuh sekolah di Denmark yang akan buka kembali. Di Kopenhagen ada 35 persen sekolah yang akan buka kembali selambatnya 20 April ini.

Pada awal April, pemerintah mengumumkan sekolah hanya akan dibuka kembali apabila semua orang masih tetap bisa saling menjaga jarak fisik sejauh 2 meter dan mencuci tangan. Pengaturan banku dan meja di

kelas juga disesuaikan dengan ketentuan itu. Pada saat waktu istirahat pun anak-anak dan guru tidak diperbolehkan berkumpul dalam jumlah banyak.

Penolakan

Banyak orangtua menentang keputusan pembukaan kembali sekolah itu karena khawatir dengan pandemi. Ada petisi yang diteken 18.000 orangtua yang menolak kebijakan itu. Alasan mereka bisa dipahami karena di Denmark ada 6.691 kasus Covid-19 dengan 299 kematian.

Kebijakan karantina Denmark melarang lebih dari 10 orang berkumpul, menutup restoran, bar, salon, pertokoan, dan kelab. Pada Selasa lalu, pemerintah memperbolehkan toko-toko kecil buka, tetapi tetap mengharuskan warga menjaga jarak dan memakai masker. Warga disiplin mematuhi.

Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen mengatakan, keputusan membuka kembali sekolah dan disusul dunia usaha karena jumlah kasus positif Covid-19 terus menurun. Karantina dicabut secara bertahap hanya jika kasus Covid-19 stabil.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) khawatir langkah beberapa negara anggota Uni Ero-

pa yang mulai mencabut kebijakan karantinanya. Langkah ini dinilai terlalu dini dan justru akan membuka pintu bagi wabah korona gelombang kedua.

Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengingatkan, keputusan mencabut karantina seharusnya dilakukan hanya jika pandemi betul-betul sudah dikendalikan. Setiap negara juga harus memastikan layanan kesehatan yang baik dan tersedia lengkap bagi warga. Semua warga negara juga dipastikan telah mematuhi langkah-langkah preventif, seperti memakai masker, menjaga jarak fisik, dan mencuci tangan dengan sabun.

WHO juga mencatat, Austria dan Swiss akan mencabut karantina secara bertahap karena jumlah kasus yang stabil. Kanselir Jerman Angela Merkel juga menyatakan tidak perlu memperpanjang kebijakan karantina dan tetap berhati-hati setelah karantina dicabut.

Spanyol, salah satu negara terparah di Eropa, juga mau mencabut karantina. Warga sudah diperbolehkan kembali bekerja meski jumlah kasus positif masih di angka 169.496 kasus dan 17.489 orang tewas. (REUTERS/AFP/LUK)

PRINSIP SATU CHINA

China Tekan Hong Kong Terapkan UU Keamanan

HONG KONG, RABU — Pemerintah China menekan Hong Kong agar segera memberlakukan undang-undang keamanan. Sebelumnya tekanan ini telah berulang kali ditolak dan memicu gelombang aksi kerusuhan dan kekerasan selama berbulan-bulan.

Luo Huining, pejabat paling senior China di Hong Kong, Rabu (15/4/2020), mengatakan, UU itu harus segera diberlakukan karena aksi protes 2019 merusak hukum, kemakmuran, dan stabilitas Hong Kong.

Luo Huining adalah Kepala Kantor Penghubung China di Hong Kong. Dalam pidato peringatan Hari Pendidikan Keamanan Nasional China, ia pun mengkritik soal adanya campur tangan kekuatan asing dalam urusan Hong Kong.

"Jika 'semut-bukit' yang mengikis aturan hukum tidak dibersihkan, bendungan keamanan nasional akan dihancurkan dan kesejahteraan semua warga Hong Kong akan rusak," kata Luo. "Ada kebutuhan akan upaya pemeliharaan sistem hukum keamanan nasional dan pemberlakuan sistem penegakan hukum sesegera mungkin."

Asosiasi Pengacara Hong Kong, Selasa (13/4), meminta Beijing untuk menahan diri dalam komentarnya tentang urusan Hong Kong. Diperingatkan, pandangan Beijing dapat dianggap sebagai gangguan.

Dilaporkan, peralihan independen yang menjadi landasan kebebasan secara luas di Hong Kong juga mendapat tekanan dari pimpinan Partai Komunis China. Tiga hakim paling senior Hong Kong mengatakan, peralihan independen, landasan kebebasan luas sedang berjuang untuk bertahan hidup.

Wewenang pengadilan

Pers yang dikontrol negara di China telah memperingatkan para hakim Hong Kong untuk tidak membebaskan pengunjuk rasa yang ditangkang selama demonstrasi tahun lalu. Para hakim dan pengacara mengatakan, ada tanda-tanda Beijing berusaha membatasi wewenang pengadilan di Hong Kong untuk memutuskan masalah-masalah inti secara konstitusional.

Beberapa badan hukum di Hong Kong saat ini bersiap-siap atas kemungkinan campur tangan China dalam penunjukan hakim baru. Kekhawatiran muncul karena ada beberapa anggota parlemen pro-Beijing di Hong Kong yang keberatan atas dua penunjukan hakim baru-baru ini di pengadilan tinggi Hong Kong.

Setiap intervensi China dalam proses seleksi kemungkinan akan memicu pengunduran diri hakim-hakim. "Kami khawatir mereka kehilangan kesabaran dan akan bersikap," kata seorang hakim merujuk pada intervensi Beijing. "Ini kami tahu dari interaksi dengan hakim senior China. Mereka sama sekali tidak mendapatkan dukungan di Hong Kong."

Juru Bicara Pemimpin Eksekutif Hong Kong Carrie Lam mengatakan, pemerintah di Beijing berkali-kali menegaskan sikap akan terus sepenuhnya menerapkan prinsip "satu negara, dua sistem" dalam hubungan China-Hong Kong. Ditegaskan, Beijing hanya berkomitmen pada hukum dasar sebagai dasar konstitusi bagi Hong Kong untuk melindungi hak-hak dan kebebasan di daerah administratif khusus China itu. (AFP/REUTERS/BEN)

Kami khawatir mereka kehilangan kesabaran dan akan bersikap.

T A J U K R E N C A N A

Birokrasi Tangkas Atasi Covid

Ketika birokrasi di negeri ini baru mulai berbenah menghadapi disrupsi revolusi digital, kini, kita dihadapkan pada tantangan yang mahadahsyat, pandemi Covid-19.

Tantangan yang sama sekali tak terbayangkan. Pandemi ini memrakporandakan tatanan kehidupan dunia sangat cepat dan masif sehingga, tidak heran, banyak negara kelabakan menghadapinya, termasuk negara-negara adidaya.

Indonesia tidak terkecuali. Terbukti, setelah hampir sebulan diberlakukan bekerja dari rumah, pelayanan publik yang seharusnya lebih optimal membantu masyarakat menghadapi pandemi justru malah terganggu.

Seperti diulas di harian *Kompas*, Senin 13 April 2020, berdasarkan laporan yang masuk ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada 17 Maret hingga 9 April 2020, banyak warga yang mengeluhkan terganggunya pelayanan publik. Keluhan paling banyak adalah tidak terlayannya pelayanan administrasi kependudukan, kelistrikan, perpajakan, perizinan, keimigrasian, serta terkait minyak dan gas. Alih-alih melancarkan penanggulangan Covid-19, berbagai gangguan ini menunjukkan kebalikannya.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), dengan mendorong warga bekerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah. Untuk membantu perekonomian rakyat kecil akibat kebijakan PSBB, pemerintah meluncurkan bantuan sosial. Hambatan administrasi kependudukan malah kian menyulitkan warga untuk mendapatkan akses, termasuk layanan kesehatan.

Dalam rangka memutus mata rantai penularan Covid-19, pelayanan publik saat ini dilakukan dengan penuh keterbatasan. Ada yang sepenuhnya dilakukan melalui sistem daring; ada yang dilakukan seperti biasanya, tetapi dengan prosedur ketat jaga jarak; ada juga yang mengombinasikannya. Namun, itu semua agar bisa berjalan optimal membutuhkan sejumlah prasyarat dan persiapan.

Penyiapan infrastruktur teknologi, struktur kerja yang baru yang tangkas, *agile* (tangkas), serta yang terpenting perubahan kultur yang memperhatikan kebutuhan konsumen menjadi keharusan.

Global Connectivity Index 2019, yang mengukur indikator transformasi digital sejumlah negara, misalnya, masih menempatkan Indonesia di urutan ke-62 dari 76 negara. Urutan teratas adalah Amerika Serikat, Singapura (4), Jepang (6), Korea Selatan (13), China (26), dan Malaysia (30).

Sejumlah daerah boleh jadi sudah lebih siap. Sebut saja DKI Jakarta, Kota Surabaya, atau Kabupaten Banyuwangi yang gencar melakukan transformasi. Namun, masih banyak daerah di negeri ini yang masih jauh dari siap.

Kini, segenap jajaran birokrasi, dari atas hingga bawah, tidak bisa lagi menungku. Teladan dan pengawasan kerja yang terukur dari semua kepala daerah maupun pimpinan instansi dan lembaga perlu dilakukan untuk memastikan pelayanan publik berjalan optimal di tengah pandemi. Saatnya, aparatur sipil negara berada di garis depan, membuktikan komitmen mereka pada pelayanan publik.

ASEAN dan Pandemi

Dunia sedang menghadapi krisis sangat serius akibat pandemi Covid-19. Untuk mengatasinya secara tuntas, mutlak diperlukan kerja sama erat antarnegara.

Pandemi Covid-19, di satu sisi, menunjukkan ketergantungan besar di antara negara-negara. Saat karyawan pabrik di China mulai bekerja karena penularan Covid-19 di negara itu telah berakhir, China kesulitan mengeksport.

Pemintaan dari negara tujuan ekspor anjlok tajam. Kalau pun ada permintaan, pekerja logistik di negara tujuan sangat minim akibat penerapan pembatasan sosial ketat atau karantina. Artinya, tak ada negara yang bisa menjadi sejahtera sendirian. Untuk makmur berkelanjutan, semua negara harus menjalin hubungan dan bekerja sama erat.

Di sisi lain, pandemi Covid-19 memperlihatkan bahwa tujuan utama sebuah negara ialah menyejahterakan rakyatnya, bukan rakyat negara lain. Prioritas harus diberikan sebuah negara untuk memastikan rakyatnya selamat. Hal ini terbukti ketika sejumlah negara melarang perusahaan mereka mengeksport produk yang sangat dibutuhkan di tengah pandemi, seperti masker, bahan baku obat, dan ventilator. Bahkan, ada laporan, pemerintah sebuah negara mencegah kiriman alat kesehatan dari negara itu untuk dikembalikan.

Di tengah "kontradiksi" itulah, penting bagi organisasi kerja sama antarnegara, seperti ASEAN, untuk mempertegas kembali arti penting kolaborasi di antara anggotanya. Saat banyak pemerintahan sibuk memerangi Covid-19 di dalam negeri, ASEAN dan organisasi serupa lainnya harus memberikan sumbangan konkret. Sumbangan ini setidaknya berupa kerangka kerja sama operasional efektif yang dapat membantu para anggotanya di tengah pandemi.

Seperti diberitakan harian ini, Rabu (15/4/2020), kesepakatan telah dicapai di antara pemimpin anggota ASEAN untuk tetap menjaga jalur perdagangan antarnegara. Hal ini sangat positif.

Dalam konteks sekarang, jalur perdagangan yang menjadi perhatian para pemimpin dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Khusus ASEAN secara daring ini berkaitan dengan suplai bahan pangan dan perlengkapan medis. Isu suplai pangan memang menjadi fokus banyak kalangan di tengah pandemi.

Sejumlah laporan menyebutkan, cadangan pangan global mencukupi, tetapi terancam tak terdistribusi dengan baik karena kondisi pekerja logistik yang serba terbatas di banyak negara. Bahan pangan pun tak bisa dikirim ke wilayah yang membutuhkan.

Komitmen para pemimpin ASEAN untuk terus bekerja sama dan membuka jalur perdagangan perlu diikuti langkah nyata di lapangan. Hanya dengan cara ini, kerja sama di antara negara Asia Tenggara dirasakan konkret oleh masyarakat.

Pandemi Covid-19 tak dapat diatasi sendiri-sendiri. Krisis yang ditimbulkannya hanya dapat diatasi secara tuntas lewat kerja sama antarnegara yang erat.

Anggaran Darurat Covid-19

Yuna Farhan

Country Manager Indonesia, International Budget Partnership

tapkan.

Potret anggaran Covid-19

Dalam konteks Indonesia, setidaknya langkah darurat ini termanifestasi dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Keuangan Negara dan Sistem Keuangan. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), anggaran sebesar Rp 405 triliun atau 2,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) digelontorkan untuk melawan wabah Covid-19. Batasan defisit maksimum 3 persen

dari PDB, yang selama ini menjadi pegangan ketat rezim fiskal fundamentalis, didongkrak hingga 5,07 persen dari PDB tahun ini. Keberanian mengambil pilihan darurat politik fiskal ini perlu diuji dari sisi pemanfaatan dan perubahan postur anggaran itu sendiri.

Pertama, melebarnya defisit anggaran diikuti penambahan utang Rp 654,5 triliun atau hampir dua kali lipat, lebih banyak dipakai untuk menambah jebolnya pendapatan negara, dibandingkan dengan tambahan dana belanja darurat Covid-19, di luar dana cadangan pemulihan ekonomi. Pasalnya, belanja negara hanya bertambah Rp 73,3 triliun, sementara pendapatan berkurang hingga Rp 472 triliun.

Kita dapat memahami berkurangnya pendapatan negara karena perubahan asumsi ekonomi makro, seperti merosotnya harga minyak dan lesunya perekonomian. Namun, menjadi persoalan, berkurangnya pendapatan juga dipicu penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPH) badan yang diatur dalam Perppu Keuangan Negara dan Sistem Keuangan menjadi 22 persen pada 2020, 20 persen pada 2022, dan 17 persen untuk wajib pajak dalam negeri yang tercatat di bursa saham.

Penurunan tarif pajak badan ini sama persis dengan redaksi pasal Rancangan Undang-Undang *Omnibus Law* Perpajakan yang diusulkan pemerintah. Hal ini memberi kesan adanya upaya memanfaatkan situasi krisis untuk mem-

percepat penurunan tarif pajak. Menjadi pertanyaan, seberapa penting penurunan tarif itu di tengah situasi darurat?

Kedua, di luar pembiayaan demi pemulihan ekonomi, sumber utama tambahan anggaran berasal dari realokasi belanja kementerian/lembaga, transfer daerah, dan realokasi cadangan. Ternyata, keseriusan kementerian/lembaga dalam aksi turun tangan terkait keadaan darurat ini belum terlihat nyata.

Dari penelusuran penulis, hanya 15 kementerian/lembaga yang secara serius memotong anggaran di atas 20 persen, sementara mayoritas 45 kementerian/lembaga memotong anggaran kurang dari 10 persen. Padahal, belanja perjalanan dinas, biaya *meeting*, dan penyelenggaraan acara yang melibatkan orang banyak dapat dipastikan tidak dapat dilakukan tahun ini.

Ketiga, dari sisi distribusi anggaran darurat Covid-19, pemanfaatan terbesar justru diperuntukkan bagi dukungan industri dan pemulihan ekonomi yang mencapai 55 persen dari tambahan anggaran. Padahal, efektivitas upaya pemerintah mendalikan persoalan kesehatan akan menentukan besaran biaya yang dipergunakan dalam pemulihan ekonomi. Kebijakan ekonomi yang terpenting saat ini adalah mengurangi risiko tekanan beban sosial ekonomi pada tingkat rumah tangga.

Semakin sedikit upaya terkait penanganan masalah kesehatan, semakin berat upaya pemulihan ekonomi. Harus ada di benak para pembil kebijakan bahwa tambahan dan komposisi anggaran ini sangat dinamis dan memungkinkan terjadinya tambahan atau pengurangan kembali anggaran dalam merespons secara cepat perkembangan Covid-19.

Transparansi dan akuntabilitas anggaran darurat

Terlepas dari pilihan politik fiskal di atas, tambahan anggaran tersebut memainkan peran penting dalam mendukung respons pemerintah menangani masalah kesehatan Covid-19 dan turunannya. Tentu kita mendukung lang-

kah cepat pemerintah dalam melakukan reprioritasi dan realokasi anggaran menanggapi Covid-19.

Kecepatan pencairan anggaran dan fleksibilitas penggunaan anggaran jadi faktor penentu dalam merespons situasi darurat. Namun, perlu diingat, korupsi dan inefisiensi justru akan menjadi lebih buruk di saat krisis ini. Pemerintah harus lebih ketat diawasi dalam pelaksanaan anggaran. Dalam keadaan darurat, kecepatan pencairan anggaran, fleksibilitas dan akuntabilitas harus beringan dan tak dapat dipertukarkan.

Patut digarisbawahi bahwa transparansi anggaran bukanlah barang mewah di saat darurat seperti ini, bahkan jauh lebih penting dari situasi normal. Selain meminimalkan penyimpangan, transparansi fiskal diperlukan untuk melacak desain rencana dan langkah-langkah yang ditempuh, termasuk melihat kemajuannya dan apa yang dipertukarkan. Mengidentifikasi keberlanjutan dan risiko fiskal, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran, juga merupakan pengejawantahan dari transparansi fiskal di saat krisis.

Pemerintah juga perlu membuat mata anggaran baru (*budget line*) atau terpisah, dengan Kementerian Keuangan mengambil peran terdepan dalam akuntabilitas keuangan meskipun eksekusi anggaran dilakukan banyak sektor (Barroy *et al*, 2020). Berdasarkan Perpres Perubahan Postur APBN 2020, tambahan belanja pemerintah pusat untuk penanganan Covid-19 dipusatkan pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) atau yang dikenal dengan BA 999. Perlu digarisbawahi, anggaran penanganan Covid-19 juga dilakukan kementerian/lembaga lain, pemerintah daerah, bahkan pemerintah desa.

Demi kontrol yang efektif, penelusuran penggunaan anggaran dan konsolidasi pelaporan keuangan, adanya kode rekening khusus tidak dapat ditawar. Dengan *budget line* terpisah, proses pengambilan keputusan pemerintah berdasarkan kemajuan pelaksanaan anggaran akan dapat dipertanggungjawabkan dan dinilai efektivitasnya. Tidak ada yang dapat memprediksi kapan situasi darurat Covid-19 ini akan berakhir. Jelas keterbukaan dan akuntabilitas anggaran saja tidak akan mampu mengatasi kondisi ini. Namun, dua komponen ini perekat dalam mengaitalisasi dukungan warga untuk turun tangan dalam upaya pemerintah menghadapi musuh bersama, yakni pandemi korona.



Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

Rumadi Ahmad

Tenaga Ahli Utama Kedeputan V Kantor Staf Presiden

Musuh utama penanganan wabah corona adalah birokrasi dan formalitas.

Presiden China Xi Jinping
(15/2/2020)

Tanggal 31 Maret 2020 merupakan hari yang sangat penting bagi bangsa Indonesia dalam perang melawan Covid-19.

Dalam satu hari, Presiden Joko Widodo menandatangani dan mengumumkan tiga kebijakan penting. Pertama, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Kedua, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Tiga hari setelah PP ini keluar, Menteri Kesehatan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Virus Covid-19.

Ketiga, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Terbitnya tiga regulasi dalam waktu yang sama tidak hanya menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani Covid-19, tetapi juga menunjukkan pemerintah tidak punya pilihan lain kecuali harus mengorbankan semua imajinasi tentang pertumbuhan ekonomi, investasi, dan sebagainya.

Pilihannya sekarang hanya satu: perang melawan Covid-19, berapa pun harga yang harus dibayar. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Karena itu, tak perlu lagi ada komentar dan opini bahwa pemerintah tidak serius dan tidak punya skenario dan sebagainya.

Tiga regulasi ini menunjukkan pemerintah berpikir kom-

prehensif, tak hanya memikirkan sektor dan kelompok tertentu. Dengan penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM), pemerintah menyiapkan dua penyangga kebijakan: penanganan aspek kesehatan melalui PSBB dan penanganan dampak sosial ekonomi melalui perppu terkait kebijakan keuangan negara di mana pemerintah menyiapkan Rp 405,1 triliun dengan melakukan penekanan ulang dan realokasi anggaran. Jika ini tak cukup, langkah-langkah berikutnya sudah dipikirkan pemerintah.

Penetapan status KKM merupakan pintu masuk yang sangat penting karena dengan status itulah berbagai kebijakan darurat bisa dilakukan. Status darurat pasti akan diikuti dengan langkah-langkah luar biasa, bahkan langkah-langkah yang sebelum ada status ini tak diperbolehkan.

Dalam tradisi Islam dikenal adagium *ad-daruratun tubihul mahdzurat* (kondisi darurat menjadi alasan diperbolehkannya hal-hal yang dilarang). Itulah sebabnya, beberapa hari sebelum penetapan ini, banyak kalangan mendesak pemerintah melakukan penetapan status KKM, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

PSBB, apa bedanya?

Pertanyaan yang sering dikemukakan sejumlah kalangan adalah apa bedanya status PSBB dengan kebijakan yang sudah diambil pemerintah sebelumnya? Pertanyaan ini begitu penting dijelaskan karena sebelumnya pemerintah, baik pusat maupun daerah, sudah mengambil kebijakan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2018, seperti peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan umum.

Atas pertanyaan tersebut, ada beberapa penjelasan yang bisa dikemukakan. Pertama, PSBB merupakan pilihan kebijakan yang diambil pemerintah meskipun ada pilihan kebijakan lain, yaitu melakukan karantina, baik karantina rumah sakit,

rumah, maupun karantina wilayah. PSBB merupakan kebijakan pembatasan terbesar yang disediakan UU Nomor 6 Tahun 2018. Dengan PSBB, meski tidak disebut karantina, pemerintah daerah bisa melakukan langkah tambahan, termasuk melakukan pembatasan pergerakan orang dalam skala terbatas, tidak selalu dalam skala kabupaten/kota atau provinsi.

Pasal 13 Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 menyebutkan, di samping melakukan peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, serta pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, PSBB juga membuka peluang melakukan pembatasan kegiatan sosial dan budaya, pembatasan moda transportasi, serta pembatasan kegiatan lainnya, khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.

Kedua, dari sisi status hukum. Jika kebijakan sebelumnya merupakan kebijakan harian biasa karena melihat situasi, setelah ada PP PSBB dan permenkes turunannya, status kebijakan dilegitimasi secara legal sebagai langkah kedaruratan. Tentu hal ini harus dilakukan pemerintah daerah dengan mengikuti prosedur yang diatur dalam PP untuk memastikan semua langkah kedaruratan yang dilakukan pemerintah terkoordinasi oleh pemerintah pusat.

Hal ini sangat penting karena jika pemerintah daerah dibiarakan melakukan tindakan sendiri-sendiri, akan sangat membahayakan keamanan nasional yang justru kontraproduktif dengan upaya penanganan Covid-19. Kita masih ingat, ketika Gubernur DKI Anies Baswedan mengambil langkah sendiri dengan membatasi transportasi publik di Jakarta, yang terjadi justru kekacauan.

Pemerintah Indonesia belajar dari langkah-langkah yang diambil beberapa negara. Langkah India misalnya, menciptakan kekacauan saat mengambil langkah *lockdown*.

Ketiga, PSBB bukan hanya imbauan seperti selama ini sudah dilakukan. Di samping ada penguatan regulasi, PSBB juga

mengharuskan penguatan penegakannya, termasuk melakukan tindakan hukum, baik bagi individu maupun korporasi yang melanggar.

Hal ini dimungkinkan karena PSBB merupakan salah satu jenis pembatasan dan kekarantinaan (bedakan dengan karantina) yang diperbolehkan UU. Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 menyebutkan, setiap orang yang tidak mematuhi atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan diancam pidana paling lama satu tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000. Bahkan, jika ada orang yang melakukan korupsi dana yang digunakan untuk penanganan Covid-19, hal itu bisa dijadikan pemberat hukuman.

Keempat, pemerintah daerah yang melakukan PSBB tentunya juga diberi kewenangan untuk melakukan karantina di zona tertentu jika dipandang perlu. Di samping karantina dan PSBB memiliki kesamaan dalam hal pembatasan pergerakan masyarakat, PSBB seharusnya merupakan langkah terbesar yang diberikan peraturan perundang-undangan sehingga bisa mengatasi jenis-jenis pembatasan yang lain.

Saya tahu, hal ini agak sulit dilakukan karena karantina belum diatur melalui PP meskipun Pasal 60 UU Nomor 6 Tahun 2018 mengamanatkan agar persoalan karantina rumah, karantina rumah sakit, dan karantina wilayah diatur melalui PP. Lain cerita jika PP tidak hanya mengatur soal PSBB, tetapi juga karantina sehingga penanganannya bisa terintegrasi karena—sebagaimana PSBB—karantina wilayah membutuhkan izin dari pemerintah pusat cq Menkes (Pasal 49).

Banyak faktor

Terlepas dari itu, pemerintah sudah mengambil pilihan melakukan PSBB. Berhasil tidaknya PSBB ditentukan banyak faktor. Faktor paling penting adalah birokrasi. Sebagaimana Presiden China Xi Jinping dalam pidatonya menegaskan bahwa musuh utama perang melawan

Covid-19 adalah birokrasi dan formalitas. Bukan berarti birokrasi dan formalitas tak perlu, tetapi jangan sampai menghambat gerak untuk melawan Covid-19. Karena itu Presiden Jokowi senantiasa mengingatkan untuk menyederhanakan birokrasi.

Hal lain yang tak kalah penting adalah faktor kedisiplinan masyarakat. Masih ada sebagian masyarakat yang menyepelekan Covid-19. Ada juga sebagian yang harus keluar rumah karena berbagai alasan, terutama alasan ekonomi. Alasan-alasan tersebut seharusnya tidak ada lagi ketika pemerintah sudah menggelontorkan berbagai kebijakan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak.

Kita semua harus berkorban untuk melawan Covid-19. Hal yang harus dipastikan adalah kebijakan-kebijakan relaksasi ekonomi dan jaring pengaman sosial harus benar-benar sampai dan dinikmati masyarakat miskin dan rentan miskin. Alasan inilah yang bisa dijadikan landasan untuk melakukan penegakan hukum dan tindakan bagi siapa pun yang melanggar PSBB.

POJOK

Kesejahteraan petani kian tertekan.
Mereka tak bisa cocok tanam dari rumah, kan.

♦

Pemerintah dan DPR berkukuh bahas RUU.
Gedung parlemen memang tak berkuping.

♦

Kepala desa tidak setuju warganya mudik.
Cukup kabar dan THR-nya yang sampai desa.

mang uil

"Physical Distancing", Tantangan Baru Ritual Keagamaan Kolektif

Sangkot Sirait

Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk mengurangi risiko penyebaran wabah virus korona (Covid-19), satu dari anjuran pemerintah adalah melaksanakan ibadah di rumah.

Dalam beberapa hari kemudian muncul pro-kontra atas anjuran tersebut, terutama menjelang pelaksanaan ritual keagamaan yang biasanya dilaksanakan secara kolektif atau berjemaah, sudah tiba. Jumat, misalnya, adalah hari spesial bagi umat Islam karena pada hari tersebut dilakukan shalat berjemaah, yang disebut shalat Jumat.

Tidak hanya itu, di kalangan Muslim juga dianjurkan agar setiap shalat wajib lima waktu sehari semalam lebih baik dilaksanakan secara berjemaah, terutama di masjid atau langgar terdekat dari rumahnya. Ibadah kolektif lain, seperti haji dan umrah, mengalami nasib serupa.

Hari Minggu merupakan hari yang sangat spesial bagi umat Nasrani. Mereka berkumpul dan beribadah di gereja, di samping mendengarkan siraman-siraman rohani secara bersama. Demikian halnya di wihara, pura, kelenteng, dan masih banyak tempat yang dipandang suci oleh pemeluk agama tertentu yang lain.

Tradisi ritual keagamaan kolektif yang sudah berjalan berabad-abad seperti itu, pada era musibah Covid-19 seperti sekarang, mengalami perubahan bentuk yang signifikan dan mengagetkan. Perintah agama untuk melaksanakan ibadah secara kolektif atau berjemaah, terutama di ruang publik, untuk sementara waktu dikurangi atau dibekukan sama sekali dalam masa yang belum pasti.

Sekarang tempat-tempat ibadah sangat sepi, ritual-ritual ataupun tradisi keagamaan yang menjadi pelipur lara masyarakat, khususnya Nusantara, sudah tidak terlihat dan terdengar lagi. Hari-hari umat yang penuh keceriaan serta silaturahmi atas berkah ibadah-ibadah kolektif, di masjid, gereja, dan tempat suci lainnya, sudah jarang terlihat. Emile Durkheim dalam karyanya *The Elementary For-*

ms of Religious Life menulis, ide masyarakat merupakan ruh dari agama. Dalam buku *Seven Theories of Religion* karya Daniel L. Pals, disampaikan inti pemikiran Durkheim berupa *Society as Sacred*.

Dengan melihat betapa pentingnya fungsi dan peran komunitas dalam konteks kehidupan masyarakat, yang di dalamnya ada tradisi dan keberagaman, komunitas menempati posisi penting dan suci. Tidak mungkin dilakukan ritual keagamaan di komunitas atau jemaah yang tidak suci. Semua aspek kehidupan manusia, seperti hukum, moralitas, keluarga, ilmu, seni, dan agama, didasarkan pada dimensi sosial masing-masing.

Tanpa sebuah masyarakat yang memberikan dukungan atas semua itu, tidak satu pun dari aspek tersebut bisa eksis. Banyak sekali ibadah yang pada dasarnya merupakan kewajiban individu, bahkan sah apabila dilaksanakan dengan seorang diri, tetapi tidak dirasakan sempurna jika ia tidak dihubungkan dan dikerjakan bersama-sama dengan orang-orang di sekitarnya. Di sinilah terlihat fungsi sosial dan komunal agama sebagai inti agama itu sendiri, agama hakikatnya bersifat kolektif.

Kesadaran baru

Dalam konteks sosiologi, agama dan masyarakat ibarat dua sisi mata uang, yang satu tidak bermakna tanpa sisi yang lain. Ritual-ritual keagamaan yang semestinya merupakan urusan individual dengan Tuhan mengalami hal serupa. Seseorang yang berangkat dari rumah ke tempat ibadah, masjid misalnya, mungkin tidak sekadar atas nama Tuhan dan ibadah, tetapi juga tersirat perasaan kebutuhan lain di dalamnya.

Misalnya dengan melaksanakan ibadah berjemaah, seseorang bisa bertemu kawan-kawan satu wilayah, tokoh masyarakat, orang yang dihormati, dan masih banyak aspek lain yang dirasakan. Perasaan-perasaan keagamaan yang sangat dalam akan muncul dan lebih khidmat manakala di-

laksanakan secara berjemaah. Jadi, sistem peribadatan yang terdiri atas jemaah beserta perasaan-perasaan mereka serta dilakukan dalam waktu bersamaan merupakan inti kehidupan jemaah secara keseluruhan.

Tujuan utama sistem peribadatan, seperti untuk memenuhi kewajiban, tidak sepopuler jika peribadatan itu dilaksanakan bersama-sama. Dalam Islam, misalnya, shalat dan mohon ampun kepada Tuhan kapan pun waktunya bisa dilakukan secara individual. Namun, melakukan shalat tersebut secara berjemaah, terutama di masjid, merupakan kesempatan yang sangat berharga.

Masih banyak lagi jenis ritual keagamaan kolektif yang mengalami hal serupa, dan ini bisa berlaku dalam tradisi keagamaan apa pun. Dengan demikian, tujuan ritual-ritual keagamaan tersebut adalah memberikan kesadaran betapa pentingnya jemaah, dan sebagai bukti identitas diri bahwa mereka bagian dari jemaah. Adanya tempat ibadah yang hingga sekarang dipenuhi jemaah kendati penuh risiko barangkali bisa dijelaskan lewat perspektif ini.

Di masa belakangan ini, nilai agama sebagai perekat kehidupan jemaah mengalami problematika. Ada ikatan sosial secara umum, terutama semua anggota masyarakat sekarang merasa satu nasib, yakni sama-sama terisolasi di rumah. Dalam kondisi yang kurang kondusif seperti hari-hari ini, prinsip-prinsip askeetik yang bernuansa mistik, seperti yang didengungkan para mistikus agama, mungkin bisa saja dilakukan, misalnya prinsip "kesendirianku justru menjadikanku lebih dekat dan rindu kepada Tuhan".

Bagi masyarakat Nusantara yang sistem keberagamaannya cenderung lebih bersifat formal, sikap seperti ini mungkin tak mudah diwujudkan, tapi harus dilakukan. *Physical distancing* menjadi tantangan baru ritual keagamaan kolektif kita di tengah pandemi Covid-19 yang bersama-sama harus bisa kita perangi.

Pidana Langgar "Social Distancing"

Nefa Claudia Meliala

Pengajar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung

Minggu, 15 Maret 2020, Presiden Jokowi mengimbau masyarakat melakukan "social distancing", yaitu menghindari keramaian dan menjaga jarak, termasuk mengupayakan agar tak bersentuhan dan berdekatan dengan orang lain untuk meminimalkan penyebaran Covid-19.

Social distancing juga dilakukan dengan cara bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Kamis, 19 Maret 2020, Kapolri mengeluarkan Maklumat No Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Korona (Covid-19) mengikuti instruksi Presiden untuk menerapkan *social distancing*.

Pertanyaannya adalah, apakah melanggar *social distancing* dapat dipidana?

UU Wabah

Penyakit Menular

Salah satu regulasi yang relevan di tengah pandemi Covid-19 ini adalah Undang-Undang (UU) Wabah Penyakit Menular. Menteri Kesehatan telah mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/104/2020, tentang Penetapan Infeksi Corona Virus sebagai Penyakit Dapat Menimbulkan Wabah dan Penanggulangannya.

UU Wabah Penyakit Menular sendiri tidak mengenal terminologi *social distancing*. Istilah yang digunakan dalam undang-undang ini adalah "upaya penanggulangan wabah".

Ini bertujuan memperkecil angka kematian akibat wabah dengan pengobatan dan pembatasan penularan serta penyebaran penyakit agar penderita tidak bertambah banyak. Agar wabah tidak meluas, salah satu cara adalah melalui isolasi atau karantina.

Pasal 14 Ayat (1) undang-undang ini kemudian mengancam mereka yang dengan sengaja atau kealpaan melanggar pelaksanaan penanggulangan wabah dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000.

UU Karantina Kesehatan

Regulasi lain yang juga relevan adalah UU No 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Sama halnya dengan UU Wabah Penyakit Menular, UU Kekarantinaan Kesehatan juga tidak mengenal terminologi *social distancing*. Dalam undang-undang ini, istilah yang digunakan adalah "pembatasan sosial berskala besar" (PSBB).

Pada intinya PSBB ini diartikan sebagai pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit. Tujuannya, mencegah kemungkinan penyebaran penyakit menular yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.

Undang-undang ini menyebutkan, PSBB merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan yang paling sedikit, meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan mengancam setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan/atau melanggar-halangi penyelenggaraan



kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan "Kedaruratan Kesehatan Masyarakat" dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.

Undang-undang itu menyatakan bahwa PSBB ini harus ditetapkan Menteri Kesehatan. Dan ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria serta pelaksanaan PSBB diatur dalam peraturan pemerintah.

Selasa, 31 Maret 2020, Presiden telah menetapkan situasi kedaruratan kesehatan masyarakat yang menjadi syarat dilakukannya PSBB. Dengan demikian, *social distancing* dan PSBB merupakan dua hal yang berbeda.

Maklumat Kapolri

Regulasi terbaru yang dikeluarkan adalah Maklumat Kapolri No Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Korona (Covid-19). Dalam kaitannya dengan *social distancing*, Maklumat Kapolri ini melarang masyarakat mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri.

Maklumat Kapolri ini memang tak memuat sanksi pidana karena sanksi pidana sendiri hanya dapat diatur dalam UU atau peraturan daerah.

Wacana yang kemudian

muncul adalah diterapkannya Pasal 212, 216, dan 218 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), terutama dalam kaitannya dengan larangan berkumpul.

Ketiga pasal ini pada intinya mengatur larangan seseorang untuk melawan, tidak menurut atau berupaya menghalangi tindakan pejabat yang menjalankan tugas yang sah dengan ancaman pidana paling lama 1 tahun 4 bulan penjara atau pidana denda paling banyak Rp 4.500. Namun, lagi-lagi ketentuan pasal-pasal tersebut juga tidak secara tegas mengatur *social distancing*.

Dengan mengacu pada asas legalitas (tiada pidana tanpa aturan) sebagai salah satu asas fundamental dalam hukum pidana, muncul pendapat yang mendesak Presiden agar mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang mengatur ketentuan tentang *social distancing* berikut sanksi pidananya mengingat amandemen undang-undang akan menempuh prosedur yang panjang.

Namun, penulis berpendapat penjatihan pidana penjara bukanlah solusi. Ini mengingat lembaga pemasyarakatan (lapas) menjadi tempat rentan penyebaran virus, terutama kaitannya dengan persoalan overkapasitas.

Jangan sampai opsi pemberlakuan hukum pidana justru menjadi sesuatu yang kontra-produktif dan bertentangan dengan semangat *social distancing* itu sendiri.

Dalam penanganan penyebaran Covid-19 ini, hal yang harus menjadi fokus utama adalah pentingnya upaya pencegahan dengan memberikan informasi yang komprehensif dan berbasis bukti untuk mengedukasi dan membangun kesadaran masyarakat, bukan dengan ketakutan ancaman pidana.

SURAT KEPADA REDAKSI

Anda dipersilakan mengirimkan surat, pembaca atau komentar mengenai kebijakan/layanan publik, konten artikel di halaman opini, ataupun pemberitaan di Kompas. Surat pembaca atau komentar dikirim ke opini@kompas.id atau ke Redaksi Kompas Jalan Palmerah Selatan Nomor 26-28, Jakarta 10270, dengan menuliskan nama lengkap, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi, disertai dengan fotokopi atau scan identitas diri.

Koreksi ICJ

Tulisan Prof Ichlasul Amal, "Aung San Suu Kyi dan Mahkamah Internasional" di *Kompas* (24/3/2020), perlu dikoreksi karena mengandung banyak kekeliruan, yang dapat membuat pemahaman keliru.

Tertulis, "Jaksa penuntut umum membawa bukti-bukti gambar..." International Court of Justice (ICJ) bukanlah mahkamah pidana internasional yang memiliki jaksa penuntut umum (*prosecutor*). ICJ adalah mahkamah yang mengadili gugatan antarnegara (Pasal 34 (1) Statuta ICJ) atas apa saja perselisihan yang timbul di antara negara, terutama yang dimungkinkan (*provided for*) oleh Piagam PBB, konvensi, dan traktat yang berlaku saat itu (Pasal 36 (1) ICJ Statuta).

Para pihak yang bersengketa harus secepat sengketa mereka dibawa ke ICJ. Gambia menggugat Myanmar karena mereka telah meratifikasi Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida 1948. Lebih jauh, keduanya tidak menolak (tidak mereservasi) Pasal 9 Konvensi tentang perselisihan para peratifikasi untuk diselesaikan di ICJ. Jadi, Gambia yang ajukan bukti-bukti, bukan jaksa.

Tertulis, "Hakim ICJ yang terdiri dari 15 orang..." Hakim yang mengadili kasus ini bukan 15, melainkan 17 orang.

Memang, hakim tetap ICJ berjumlah 15 (Pasal 3 Statuta ICJ), tetapi jika negara yang bersengketa tak memiliki hakim saat sengketa diperiksa, para pihak dapat memasukkan hakim *ad hoc* untuk ikut mengadili kasus itu (Pasal 31 Statuta ICJ).

Gambia memasukkan Navi Pillay, tokoh hukum internasional dari Afrika Selatan dan Myanmar, menunjuk Klaus

Gunakan Bahasa Indonesia

Merebaknya virus korona membuat warga cemas dan takut. Hampir setiap hari, berbagai media—sosal, cetak, dan elektronik—menyajikan beragam berita seputar virus yang sudah menelan banyak korban ini.

Namun, ada hal yang mengganjal: berbagai informasi yang berkembang banyak menggunakan istilah asing. Masyarakat tambah bingung menghadapi aneka istilah asing terkait korona. Sebut saja, *suspect*, *lockdown*, *social distancing*, *work or study from home*, *stay at home*, yang tiba-tiba viral hari-hari ini di tengah masyarakat.

Bukan tidak mungkin, rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap berbagai imbauan seputar virus korona gara-gara minimnya tingkat pemahaman warga terhadap pelbagai istilah yang digunakan.

Mohon kepada pihak terkait agar menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti masyarakat hingga ke akar rumput. Semoga mempercepat atasi korona.

MAKSIMUS MASAN KIAN

RT 017 RW 004, Kelurahan Sarotari Tengah, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, NTT

Kress, ahli hukum internasional dari Jerman.

Dikatakan, "ICJ adalah badan hukum tertinggi PBB dan telah diratifikasi semua anggota PBB, kecuali Amerika Serikat. Pihak AS melepaskan diri dari ICJ setelah keterlibatan AS di Nikaragua."

Semua negara yang menyepakati Piagam PBB menjadi anggota PBB sekaligus menjadi peserta dari Statuta ICJ, bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam PBB. AS adalah anggota PBB. Jadi, sampai hari ini masih peserta ICJ.

Menurut Prof Amal, perkara masuk ICJ jika pengusul negara anggota PBB lewat Majelis Umum (General Assembly) dan diterima apabila tak ada keberatan Dewan Keamanan (Security Council). Padahal, negara dapat meng-

ajukan gugatan kepada negara lain asalkan negara yang digugat secepat digugat. Tak perlu proses di Majelis Umum dan Dewan Keamanan.

Putusan akhir ICJ tidak dapat diveto. Anggota tetap hanya dapat memveto keputusan Dewan Keamanan. Penjelasan ICJ dan Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) adalah dua mahkamah tinggi PBB juga tak tepat. Mahkamah PBB hanya ICJ.

Bekas Presiden Sudan, Omar Al Bashir, tak diajukan negaranya ke ICC. Omar Al Bashir menjadi tersangka di ICC karena hasil penyidikan jaksa ICC yang diminta Dewan Keamanan PBB (Pasal 13b Statuta ICC).

IRFAN R HUTAGALUNG Dosen Hukum Internasional di FISIP UIN Jakarta

acara hari ini
Kamis, 16 April 2020

<p>KOMPAS TV</p> <p>04.30 Kompas Pagi 07.00 Sapa Indonesia Pagi 09.00 Kompas Bisnis 09.30 Bincang Kita 10.00 Pop News 11.00 Kompas Siang 12.00 Sapa Indonesia Siang 14.00 Zona Inspirasi 14.30 Bingkai Inspirasi 15.00 Update Korona 16.00 Kompas Petang 18.00 Berita Utama 19.00 Sapa Indonesia Malam 20.00 Rosi 21.00 Kompas Malam 22.00 Kata Netizen 23.00 Kompas Sport Malam 23.30 Kompas Dunia 00.30 Kilas Kompas 01.00 MNC Shop 01.30 Berita Utama</p>	<p>TVRI</p> <p>06.00 Semangat Pagi Indonesia 07.00 Info Covid-19 Terkini 08.00 Belajar dari Rumah 11.03 Buah Hatiku Sayang 12.00 Indonesia Siang 13.00 Rumah Bulu Tangkis 13.30 Kain Nusantara 14.03 The Train 14.30 Badanamu Cadets 15.00 Pesona Indonesia: NTT 15.30 Inspirasi Indonesia: NTT 16.00 Info Covid-19 Terkini 17.00 Buddha 17.30 English News Service 18.00 Indonesia Hari Ini 19.00 Indonesia Bicara 20.00 Discovery 21.00 Dunia Dalam Berita 21.30 Film Nasional: Trinity Nekad Traveler 23.30 Replay Olahraga 00.00 Taffakur</p>	<p>artv</p> <p>05.30 Rainbow Ruby 07.00 Super Wings 08.30 Mini Force 09.30 Doctors 10.30 CSI: Catatan Seputar Investigasi 11.00 Lensa Indonesia Siang 11.30 Chibi Maruko Chan 13.00 Detektif Peet 14.00 Lensa Indonesia Sore 14.30 Sinema Keluarga 15.30 Tayo Siang Along 16.00 Bioskop Keluarga 18.00 Monkart 19.30 Lupinranger Vs Patranger 21.00 Dragon Force 22.00 Power Ranger Ninja Steel 23.30 Mega Aksi: Huang Fei Hung 23.30 Rahasia Ilahi 00.30 Mega Indonesia 01.00 Cermin Hati 01.30 Lensa Indonesia Malam 02.00 MNC Shop</p>	<p>TRANS 7</p> <p>05.30 Treasure Trekkers 06.00 Redaksi Pagi 07.00 Ragam Indonesia 07.30 Selebrita Pagi 08.00 Movieganza: I Love You Mas Bro 09.30 Spillote Weekdays 10.00 CNN Indonesia Happening Now 10.30 Selebrita Siang 11.30 Redaksi CNN Indonesia Siang 12.00 Si Unyil 12.30 Bocah Petualang 13.00 Si Olan 13.30 Tau Gak Sih 14.15 Jejak Si Gundul 15.00 Redaksi Sore 16.00 Siyap Bos 17.00 Rumah Uya 18.00 Hitam Putih 19.00 On The Spot 20.00 Opera Van Java 21.30 Movieganza: TBA 23.30 The Police 00.30 Redaksi Malam 01.00 Theater: Misteri Penunggu Pohon Jati AKA Kampung Djati Kramat 02.30 Theater: Jalan Lain ke Pelaminan AKA Jodoh Pilihan Tuhan</p>	<p>METRO TV</p> <p>07.05 Editorial Media Indonesia 08.05 Go Healthy 08.30 Metro Xinwen 09.05 Selamat Pagi Indonesia 10.45 15 Minutes 11.05 Metro Siang 13.05 Newsline 16.05 Metro Hari Ini 17.30 Primetime News 19.05 Prime Talk with Rory 20.05 Top News 22.05 Metro Sport 23.30 Metro Malam 23.30 Primetime News 01.05 Top News</p>
---	--	--	--	--

BERITA SATU TV

06.00 Good Morning Jakarta
08.00 The One Entrepreneur
08.30 IDX Opening Bell
09.30 CEO Talks
10.35 Fakta Data
11.05 News On The Spot
13.05 Special Interview
14.05 Jurnal Ekstra
14.30 Closing Market
15.30 CEO Talks
16.30 Prime Time
18.05 Fakta Data
18.30 Connect 360
19.30 Jurnal Ekstra
20.05 Real Politics
21.05 People & Inspiration
21.30 Jurnal Ekstra
22.05 Fakta Data
22.30 Berita Satu Highlight
23.30 Travel Notes
00.00 CEO Talks
01.00 Creative Money
02.00 Berita Satu Highlight

JAKTV

05.00 Sanyum Quran
05.30 Sista
06.00 Lelel
06.00 MNC Shop
09.00 Lelel
11.00 Trending On
12.30 Kepo Aja
12.30 Gokil Abis
13.00 Drama Korea: Naughty Detective 2
14.00 Local Hour Zamrud Khatulistiwa
15.00 Lelel
17.00 Tawa Sutra
18.00 News Room Today
19.00 Trending On
19.30 Kepo Aja
20.00 MNC Shop
21.00 Seru Bareng Liga Inggris
22.00 News Room Today
23.00 Kabar Misteri
00.00 Dangdut Hour
00.30 Retro Hour
01.00 Rindu Tanah Suci

SCTV

05.00 Liputan 6 Pagi
07.00 Halo Selebriti
08.00 FTV Pagi Spesial
10.00 FTV Pagi
12.00 Liputan 6 Siang
12.30 FTV Siang
14.30 FTV Sore
15.15 SCTV Miniseri: Mermadi in Love 2 Dunia
17.45 Siapa Takut Jatuh Cinta
18.45 Anak Langit
20.15 Samudra Cinta
22.15 FTV Primetime
00.00 FTV Utama
01.30 Liputan 6 Malam
02.00 Sinema Dini Hari

GTV

06.00 [Sinema]
06.30 Lensa Ajaib
07.00 Blaze and The Monster Machine
08.30 Family 100
09.30 Obsesi
10.00 Buletin News Siang
11.00 Big Movies Family: The Spongebob Squarepants Movie
13.00 The Spongebob Movie
15.00 Big Movies Family: Secret Life of Pets
17.00 Big Movies Family: Boruto The Next Generation
18.30 Jagan Kaget
19.30 Bedah Rumah Baru
21.00 Big Movies Platinum: Hitman
22.30 Jangan Bobo Dulu
23.30 Big Movies Platinum: The Monument Men
01.00 MNC Shop
01.30 Lanjutan Big Movies Platinum
02.00 [Sinema]

antv

05.00 Oscar@Cinema Oasis
06.30 Lensa Ajaib
07.00 Grizzly & The Lemmings
09.30 Shiva
12.30 Sheikh Chilly & Friez
13.30 Yeh Teri Galian
14.00 Meri Durga
14.30 Jodoh Bollywood: Dhoom 3
18.00 Muslimah
21.00 Inayah
23.30 Jodoh Wasiat Bapak
00.45 Karma The Series
01.45 Sinema Spesial: Kutukan Nyi Roro Kidul

TERASKITA HOTEL MANAGED BY DAFAM

Tawarkan Promosi Spesial Stay Long at 2nd Home

Bagi yang harus bekerja dan tidak bisa *stay at home* dalam waktu cukup lama karena *physical distancing*, Teraskita Hotel Managed by Dafam menyediakan promosi spesial Stay Long at 2nd Home, hanya dengan harga Rp 8.999.000 *nett* per kamar untuk 30 hari atau Rp 5.999.000 *nett* per kamar untuk 15 hari, sudah termasuk sarapan pagi untuk 1 orang dengan layanan *room delivery*. Ada juga layanan *turn down service* dengan *fruit platter*, akses *wi-fi* dengan kecepatan tinggi, *channel TV* kabel lengkap, *special laundry offers 5 pcs* hanya Rp 60 ribu, dan diskon F&B 30 persen. Untuk reservasi dan informasi, hubungi (021) 2280 7777 atau WA: 0853-6098-0777. [AYA]

Kabar Bisnis

Resensi

SINEMA

Joko Anwar/ Pengabdi Setan

Tak lama setelah kematian ibu, anak-anak merasa bahwa ibu mereka yang sudah meninggal dunia telah kembali ke rumah. Namun, situasi tersebut semakin mencekam ketika mereka mengetahui bahwa kedatangan ibu tersebut tak hanya menjenguk, tetapi juga untuk menjemput mereka.

DDK RAPI FILMS

Nato.hr@gmail.com

INDEKS HARGA SAHAM BURSA EFEK INDONESIA

Pertanian			Pertambangan		
14/4	15/4	Selisih	14/4	15/4	Selisih
1.007,82	1.009,02	▲ 1,20	1.263,41	1.242,19	▼ 21,22

Sumber: Limas

Indikator Perdagangan di Bursa Efek Indonesia

DATA RABU, 15 APRIL 2020									
Kode	Nama Emiten	Seb	Ttg	Trd	Pnt +/-	Vol	PER		
ACES	Ace Hardware Indonesia Tbk	1.325	1.320	1.235	1.235	-90	13.241.500	21,85	
ADRO	Adaro Energy Tbk	1.140	1.150	1.065	1.065	-75	44.442.400	5,62	
ADHM	Adhi Karya (Persero) Tbk	630	640	590	590	-40	42.114.700	4,49	
ASSA	Asti Sana Armeida Tbk	338	330	300	334	-4	6.706.700	9,11	
APLN	Asiang Padomoro Land Tbk	116	117	109	110	-6	13.037.200	26,34	
AKRA	AKR Corporindo Tbk	2.150	2.150	2.000	2.000	-150	12.553.900	11,42	
ANTM	Aneka Tambang Tbk	595	595	520	520	-35	90.030.300	16,7	
AAU	Astra Agro Lestari Tbk	6.600	6.850	6.275	6.800	-200	4.360.200	58,35	
ASBI	Astra International Tbk	4.060	4.090	3.810	3.850	-210	95.980.400	7,18	
BCA	Bank Central Asia Tbk	28.275	28.300	27.400	28.175	-100	21.222.300	26,65	
BNGA	Bank CIMB Niaga Tbk	675	680	630	640	-35	3.462.200	17,04	
BMR	Bank Mandiri (Persero) Tbk	5.125	5.175	4.770	4.770	-355	77.917.400	8,02	
BNN	Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	4.310	4.240	4.010	4.010	-300	61.532.700	4,64	
PNBN	Bank Pan Indonesia Tbk	795	805	740	740	-55	2.361.000	5,54	
BJBR	Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	840	840	785	800	-40	6.771.600	5,17	
BJTM	Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	540	545	505	510	-30	8.260.000	5,5	
BNLI	Bank Permata Tbk	1.155	1.155	1.090	1.110	-45	5.429.800	20,54	
BSBI	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	3.090	3.060	2.820	2.820	-210	292.946.600	10,12	
BSTN	Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.010	1.040	940	940	-70	42.956.400	47,09	
BTPS	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	2.780	2.970	2.600	2.660	-120	56.848.100	15,58	
BSPT	Barta Pacific Tbk	985	1.000	920	925	-60	78.897.900	349,4	
BEST	Bekraf Fajar Industrial Estate Tbk	120	124	115	120	-	31.021.100	1,05	
BOGA	Bintang Oho Global Tbk	1.550	1.550	1.550	1.550	-	1.800	715,69	
PTBA	Bukit Asam Tbk	2.100	2.150	1.955	1.995	-105	19.039.300	5,67	
BDSB	Bumi Serpong Damai Tbk	895	895	800	800	-55	14.656.500	5	
HNN	Bunyang Poetra Sembada Tbk	750	750	700	715	-35	9.465.200	16,75	
TPHA	Chandra Kari Petrochemical Tbk	7.225	7.325	7.125	7.225	50	3.139.100	406,2	
CPN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk	4.880	4.880	4.540	4.540	-340	13.193.800	21,77	
CTRA	Cipta Development Tbk	605	605	565	565	-40	63.504.400	19,22	
ELSA	Elinsa Tbk	220	216	206	206	-14	56.767.300	4,22	
PRAB	Erjaya Seroasembada Tbk	1.210	1.260	1.130	1.130	-80	49.026.400	16,38	
GIAA	Garuda Indonesia (Persero) Tbk	218	228	204	204	-14	20.290.500	2,28	
BMTR	Global Mediacom Tbk	232	234	216	216	-16	24.784.700	2,72	
GGRM	Gudang Garam Tbk	48.100	48.150	44.850	47.000	-1.100	1.082.100	9,36	
HRSP	H.M. Sampurna Tbk	1.705	1.705	1.590	1.665	-100	40.256.100	13,73	
HRUM	Harum Energy Tbk	1.375	1.375	1.335	1.365	-10	790.400	12,17	
INPP	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	5.250	5.275	4.900	5.075	-175	5.460.800	6,17	
INDY	India Energy Tbk	795	760	710	710	-15	6.107.500	-15,22	
ITMG	Indo Tambora Energy Tbk	8.250	8.475	7.700	8.025	-225	3.377.700	5,03	
WTP	Indocement Tangguh Pratapa Tbk	12.400	12.400	11.550	11.550	-850	2.382.700	23,17	
KCPB	Indofood CIP Sukses Malmur Tbk	10.075	10.200	9.575	9.600	-475	7.488.000	21,61	
INDF	Indofood Sukses Malmur Tbk	6.525	6.525	6.125	6.250	-275	12.756.300	11,66	
ISAT	Indosat Tbk	2.060	2.060	1.920	1.920	-140	6.789.400	-27,5	
SDIO	Indosat Jurno & Farmasi Sido Muncul Tbk	1.245	1.255	1.185	1.220	-25	8.910.000	22,46	
WOOD	Integra Indobinet Tbk	302	302	282	294	-8	697.200	7,63	
JFPA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk	980	985	915	915	-65	26.130.200	6,08	
JSMR	Jasa Marga (Persero) Tbk	3.200	3.200	2.980	2.980	-220	9.535.000	10,5	
JPTA	Jaya Real Property Tbk	426	426	396	416	-24	6.510.800	5,71	
KLBF	Kalbe Farma Tbk	1.230	1.230	1.145	1.145	-65	57.568.300	22,77	
KBLI	KBLI Wire & Cable Tbk	434	444	404	404	-30	1.872.800	4,67	
LKPR	Lippo Karawaci Tbk	152	152	142	142	-10	20.363.700	-4,38	
MGRB	Mahkota Group Tbk	640	640	625	640	-15	602.200	70,67	
MAIM	Malindo Feedmill Tbk	510	515	476	476	-34	6.510.800	4,68	
LUPF	Matahari Department Store Tbk	1.415	1.505	1.320	1.320	-95	41.919.900	2,71	
MYOR	Mayora Indah Tbk	1.875	1.895	1.835	1.895	20	1.421.900	26,99	
MEDE	Medco Energi Internasional Tbk	505	520	470	470	-35	43.885.600	16,76	
MNKN	Media Nusantara Citra Tbk	1.040	1.055	1.015	1.010	-45	27.713.100	6,48	
MOKA	Merdeka Copper Gold Tbk	1.240	1.270	1.200	1.265	-35	49.510.800	27,32	
MTDL	Metrodata Electronics Tbk	1.235	1.240	1.180	1.185	-50	232.800	8,43	
MAPR	Mitra Adiperkasa Tbk	605	625	565	565	-40	7.506.600	10,94	
MIRA	Mitra Kelangka Kayesepah Tbk	1.990	2.010	1.905	1.930	-40	450.100	38,78	
PDAM	PNB Kertas Tjati Kinta Tbk	5.300	5.325	4.930	4.930	-370	3.971.800	15,39	
PWON	Pelakon Jati Tbk	404	404	376	380	-24	90.418.900	7,77	
PNLF	Panin Financial Tbk	210	210	196	196	-14	12.387.300	3,04	
PKAS	Penzabanc Gas Negara Tbk	915	915	855	855	-60	125.212.700	21,99	
PTPR	PP (Persero) Tbk	760	760	710	710	-40	55.924.300	4,73	
LSPB	PP London Sumatera Indonesia Tbk	890	910	830	830	-60	15.455.800	22,3	
PPRO	PP Properti Tbk	58	59	54	54	-4	206.126.100	9,72	
DMA5	Paradelta Lestari Tbk	158	170	150	161	3	61.094.200	7,67	
PAIS	Parmayasa Lestari Sentosa Tbk	300	640	590	600	-40	26.991.200	5,13	
TOVR	Sarana Menara Nusantara Tbk	720	715	675	665	-35	82.898.200	16,41	
CLEO	Sarungna Primatirta Tbk	422	426	402	404	-18	6.061.500	38,67	
SSMS	Sawit Sumbermas Sarana Tbk	1.010	1.015	975	975	-35	9.922.900	-50,99,37	
SSSM	Selamat Sempurna Tbk	1.145	1.150	1.110	1.125	-20	2.763.300	27,98	
SMGR	Semen Baturusa (Persero) Tbk	296	290	270	272	-14	4.670.000	20,76	
SMGR	Semen Indonesia Tbk	8.100	8.100	7.550	7.525	-175	6.394.700	27,23	
BKSL	Sentul City Tbk	50	50	50	50	-	17.560.300	76,91	
SLO	Siloran International Hospitals Tbk	5.400	5.725	5.275	5.700	300	95.550	162,09	
SKCB	Solus Bangun Indonesia Tbk	820	820	810	820	-10	8.900	12,39	
SRIL	Sri Rajeki Isman Tbk	170	173	159	161	-9	36.125.500	2,41	
SMRA	Summarecon Agung Tbk	520	520	484	484	-36	26.181.300	16,65	
SCMA	Surja Citra Media Tbk	850	850	795	795	-55	15.778.200	8,74	
ESSA	Surja Esa Perdana Tbk	159	160	130	150	-9	515.100	25	
SPID	Surja Pertiwi Tbk	605	605	565	570	-35	4.600	7,49	
SSIA	Surja Semester Internusa Tbk	372	376	348	348	-24	8.307.100	-151,27	
TUIM	Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	3.220	3.220	3.050	3.110	-110	124.513.900	14,04	
TING	Timah Tbk	525	530	490	490	-45	19.483.300	-15,31	
TELE	Telkom Mobile Indonesia Tbk	153	153	141	141	-10	62.645.800	2,02	
TOPS	Totalindo Eka Perdana Tbk	50	50	50	50	-	48.600	13,8	
TBIG	Tower Bersama Infrastructure Tbk	925	925	865	880	-45	29.685.200	23,2	
TDPM	Tridaman Performance Materials Tbk	150	155	150	150	-	24.000	7,72	
UNVR	Unilever Indonesia Tbk	2.225	2.250	4.880	2.125	-150	421.429.900	38,77	
UNTR	United Tractors Tbk	17.600	16.600	16.750	17.500	-100	2.463.200	5,77	
INCO	Vale Indonesia Tbk	2.310	2.320	2.150	2.210	-100	7.703.100	726,57	
WSPB	Waskita Beton Precast Tbk	171	171	160	160	-11	65.895.600	5,23	
WSPK	Waskita Karya (Persero) Tbk	665	675	620	620	-45	68.149.800	8,97	
WIRA	Wijaya Karya (Persero) Tbk	1.220	1.220	1.115	1.115	-65	62.665.500	4,46	
WEGE	Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	202	206	191	193	-9	65.539.400	4,09	
WTON	Wijaya Karya Beton Tbk	274	272	256	256	-18	19.631.000	4,35	
EXCL	XL Axiata Tbk	2.280	2.280	2.130	2.210	-70	17.191.900	33,15	

KURS UANG KERTAS ASING				
	Beli		Jual	
	BI	AYU	BI	AYU
US \$	15.628,47	15.200,00	15.785,54	15.775,00
Pound	19.713,75	19.000,00	19.915,04	19.775,00
Aust \$	10.019,41	9.500,00	10.123,27	10.075,00
Sin \$	11.049,54	10.800,00	11.164,54	11.175,00
SAR	4.155,96	3.820,00	4.199,96	4.095,00
MYR	3.686,85	3.000,00	3.651,52	3.475,00
HK \$	2.016,03	1.915,00	2.036,32	2.015,00
Yen	145,91	143	147,39	145,75
Euro	17.163,19	16.500,00	17.340,42	17.175,00

DEPOSITO RUPIAH/DOLLAR AS				
Bank (Rp/USD)	1 bulan (%)	3 bulan (%)	6 bulan (%)	12 bulan (%)
BCA (*Rp 2 Milliar)	4,25/1,20	4,25/1,20	4,25/1,30	4,25/1,30
Bank Danamon	5,25/0,25	5,25/0,25	5,25/0,25	5,25/0,25
Bank BNI (*Rp 5 Milliar)	4,50/0,50	5,75/0,50	5,75/0,50	5,25/0,50
Bank BRI (*Rp 100 Juta)	4,25/0,25	6,00/0,50	6,00/0,50	6,00/0,75
Bank OCBK NISP (*Rp 100 Juta)	4,75/0,25	4,75/0,25	4,75/0,25	4,75/0,25
Bank Mandiri (*Rp 100jt s/d *Rp 1M)	4,25/1,45	5,50/1,45	4,75/1,45	4,25/1,45
Bank BTN	5,50/0,05	5,75/0,05	5,50/0,05	5,25/0,05
Bank CIMB Niaga (*Rp 8 Juta)	4,50/0,50	5,00/0,75	5,25/0,75	5,50/0,75
Citibank	3,75/0,35	4,00/0,35	4,00/0,75	4,00/0,85
Bank Panin	5,25/0,25	5,25/0,25	5,25/0,50	5,25/0,50
Bank UOB Indonesia (*Rp 100 Juta)	3,50/0,60	3,50/0,60	3,50/0,60	3,50/0,60
Bank DKI (Rp 1 Juta s/d Rp 1 Milliar)	4,75/1,50	4,75/1,50	4,75/1,50	4,75/1,50
Bank BJB	5,25/0,50	5,25/0,50	5,50/0,50	5,50/0,50
Permata Bank	5,00/0,75	5,00/0,75	5,00/0,75	5,00/0,75
Bank Bukopin (umum)	5,25/0,75	5,50/0,75	5,50/0,75	5,50/0,75
Maybank Indonesia Tbk	5,00/0,50	5,00/0,50	5,50/0,50	5,50/0,50
Bank Chinatrust Indonesia	5,00/0,30	5,00/0,30	5,00/0,30	5,00/0,30

KURS BEA MASUK DAN PAJAK			
Daftar nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, PPN, PPhBM, pajak ekspor, dan PPh berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 17/MK/10/2020. Disusun urut nama negara, berlaku tanggal: 15 April 2020 - 21 April 2020			
Mata Uang	Rupiah	Mata Uang	Rupiah
1 USD Amerika Serikat	16.184,00	1 KRW Korea	13,29
1 SAR Arab Saudi	4.301,57	1 KWD Kuwait	52.041,51
1 AUD Australia	10.171,00	1 MYR Malaysia	

12 | Nusantara

KILAS DAERAH

RW dan RT di Surabaya Didorong Satu Pintu

SURABAYA — Pemerintah Kota Surabaya mengajak semua warga menerapkan mitigasi risiko Covid-19 dalam upaya mengurangi risiko penyebaran pandemi virus korona baru. Upaya lain seluruh rukun tetangga dan rukun warga diharapkan menerapkan akses satu pintu di wilayahnya untuk memutus mata rantai penyebaran virus korona. Melalui surat edaran Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, pemkot mendorong ke seluruh pengurus RT/RW ataupun warga melakukan penutupan akses jalan yang dinilai tidak penting. Beberapa RT/RW membuat alat penyemprotan disinfektan secara otomatis, serta memberlakukan akses masuk dan keluar hanya satu pintu. "Kami memasang penyemprotan disinfektan di satu titik dan setiap orang yang melintas pasti disemprot," kata Ketua RW 12 Kelurahan Medokanaya Suyanto (46). (SYA/ETA)

Dua Penyerang Polisi di Poso Tewas Ditembak

PALU — Dua anggota Mujahidin Indonesia Timur (MIT) tewas ditembak aparat gabungan Polri-TNI di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Rabu (15/4/2020). Keduanya menyerang polisi dengan senjata di depan sebuah bank di Poso. Polisi tersebut terluka di dada. Kepala Bidang Humas Polda Sulteng Komisaris Besar Didik Supranoto menyatakan, keduanya ditembak di Moengko, wilayah Kota Poso. "Tim gabungan bergerak setelah keduanya menyerang anggota (polisi) di bank," katanya dihubungi di Palu, Rabu. Penembakan terjadi sekitar pukul 12.45 Wita. Didik memastikan bahwa kedua orang tersebut anggota MIT yang saat ini dipimpin oleh Ali Kalora. Keduanya juga masuk dalam 17 daftar pencarian orang (DPO) dengan identitas Ali alias Darwin Gobel dan Muis Fahrion alias Abdullah. Keduanya tercatat sebagai warga Poso, (VDL)

Tes Cepat Covid-19 bagi Pekerja Migran



KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Pekerja migran Indonesia yang baru tiba dari Malaysia menunjukkan nomor antrean untuk melakukan tes cepat (*rapid test*) yang dilakukan Satuan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Jawa Timur di Terminal 2 Bandara Internasional Juanda, Surabaya, Rabu (15/4/2020). Tes cepat dilakukan terhadap 172 penumpang Malaysia Airlines dan 78 penumpang Citilink. Jika lolos tes cepat, mereka diantar menggunakan bus yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Jatim menuju daerahnya masing-masing.

DAMPAK COVID-19

Usaha Perikanan di Tegal Terpuruk

TEGAL, KOMPAS — Nelayan, penjual ikan, dan pengusaha pengolahan ikan di Kota Tegal, Jawa Tengah, terdampak pandemi Covid-19. Bahkan, produksi ikan olahan anjlok hingga 50 persen.

Produksi ikan tangkap yang dibawa ke tempat pelelangan ikan di Pelabuhan Kota Tegal mencapai 27-30 ton per hari. Biasanya, sebagian besar ikan terserap pada industri pengolahan. Sejak pandemi Covid-19, daya serap industri pengolahan ikan menurun hingga separuhnya.

"Penyetopan atau penguangan produksi di pabrik pengolahan ikan membuat serapan terhadap ikan kami ikut menurun. Padahal, jumlah tangkapan kami masih seperti biasanya," kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kota Tegal Riswanto, Rabu (15/4/2020).

Melimpahnya stok ikan membuat harga ikan di pasaran anjlok. Rata-rata harga ikan

turun hingga Rp 4.000 per kilogram. Nelayan yang biasanya punya penghasilan sekitar Rp 200.000 per hari kini hanya bisa mendapatkan Rp 50.000-Rp 100.000. Sebagian nelayan memilih tidak melaut karena biaya operasionalnya justru lebih besar ketimbang penghasilan yang diperoleh.

Penurunan pendapatan juga dialami para penjual ikan di Kota Tegal. Wati (60), penjual ikan di Kota Tegal, mengatakan, dalam sebulan terakhir pendapatannya menurun dari Rp 2 juta per hari menjadi Rp 2 juta per minggu. "Biasanya, paling sedikit bisa menjual 50 kilogram ikan dalam sehari. Sekarang, mau menjual 5 kilogram sehari susahh minta ampun," ujar Wati.

Anjlok 50 persen

Nurtantio Sony Putro (47), pengusaha pengolahan ikan di Kota Tegal dan Kota Pekalongan, mengatakan, penurunan produksi di pengolahan ikan terjadi karena permin-

taan atas hasil ikan olahan turun 50 persen ketimbang biasanya. Perusahaan Sony kini hanya mengolah 30 ton ikan per hari. Dalam situasi normal kapasitas produksi 60 ton ikan per hari.

Menurut Sony, permintaan ikan olahan paling banyak datang dari Jakarta. Permintaan itu menurun, diduga salah satunya dipicu pembatasan sosial berskala besar yang membuat akses terhambat.

Di Kota Tegal, ada 5.400 nelayan yang kegiatan ekonominya terdampak Covid-19. Untuk meringankan beban mereka, Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Pangan (DKP3) Kota Tegal akan memberi mereka bantuan paket bahan kebutuhan pokok.

Paket terdiri dari beras, kecap, sarden, dan mi instan. Paket akan mulai disalurkan awal Mei. Paket diberikan satu kali dengan pertimbangan nelayan sudah mendapat bantuan 54 ton beras saat pakeklik Februari lalu. (XT)

Pemda Tidak Pungut Pajak

Pandemi Covid-19 membuat perhotelan, restoran, dan tempat hiburan terpuruk. Pemda pun membebaskan pajak untuk meringankan beban pengusaha dan warga.

JAKARTA, KOMPAS — Demi meringankan beban dunia usaha dan masyarakat selama masa pandemi Covid-19, sejumlah pemerintah daerah membebaskan pembayaran pajak usaha perhotelan, restoran, hingga tagihan rekening air bersih.

Kebijakan ini merespons instruksi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan dijalankan di sejumlah daerah, antara lain Jawa Timur, Kota Kediri dan Jambi, serta Kabupaten Trenggalek, Tulungagung, Lampung Barat, dan Dompu.

Banyak Pemda menjalankan pembebasan serentak. Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur, menjalankan kebijakan ini sambil meminta pengusaha tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan. Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar saat dihubungi dari Malang, Rabu (15/4/2020), mengatakan, pembebasan pajak diterapkan dengan catatan pengusaha tidak melakukan PHK karyawan.

"Pembebasan pajak berlaku untuk bulan Maret sampai April. Nanti kami lihat lagi apakah akan diperpanjang sampai bulan-bulan berikutnya. Tetapi dengan catatan, mereka tidak melakukan pemecatan terhadap karyawan," katanya.

Menurut Abu, pendapatan asli daerah (PAD) Kota Kediri pasti akan berkurang. Namun, langkah ini merupakan cara untuk meringankan beban pengusaha dan masyarakat. Selama ini PAD Kota Kediri mencapai Rp 300 miliar setahun.

Pemerintah Provinsi Jatim pun membebaskan masyarakat dari pembayaran sewa empat rumah sederhana susun di Gunung Sari dan Sumur Welut (Surabaya) serta Griya Asri SIER dan Jemudo (Sidoarjo) periode April-Juni 2020. Pemprov Jatim juga membebaskan denda

keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Hal yang sama juga dijalankan Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Jatim. Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin mengatakan, pihaknya tidak memungut pajak restoran dan hotel serta pungutan retribusi sewa lahan dan bangunan juga obyek lain milik pemda untuk April-Juni 2020. "Kami meyakini kebijakan relaksasi ini bisa meringankan beban pelaku usaha selama masa sulit pandemi Covid-19," kata Arifin.

Adapun Pemkab Tulungagung, Jatim, membebaskan pajak hotel dan restoran bagi pelaku usaha sektor pariwisata kurun April-Juni 2020. Pembebasan pajak dan retribusi membuat Tulungagung berpotensi kehilangan penerimaan pajak hotel dan restoran sedikitnya Rp 4 miliar per bulan. "Pembebasan pajak ini sesuai instruksi Mendagri," kata Bupati Tulungagung Maryoto Birowo.

Di Provinsi Jambi, Pemkot Jambi membebaskan pajak bagi pelaku usaha jasa dan hiburan serta tarif air minum untuk minimal dua bulan ke depan. Wali Kota Jambi Syarif Fasha mengatakan, pembebasan berlaku atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak air tanah periode 1 April hingga 30 Mei 2020.

Pemkot Jambi juga memperpanjang tenggat pembebasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pembayaran yang semestinya jatuh tempo September diperpanjang hingga 31 Desember. "Masyarakat kelompok ini dan pelaku-pelaku usaha sektor jasa ini mengalami kondisi yang sangat terpuruk akibat Covid-19," kata Fasha.

Pemkab Lampung Barat, Lampung, juga membebaskan pajak hotel dan restoran selama

tiga bulan ke depan. Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus mengatakan, pemda tetap menyiapkan kebijakan pembebasan pajak bagi usaha perhotelan dan restoran di Lampung Barat. "Kebijakan ini untuk mengurangi beban pengusaha selama tiga bulan ke depan," kata Parosil saat dihubungi dari Bandar Lampung.

Pemkab Dompu, Nusa Tenggara Barat, juga menerapkan kebijakan ini. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu Armansyah saat dihubungi dari Mataram, mengatakan, pembebasan pajak ini sesuai instruksi Mendagri.

Armansyah mengatakan, walaupun pajak bersifat memaksa, dalam kondisi seperti sekarang tidak mungkin pemda memungut pajak. "Jadi, kami harus bantu mereka. Jangan sampai usahanya mati," katanya.

Melegakan

Dihubungi secara terpisah, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia NTB Ni Ketut Wolini, Selasa (14/4), mengatakan Badan Pimpinan Pusat PHRI sudah menyurati seluruh kepala daerah. Sejumlah daerah sudah merespons, seperti Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Utara, dan Lombok Timur. "Tetapi surat resminya sedang diproses," kata Wolini.

Ketua PHRI Jatim Dwi Cahyono mengatakan, kebijakan sejumlah pemerintah daerah membebaskan pajak cukup melegakan. Namun, hal itu belum banyak membantu sektor pariwisata dapat bertahan. Kalaupun pengusaha perhotelan dan restoran sudah merumahi kondisi yang sangat terpuruk akibat Covid-19," kata Fasha.

Pemkab Lampung Barat, Lampung, juga membebaskan pajak hotel dan restoran selama

Metropolitan

PEMERINTAHAN

Sinergi Nyata Anies-Riza Dinantikan

JAKARTA, KOMPAS — Kinerja birokrasi Provinsi DKI Jakarta diharapkan meningkat pasca-pelantikan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria mendampingi Gubernur Anies Baswedan, Rabu (15/4/2020). Pasangan baru itu diharapkan bergerak cepat, bukan hanya di saat pandemi Covid-19, tetapi juga mengatasi masalah kemacetan dan banjir.

"Semoga wagub yang baru dapat mengambil amanah warga sebaik-baiknya. Bekerja keras dan dapat meneruskan seluruh program kerja yang baik agar lebih baik lagi," kata Prasetyo Edi Marsudi, Ketua DPRD DKI Jakarta, dihubungi sesuai menghadiri pelantikan.

Ia berharap pasangan pemimpin Ibu Kota itu dapat berbagi tugas dan rajin turun ke lapangan. Sebab, masalah juga ada di tengah masyarakat.

Paling dekat adalah penanganan Covid-19, khususnya seputar distribusi bantuan sosial. "Ini nomor satu yang harus dilakukan, bagaimana penanganannya. Saya berharap Pak Wagub melihat langsung bagaimana warga miskin dan rentan miskin terdampak pembatasan sosial ini. Apa yang mereka butuhkan, tolong sentuh langsung. Bantuan yang diberikan awasi distribusinya," tutur Prasetyo.

Saat ini, Pemprov DKI Jakarta menganggarkan triliunan rupiah untuk bantuan sosial kepada 1,2 juta keluarga. Bansos berwujud bahan pokok itu sudah didistribusikan dan berlangsung setidaknya hingga tiga bulan ke depan. Selain pengawasan penggunaan anggaran, masih ada sejumlah warga terdampak belum memperoleh bansos.

Di luar itu, pekerjaan prioritas di Jakarta yang harus ditangani adalah soal kemacetan dan banjir. "Itu saja. Ketika dua masalah itu beres, semua akan beres. Perekonomian menggeliat, iklim investasi bagus, maka



MYE

Ahmad Riza Patria

dampaknya pada peningkatan PAD (pendapatan asli daerah)," ujar Prasetyo.

Harapan besar juga disampaikan Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta Sarman Simanjorang. Pelaku usaha berharap wagub yang baru dapat bekerja sama dengan gubernur mengatasi masalah, khususnya pandemi Covid-19. Perekonomian Jakarta hampir lumpuh total. Imbauan bekerja dari rumah (*work from home*) dan kebijakan pembatasan sosial berskala besar membuat pergerakan masyarakat kian sempit. Kondisi ini mematikan berbagai bidang usaha di Jakarta.

"Hal ini akan sangat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Jakarta yang akan turun drastis. Kondisi ini tentu akan menimbulkan masalah baru, seperti meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan, tutupnya berbagai pelaku UKM, serta turunnya PAD DKI Jakarta," kata Sarman.

Suka atau tidak, kata dia, tantangan besar wagub yang baru. "Namun, kami pelaku usaha memiliki optimisme tinggi, tantangan besar ini mampu dihadapi," kata Sarman yang juga Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta itu.

Patuh dan taat

Riza yang dihubungi sesuai

pelantikan menyatakan siap melaksanakan tugas membantu gubernur melaksanakan visi misi, program RPJMD yang telah ditetapkan DPRD.

Ia berharap kehadirannya bisa menuntaskan program. "Khususnya dalam menangani Covid-19. Kami berharap masalah ini bisa kami selesaikan baik. Saya sampaikan pada Presiden, saya akan patuh dan taat pada peraturan pemerintah pusat dan daerah," kata Riza.

Hari Kamis ini, ia dan semua jajaran SKPD DKI Jakarta diundang bertemu Anies. "Pak Gubernur akan menjelaskan program-program dan memperkenalkan para SKPD di DKI," katanya.

Untuk program kerja, prioritas yang akan Riza dikerjakan lebih dahulu ialah membantu gubernur menyelesaikan tugas. "Jadi, tugas wagub adalah membantu gubernur dalam rangka memimpin pemerintahan daerah, memantau, mengevaluasi, memberikan pertimbangan, rekomendasi, dan melaksanakan tugas-tugas sesuai undang-undang serta tugas dari pak gubernur," ujarnya.

Kemarin, pelantikan Riza oleh Presiden Joko Widodo berlangsung di Istana Negara dalam suasana pandemi Covid-19, tidak dihadiri banyak orang. Hadir pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Anies Baswedan, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi, serta Sekretaris Daerah Provinsi DKI Saefullah.

Riza diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 40/P Tahun 2020 tentang pengesahan pengangkatan wakil gubernur DKI Jakarta sisa masa jabatan 2017-2020. Kursi wagub kosong sejak 27 Agustus 2018.

Dilantik pula I Dewa Kade Wiarasa Raka Sandi sebagai anggota KPU dan Benny Rhamdani sebagai Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. (HLN/INA)



Berbagi Ruang di Ruang Kerja Bersama

Pusat kegiatan kreatif atau *creative hub* hadir di Indonesia sejak tahun 2000-an. Salah satu pionirnya adalah Ruangrupa di Pancoran, Jakarta Selatan. Seiring berkembangnya waktu, jumlahnya bertambah menjadi 193 pada 2017. Ruang kreatif tersebut, menurut Center for Innovation Policy and Governance (CIPG), dibagi menjadi tiga, yang salah satunya adalah *coworking space* (ruang kerja bersama). Di dalam bangunan "ruang kerja bersama" tersebut, setiap individu bisa saling berbagi tempat untuk kegiatan yang berbeda. Mulai dari rapat, *workshop*, pameran, hingga peluncuran produk. (Krishna P Panolih dan Albertus Krisna/Litbang Kompas)



Ekosistem di Industri Ruang Kerja Bersama

1. Individu sebagai pendiri perusahaan
2. Penanam modal usaha
3. Agen properti
4. Penyedia layanan internet
5. Penyedia sistem elektronik
6. Konsultan hukum



Sumber Laporan "Enabling Spaces: Mapping creative hubs in Indonesia" (CIPG, 2017). Diolah oleh Litbang Kompas/KPP/INA

INFOGRAFIK: TITIRMA

KILAS METRO

Sedan Tabrak Enam Pekerja Tol, Lima Tewas

Lima pekerja perbaikan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta di area Pasar Rebo, Jakarta Timur, tewas tertabrak sedan yang dikemudikan oleh MO, Rabu (15/4/2020) pukul 03.00. Satu pekerja lainnya mengalami luka berat. MO mengaku mengantuk saat berkendara. "MO sedang kami periksa," kata Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Metro Jaya Komisaris Besar Sambodo Purnomo Yogo, Rabu. Semua korban dievakuasi ke Rumah Sakit Tingkat I R Said Sukanto atau RS Polri Kramatjati, Jakarta Timur. Saat ini, polisi masih menunggu hasil tes urine MO untuk mengetahui penyebab kecelakaan, termasuk kemungkinan adanya pengaruh alkohol. (JOG)

Ditegur Tanpa Masker Malah Todongkan Pisau

Tak terima ditegur petugas di titik pengawasan pembatasan sosial berskala besar di Pasar Jumat, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu (15/4/2020), M yang tak memakai masker malah mengacungkan pisau ke arah para petugas. "Ia mengaku purnawirawan TNI," kata Camat Kebayoran Lama Aroman saat dihubungi. Rabu. Saat kejadian pada pukul 08.30, M mengawal mobil membawa uang untuk ATM. Pagi itu, personel kepolisian, petugas Satpol PP, dan Dishub DKI merebut pisau dan membawa M ke tenda pos untuk diinterogasi, seperti tersiar dalam video viral. Dalam video itu terdapat cuplikan senjata berbentuk pistol. Menurut Aroman, itu *air soft gun* yang kini disita. M dibolehkan pergi setelah meminta maaf dan diberi penjelasan. (JOG)

Sore Bersama Suzuki XL7

Hari sudah sore saat kami lepas dari kota Subang, Jawa Barat. Sinar matahari yang sudah condong ke barat berkelebatan dari balik pepohonan tinggi, beberapa menit setelah kami berbelok kiri di pertigaan Jalan Cagak.

Dahono Fitrianto

Mobil terus meluncur membelah perkebunan teh ke arah selatan. Tak lama kemudian jalan aspal yang halus dan mulus itu mulai berkelok-kelok.

Suzuki XL7 yang membawa kami tak menemukan kendala melahap tikungan demi tikungan yang mulai menanjak ke arah Ciater-Tangkubanparahu. Ada rasa limbung saat kami masuk ke tikungan terlalu cepat. Yah, ini memang bukan

sedan, jadi gejala ini secara instingtif telah diantisipasi.

Saat tanjakan makin curam, beberapa kali *kickdown* harus dilakukan di mobil bertransmisi otomatis 4 tingkat percepatan ini agar transmisi pindah ke gigi lebih rendah dan torsi puncak bisa dikail untuk terus melaju ke depan.

Namun, tak ada rasa ragu dan khawatir dengan tenaga mobil ini. Tenaga mesin terasa selalu tersedia, terutama di putaran

bawah. Walau di atas kertas, bisa dibilang tenaga mesin 4 silinder K15B berkapasitas 1.5 liter ini tak istimewa.

Tenaga maksimum 104,7 PS pada putaran mesin 6.000 rpm dan torsi puncak 138 Nm pada 4.400 rpm terasa cukup menghela mobil berbobot kotor 1,7 ton ini mendaki lereng Tangkubanparahu. Pikiran melayang pada perkataan Dony Saputra, Direktur Pemasaran Roda 4 PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), di



Bogor, 11 Februari 2020.

Kata Dony waktu itu, walau menggunakan mesin yang sama dengan Suzuki Ertiga generasi kedua, ada perubahan pada bagian ECU yang mem-buahkan peningkatan tenaga sedikit di putaran bawah.

Inilah XL7, model SUV baru Suzuki yang dikembangkan dari Suzuki Ertiga generasi kedua. Menurut Dony, walau menggunakan platform Ertiga, ada berbagai perubahan signifikan pada mobil ini. Misalnya sektor kaki-kaki dan suspensi diperbarui sehingga *ground clearance* XL7 lebih tinggi 20 milimeter (mm) dibandingkan dengan Ertiga, menjadi 200 mm.

Perubahan ini membawa konsekuensi pemindahan posisi tangki bensin. "Suzuki XL7 memang memiliki beberapa *common parts* dengan Ertiga, terutama bagian belakang dan samping. Namun, selebihnya banyak bagian yang berbeda. Itu sebabnya ini *new model*, bukan sekadar *crossover-crossover*," tandas Dony.

Kompas melihat tim Suzuki berhasil membuat XL7 tampil lebih gagah dari Ertiga yang bertipe MPV (*multi-purpose vehicle*) itu. Terutama dengan membuat bonet yang lebih datar dan tinggi, dan gril dengan garis-garis tegas warna hitam. Desain bonet ini membuat

XL7 berbentuk mengotak yang terlihat tangguh.

Mengembara

Sebagaimana fungsi sebuah SUV adalah kendaraan untuk mengembara, Kompas mengajak XL7 ke dataran tinggi Lembang, Jawa Barat, 23-24 Maret 2020. Dari Lembang, Kompas mengarahkan mobil ke arah Cisarua, Bandung Barat, untuk mengunjungi salah satu kawan lama.

Setelah melalui jalan raya yang berkelok-kelok menuju arah barat, kami memasuki jalan kampung yang hanya cukup dilewati satu mobil dan dihiasi turunan dan tanjakan lumayan berat.

Setir XL7 dengan *power steering* elektriknya terasa sangat ringan dan membuat mobil lincah diajak melewati tikungan-tikungan.

Keesokan harinya, kami fokus mencermati berbagai fitur di mobil ini. Kebetulan unit tes yang kami pakai berasal dari varian Alpha, varian tertinggi dari Suzuki XL7.

Varian yang dibanderol Rp 267 juta (*on the road*, Jakarta), ini sudah dilengkapi berbagai fitur keselamatan, seperti rem ABS/EBD, ESP (Electronic Stability Programme), dan Hill Hold Control. Sandaran tangan di baris kedua dan bagian depan sedikit menolong untuk sekadar menyandarkan

siku tangan kiri.

Akan tetapi, fitur paling menarik dari varian ini adalah Smart e-Mirror. Ini adalah kaca spion dalam yang sekaligus berfungsi sebagai layar monitor untuk menayangkan kondisi di belakang maupun depan mobil. Tampilan gambar cukup tajam dan terang, dengan lensa sudut lebar di kamera belakang menyajikan pemandangan di belakang mobil dengan cukup luas.

Hanya saja, kita harus membiasakan diri menyesuaikan fokus mata pada permukaan layar tersebut saat ingin melihat ke belakang. Selain itu, pada malam hari, sinar kendaraan dari belakang yang terekam lensa berpendar begitu menyilaukan sehingga justru kesulitan untuk melihat situasi di belakang.

Pada malam hari, Kompas memilih mematikan fitur E-Mirror ini. Untunglah saat dimatikan, layar tersebut cukup jelas memantulkan pandangan ke belakang mobil.

Di luar itu, XL7 juga dilengkapi *head unit* dengan layar sentuh berukuran 8 inci yang memiliki fungsi *mirroring* tampilan ponsel pintar atau gawai kita.

Di satu sudut Ciater, mobil kami belokkan memasuki jalan kampung yang membelah kebun teh. Jalan tak beraspal dengan lapisan batu-batu kasar, yang tak mungkin dilalui sedan itu diterabas XL7 tanpa kendala.

Suspensinya pun cukup meredam bantingan-bantingan yang terjadi saat ban mobil mendaki bebatuan atau saat masuk lubang cukup dalam.

Tak terasa waktu lewat tengah hari. Ini artinya kami harus mulai beranjak kembali ke Jakarta. Di tengah hujan deras, kami meluncur kembali ke utara, memasuki kota Subang, lalu Jalan Tol Cipali. Hari pun sudah sore saat kami berjalan pulang....

klik.kompas.id/suzukixl7



FOTO: FOTO: KOMPAS/EDDY HASBY

- 1 Scan QR Code pada halaman 1 Harian Kompas edisi hari ini
- 2 Masuk atau buat akun baru Kompas.id
- 3 Pilih rubrik Video Berita
- 4 Tonton video Lensa Berita di Kompas.id GRATIS*

* Gratis 7 hari setelah memindai QR code pada halaman 1 koran Kompas edisi hari ini

Akses kumpulan arsip Kompas dalam format audiovisual di Lensa Berita

14 Olahraga

PON PAPUA

Menpora Siapkan Opsi Oktober 2021

JAKARTA, KOMPAS — Berdasarkan masukan dan usulan dari sejumlah pihak, Kementerian Pemuda dan Olahraga telah mempersiapkan opsi penundaan Pekan Olahraga Nasional ke-20. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali menilai, Oktober 2021 sebagai waktu yang ideal untuk menyelenggarakan PON Papua. Akan tetapi, keputusan terkait penundaan itu masih menunggu keputusan Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet terbatas. Agenda itu dijadwalkan dilaksanakan pada pekan ini.

Dalam telekonferensi di Jakarta, Rabu (15/4/2020), Zainudin mengungkapkan, pihaknya telah menerima masukan terkait penundaan PON Papua yang seharusnya berlangsung 20 Oktober-2 November 2020. Hal itu disampaikan oleh Komisi X DPR dalam rapat dengar pendapat, Selasa (14/4).

Zainuddin mengungkapkan, Gubernur Papua Lukas Enembe telah mengirim surat resmi kepadanya untuk mengabarkan situasi terkini di Papua. Intinya, Provinsi Papua mengerahkan seluruh sumber daya yang ada saat ini untuk penanganan danantisipasi wabah Covid-19 sehingga persiapan PON dikesampingkan.

Tak hanya DPR dan Pemerintah Provinsi Papua, usulan penundaan PON 2020 juga disampaikan sejumlah pengurus cabang olahraga, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), serta seluruh KONI daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Awalnya, menurut Zainudin, Kemenpora telah menyiapkan jadwal baru PON Papua pada Maret 2021, tetapi mayoritas KONI daerah keberatan karena pada bulan Maret KONI daerah belum menerima anggaran dari pemda.

Ia menyebutkan, bulan April-Mei 2021 memasuki bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri, lalu Mei-Juni akan diselenggarakan Piala Dunia U-20 di Indonesia, kemudian Juli-Agustus Olimpiade Tokyo, dan September akan diselenggarakan agenda Hari Olahraga Nasional. Selanjutnya, pada November akan digelar SEA Games, dan akhir tahun Indonesia akan menjadi tuan rumah seri Moto GP. Waktu yang kosong agenda olahraga hanya pada Oktober 2021.

Secara terpisah, Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menyatakan, DPR sepakat dengan Menpora agar PON Papua ditunda. Penundaan didasari persiapan PON tidak bisa optimal karena wabah Covid-19. Persiapan atlet juga tidak maksimal karena atlet harus membatasi aktivitas mereka.

"Mengetahui hingga kapan penundaannya, tanggal, bulan, dan tahun, kami serahkan sepenuhnya kepada Menpora untuk berkonsultasi dengan Presiden Jokowi," ujarnya.

Fokus

Di Papua, harapan penundaan PON dikemukakan sejumlah pihak. Ketua DPRD Papua John Banua Rouw mengatakan, apabila pemerintah tetap menghendaki PON dilaksanakan tahun ini, Pemerintah Provinsi Papua akan kesulitan untuk mempersiapkan infrastruktur untuk mencegah wabah Covid-19. Pembangunan sejumlah arena belum bisa rampung karena tenaga ahli dari luar negeri belum bisa datang.

"Kami usulkan PON ditunda hingga tahun depan. Maka, kami akan lebih fokus menyediakan anggaran untuk penanganan virus korona baru, seperti pengadaan fasilitas kesehatan dan bantuan bagi pelaku usaha mikro," ucap John.

Atas dasar itu, Yunus Wonda, Ketua Harian Panitia Besar PON Papua, berharap Presiden Jokowi segera mengeluarkan keputusan untuk menunda PON ke-20 sementara waktu seiring peningkatan jumlah kasus Covid-19 di Papua.

Eko Yuli Irawan, lifter kelas 61 kilogram asal Lampung, mendukung rencana penundaan PON 2020. Ia meminta PON Papua jangan sampai dihentikan karena PON merupakan panggung atlet nasional serta tolak ukur bagi pembinaan atlet di daerah (*Kompas*, 29/3/2020). (SAN/FLO)

Atasi "Bunker"



AFP/GETTY IMAGES/CHRISTIAN PETERSEN

Pegolf muda Amerika Serikat, Thomas Lehman Jr, memukul bola keluar *bunker* pada lubang ketujuh hari kedua Outlaw Tour Arrowhead Classic di Arrowhead Country Club, Glendale, Arizona, Selasa (14/4/2020). Sejumlah turnamen golf di AS tetap bergulir meski terjadi pandemi Covid-19.

VARIA OLARHAGA

PBSI Koordinasikan Jadwal dengan Istora GBK

Sambil menunggu jadwal baru penyelenggaraan Blibli Indonesia Terbuka 2020 yang dikeluarkan Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF), Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) berkoordinasi dengan pengelola Istora Gelora Bung Karno, Jakarta. Sekjen PP PBSI Achmad Budiharto pada laman PBSI, Rabu (15/4/2020), mengatakan, pihaknya telah menginformasikan soal penundaan turnamen kategori BWF Super 1000 ini. "Ditunda sampai kapan, kami sudah infokan bahwa kami masih menunggu keputusan BWF, dan pihak Istora mengerti keadaannya," ujar Budi. Turnamen ini semula dijadwalkan pada 16-21 Juni 2020, dan PBSI mengusulkan untuk ditunda ke bulan September. Namun, penundaan turnamen lain, termasuk Piala Thomas-Uber, membuat Indonesia Terbuka belum bisa dipastikan waktunya. (WAS)

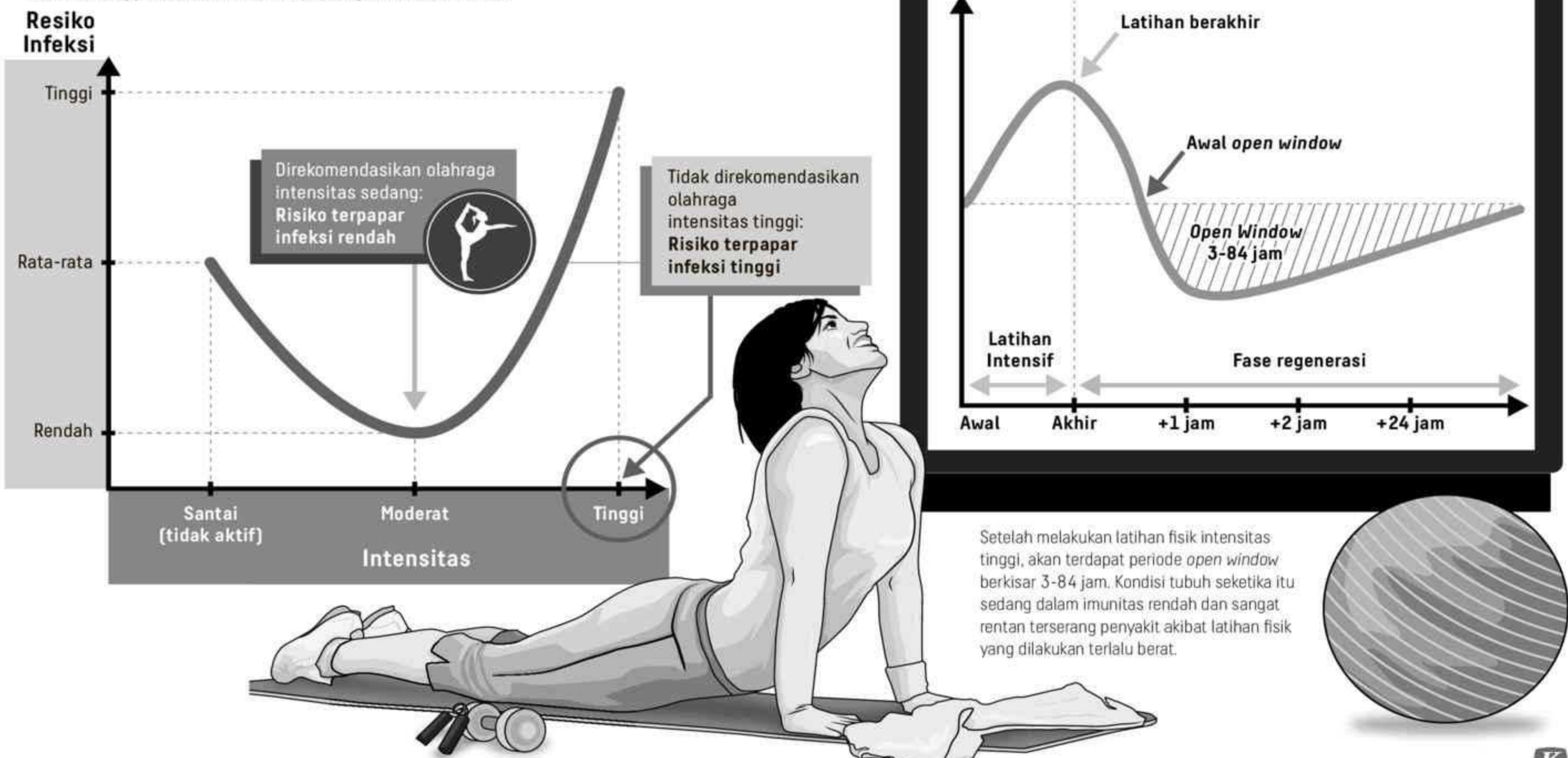
Kampanye Pembatasan Sosial ala Usain Bolt

Kampanye pembatasan sosial untuk mengurangi penyebaran Covid-19 yang dilakukan mantan pelari jarak pendek Usain Bolt (33) mendapat sambutan meriah. Bolt mengunggah foto saat dirinya memenangkan final 100 meter di Olimpiade Beijing 2008 sekaligus meninggalkan lawan-lawannya di belakang. Bolt kemudian menambahkan komentar dalam foto dari kantor berita AFP tersebut yaitu "*social distancing*". Unggahan Bolt itu sampai Selasa (14/4/2020) telah disukai lebih dari 500.000 pengguna media sosial dan 90.000 *retweet*. Pemegang rekor dunia lari 100 meter dengan waktu 9,58 detik itu giat melakukan kampanye isolasi diri kepada warga Jamaika. Sebelumnya, Bolt mengunggah video saat dirinya tengah berolahraga di rumah dan bermain sepak bola dengan seorang temannya. (AFP/WAD)

Hindari Intensitas Tinggi

Kurva huruf J

- Intensitas sedang: saat latihan fisik, seseorang masih bisa berbicara walaupun terengah-engah
- Intensitas tinggi: saat latihan fisik, seseorang kesulitan berbicara



Sumber: Kakani et al (2010) The Open Window of Susceptibility to Infection after Acute Exercise in Healthy Young Male Elite Athletes, Journal of Science Medicine in Sport, International Journal of Sports Medicine

Olahraga untuk Imunitas

Imunitas tubuh menjadi faktor penting dalam masa pandemi Covid-19 ini. Olahraga dengan intensitas yang tepat menjadi salah satu kunci menjaga imunitas tersebut.

Anjuran untuk beraktivitas di rumah selama masa pandemi Covid-19 bukan penghalang untuk berolahraga. Gaya hidup kurang gerak akan menurunkan imunitas tubuh sehingga meningkatkan risiko terinfeksi virus.

Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga Michael Trianto berpendapat, berada di rumah bisa menjadi momentum baik untuk menjadikan diri lebih sehat, yaitu dengan mengatur pola makan dan berolahraga.

"Mengatur pola makan saja tidak cukup karena kesehatan didapat bukan saja dari apa yang masuk, tetapi juga dari apa yang kita keluarkan dalam bentuk aktivitas fisik dan olahraga. Keseimbangan keduanya sangat penting. Berada di rumah tak akan baik bila benar-benar berdiam diri," katanya.

Lebih penting dari itu, aktivitas fisik dan olahraga bisa memunculkan imunitas yang sangat diperlukan tubuh saat belum ada obat untuk mengatasi penyakit akibat virus ini.

Atas dasar itu, Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga (PDSKO) dan Departemen Fisiologi Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (FK-KMK UGM) merekomendasikan agar warga tetap aktif di rumah pada masa pandemi ini.

Dalam panduan dari FK-KMK UGM disebutkan, keparahan karena terinfeksi Covid-19 diperkirakan terjadi karena tidak seimbangnya tingkat daya tahan tubuh dengan reaksi peradangan. Aktivitas fisik rutin yang tepat bisa meningkatkan daya tahan sehingga menekan reaksi peradangan yang berlebihan.

Aktivitas fisik dan olahraga juga bisa menurunkan berat badan berlebihan. Orang dengan obesitas akan mengalami reaksi peradangan lebih tinggi.

Laporan dari *International Journal of Sports Medicine*, yang dikutip dalam rekomendasi PDSKO menyebut ada hubungan antara intensitas olahraga dan risiko infeksi yang membentuk kurva huruf J. Berdasarkan kurva itu, Michael menjelaskan, titik tertinggi paling kiri (lihat grafik) adalah posisi ketika seseorang lebih banyak duduk. "Orang yang lebih banyak diam atau tidak berolahraga memiliki risiko sakit. Orang yang berolahraga dengan intensitas sedang memiliki risiko terinfeksi rendah. Adapun olahraga dengan intensitas tinggi memunculkan risiko infeksi tinggi," tuturnya.

Dengan kata lain, latihan fisik dalam intensitas sedang dapat meningkatkan imunitas tubuh, sedangkan latihan dengan intensitas tinggi justru menurunkan imunitas. "Setelah latihan berat, ada periode ketika tubuh berada dalam imunitas rendah. Kondisi ini membuat rentan terinfeksi," katanya tentang efek dari olahraga intensitas tinggi. Parameter intensitas sedang adalah seseorang masih berbicara walaupun terengah-engah saat latihan fisik. Adapun intensitas tinggi adalah ketika kesulitan bicara saat berolahraga. Berdasarkan hal itu,

Tetap Aktif di Masa Pandemi

Latihan Aerobik

- Jalan cepat sekeliling rumah.
- Naik-turun tangga di dalam rumah selama 10-15 menit, 2-3 kali sehari.
- Dansa, senam aerobik via YouTube, loncat tali.
- Olahraga dengan sepeda statis atau treadmill.

Latihan Kekuatan Otot

- Squat (jongkok-berdiri)
- Lunges
- Push up
- Crunches

Sumber: PDSKO

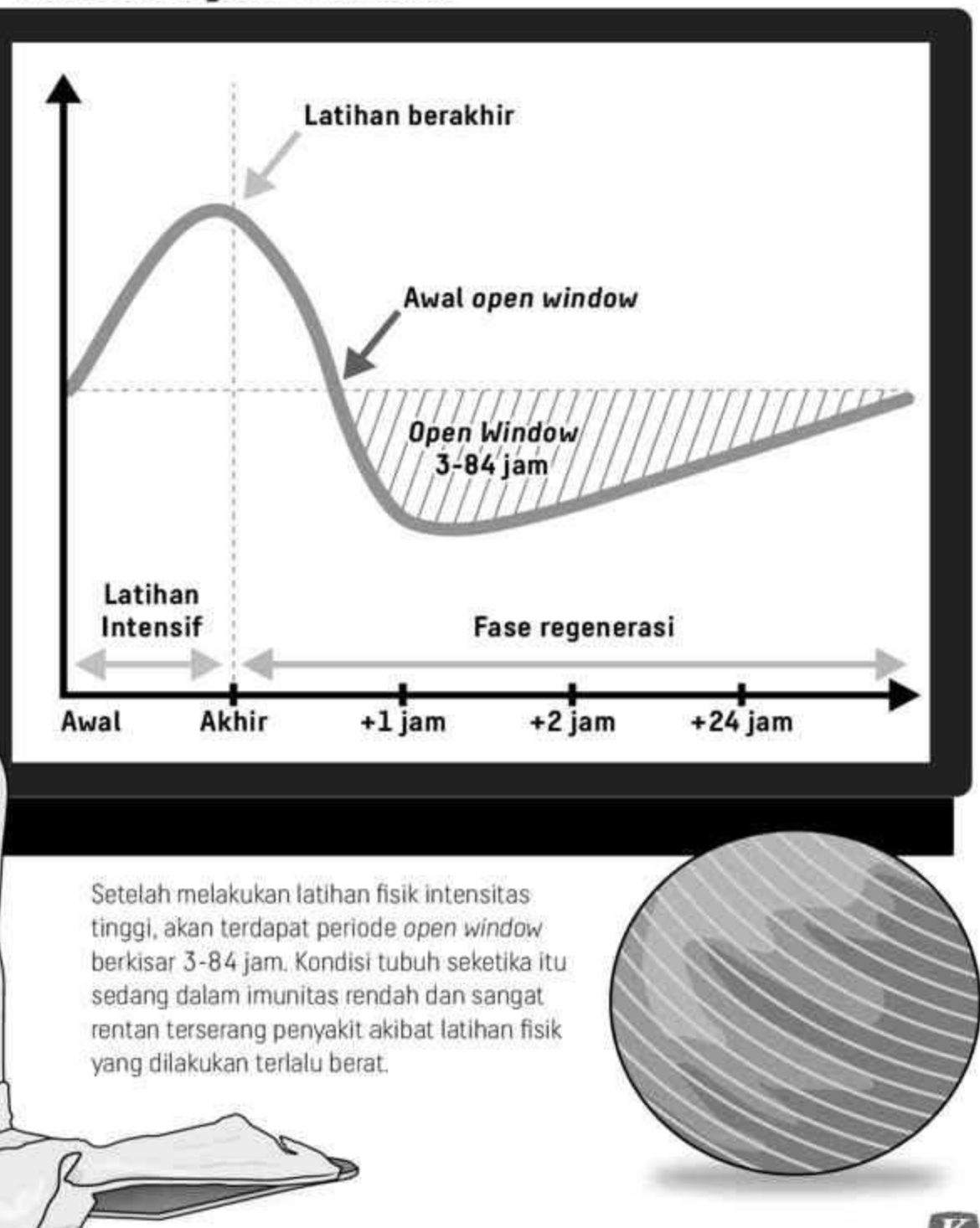
ukuran intensitas setiap orang berbeda-beda.

"Orang yang kurang gerak akan mengatakan bahwa berjalan adalah kegiatan intensitas tinggi. Adapun orang dengan kebiasaan jalan cepat akan menilai berlari adalah olahraga intensitas tinggi," kata Michael.

Bentuk olahraga

Untuk mencapai kondisi fisik yang dibutuhkan dalam masa pandemi, dua bentuk olahraga yang penting adalah aerobik dan anaerobik (latihan beban). Latihan aerobik, yang dilakukan dalam intensitas ringan-sedang, berulang, dan dalam jangka waktu panjang bisa meningkatkan derajat ke-

Periode Open Window



Setelah melakukan latihan fisik intensitas tinggi, akan terdapat periode *open window* berkisar 3-84 jam. Kondisi tubuh seketika itu sedang dalam imunitas rendah dan sangat rentan terserang penyakit akibat latihan fisik yang dilakukan terlalu berat.

K
INFOGRAPHIC: HANS

sehatan. Latihan aerobik biasa disebut juga latihan kardiorespirasi karena melatih jantung dan paru.

Sehat tak menjamin seseorang bugar antara lain lemas saat bangun tidur dan cepat lelah ketika beraktivitas.

"Latihan aerobik bisa memperlambat denyut nadi hingga fungsi kerja jantung lebih baik, melebarkan atau membuka pembuluh darah yang membuat tekanan darah menurun. Selain itu, meningkatkan pembakaran lemak yang baik untuk penderita kolesterol tinggi dan obesitas," tutur Michael.

Jalan cepat, jogging, bersepeda, renang, dan dayung adalah contoh yang baik untuk olahraga aerobik. Jalan cepat mengelilingi rumah atau naik-turun tangga bisa menjadi alternatif latihan aerobik di rumah. Sementara itu, latihan anaerobik dengan intensitas berat, tidak banyak pengulangan, dan waktu melakukan yang pendek bisa meningkatkan derajat kebugaran seiring dengan meningkatnya kekuatan dan daya ledak otot.

Latihan yang biasanya bisa dilakukan dengan peralatan di tempat latihan kebugaran ini bisa dilakukan di rumah dengan memanfaatkan perabotan rumah, seperti kursi, sofa, meja, dan tempat tidur. Bahkan, dinding pun bisa dipakai untuk melatih kekuatan otot, seperti untuk *wall push up*, yaitu *push up* sambil berdiri dengan dinding sebagai landasan untuk menggantikan lantai.

Selain berolahraga, mening-

katkan aktivitas fisik juga bisa dilakukan dengan mengurangi duduk. PDSKO menganjurkan setiap orang melakukan peregang statik dengan menahan selama 10-15 detik.

Tujuan olahraga

Michael, yang juga dokter atlet pelatnas bulu tangkis Indonesia, mengingatkan tentang tujuan berolahraga, yaitu sehat, rekreasi, dan prestasi. Target sehat akan tercapai tak hanya dengan parameter turunnya berat badan. Indikator lain di antaranya tekanan darah normal, kolesterol normal, dan kadar lemak turun.

Olahraga rekreasi dilakukan untuk mendapatkan kesenangan. Biasanya tidak dilakukan secara rutin, seperti bersepeda santai bersama keluarga pada akhir pekan.

Adapun olahraga prestasi adalah olahraga yang dilakukan dengan tujuan mencapai prestasi, seperti yang dilakukan atlet. "Pakaian olahraga, sepatu, peralatan, vitamin, atau aplikasi latihan dalam telepon pintar cenderung memiliki citra atlet. Padahal, bagi orang biasa, berolahraga bukanlah latihan seperti yang dilakukan atlet," ujar Michael.

Hal lain yang juga sangat penting dalam masa pandemi ini adalah menjaga pikiran dan emosi agar selalu positif. Melalui olahraga pula, kecemasan dapat menurun karena berolahraga bisa memunculkan hormon endorfin yang bisa memberikan energi positif.

(YULIA SAPTHIANI)

TRANSFER PEMAIN

Kane dan Sancho Jadi Dilema MU

MANCHESTER, RABU — Harry Kane dan Jadon Sancho adalah dua penyerang yang kini sedang dibidiki Manchester United. Namun, tim "Setan Merah" diprediksi tidak mampu membeli keduanya sekaligus dan harus memilih salah satu. Kejelian MU di bursa transfer pemain akan kembali diuji.

Sejak kepergian Romelu Lukaku ke Inter Milan jelang musim 2019-2020, MU sangat membutuhkan tambahan kekuatan di lini serang. Mereka perlu pemain lain lagi untuk mendukung Marcus Rashford dan Anthony Martial.

Awal tahun ini bisa menjadi contoh betapa Setan Merah sangat mendambakan seorang penyerang baru ketika Rashford cedera punggung sejak pertengahan Januari. Praktis MU hanya punya Martial dan penyerang muda seperti Mason Greenwood.

Manajer MU Ole Gunnar Solskjaer bisa sedikit lega ketika mendapat pinjaman penyerang dari Shanghai Greenland Shenhua, Odion Oghalo, pada bursa transfer Januari lalu. Namun, belum dapat dipastikan pemain Nigeria itu akan mendapat kontrak permanen.

"MU butuh seorang penyerang tengah. Mereka punya pemain menjanjikan seperti Greenwood, Rashford, dan Martial. Namun, mereka perlu pemain baru yang lebih kuat dan dewasa," ujar mantan pemain MU, Gary Neville, dikutip *Manchester Evening News*, Januari.

Angin segar berembus dari London ketika striker Tottenham Hotspur dan tim nasional Inggris Harry Kane mengatakan, ia tidak bisa terus bertahan jika Spurs tidak kunjung mendapat trofi. Kane telah menyumbang 181 gol bagi Spurs di semua kompetisi sejak 2014, tetapi belum pernah merasakan status juara.

Spurs musim ini pun tidak punya peluang lagi untuk merebut trofi. "Saya seorang pemain yang ambisius, saya ingin terus berkembang dan menjadi lebih bagus. Saya ingin menjadi pemain top, tetapi semua itu tergantung bagaimana kondisi tim," kata Kane.

Incarnasi lama

Kane telah diincar MU sejak 2015, tetapi tidak bisa dijangkau. "MU selepas era (manajer) Alex Ferguson mulai menurun,

sedangkan Spurs muncul sebagai langganan kompetisi Liga Champions," tulis ESPN.

Ketika bursa transfer pemain kembali dibuka, MU punya momentum terbaik untuk mendapatkan Kane. Namun, saat ini MU juga berpeluang mendapatkan penyerang sayap Borussia Dortmund, Jadon Sancho, yang masih berusia 20 tahun.

Sancho yang juga masa depan timnas Inggris menjadi buruan utama MU sejak lama. Meski masih muda, Sancho sudah menjadi mesin gol bagi Dortmund. Musim ini, ia sudah mengoleksi 17 gol di semua kompetisi, 14 gol di antaranya terjadi di Liga Jerman.

Masalah muncul ketika MU harus mengeluarkan lebih dari 200 juta euro (Rp 3,4 triliun) jika ingin mendapatkan kedua pemain tersebut sekaligus. MU harus memilih antara Kane yang lebih matang, tetapi kerap cedera atau Sancho yang butuh jam terbang, tetapi bisa menjadi investasi besar.

Krisis keuangan yang disebabkan pandemi Covid-19 turut memaksa klub besar seperti MU untuk bijaksana mengeluarkan uang. "Mereka harus me-



REUTERS/PHIL NOBLE

Pelatih kebugaran klub Manchester United, Kieran McKenna, bersorak, sementara Manajer MU Ole Gunnar Solskjaer (kiri) dan Manajer Manchester City Pep Guardiola memandang ke arah lapangan dalam laga derbi di Old Trafford, 8 Maret 2020.

milih, tidak bisa membeli Kane, Sancho, dan satu lagi bek tengah sekaligus," ujar pakar sepak bola Eropa, Julien Laurens, dikutip *Daily Express*.

Tambahan penyerang yang tepat membuat lini depan MU semakin tajam saat kompetisi

kembali bergulir. Mereka akan dimanjakan dua gelandang kreatif, Bruno Fernandes dan Paul Pogba. Fernandes, pahlawan baru MU, mengaku tidak sabar bisa bermain dengan Pogba yang tengah berjuang memulihkan cedera. (REUTERS/DEN)

Sri Asih Menabur Asa Baru dengan Macadamia

Hampir 30 tahun Sri Asih (48) menemani masyarakat, baik di dalam maupun luar kawasan hutan, di Malang Raya, Jawa Timur. Sebagai penyuluh kehutanan, tidak terhitung lagi jumlah komunitas warga yang telah ia dampingi terkait dengan upaya rehabilitasi lahan dan pemberdayaan.

Defri Werdiono

Pada Desember 2019, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menyerahkan penghargaan kepada sejumlah tokoh pada acara Gerakan Nasional Pemulihan Daerah Aliran Sungai 2019, di Kota Batu, Jawa Timur. Salah satu penerima penghargaan itu adalah Sri Asih yang tinggal di Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu.

Perempuan paruh baya itu menerima penghargaan atas jasanya sebagai penyuluh kehutanan yang aktif berkontribusi dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Selesai menerima penghargaan, Asih menunjukkan kepada Siti Nurbaya dan pejabat daerah yang hadir demplot bibit macadamia yang dibuat Kelompok Tani Hutan (KTH) Panderman, tempat Asih menjadi pembimbing teknis dan manajer.

Tanaman macadamia cukup dikenal di wilayah Jawa Timur bagian timur, seperti Kabupaten Bondowoso. Akan tetapi, di wilayah Kota Batu dan Kabupaten Malang, tanaman ini belum banyak dibudidayakan. Padahal, macadamia dinilai cocok untuk pemulihan lahan.

Tumbuhan yang memiliki kulit buah keras ini juga cocok dengan kondisi topografi Batu di dataran tinggi. Tanaman ini bisa tumbuh di ketinggian 800 meter di atas permukaan laut.

Keuntungan lainnya, vegetasi ini punya produktivitas dan nilai ekonomis tinggi. Satu pohon disebut mampu menghasilkan 20-25 kilogram (kg) kacang macadamia per tahun dan meningkat seiring bertambahnya usia. Harga kacang macadamia mentah Rp 180.000-Rp 220.000 per kg dan bisa naik menjadi Rp 450.000-Rp 600.000 per kg dalam bentuk olah.

"Saat ini, ada stok 7.500 batang bibit macadamia di tempat kami. Yang 6.000 batang milik kelompok, bantuan dari BPDAS (Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Brantas). Sementara 1.500 batang punya saya sendiri," ujar Asih saat dihubungi, Senin (13/4/2020).

Sebelumnya, Asih membagikan 1.000 bibit gratis kepada petani di Batu untuk uji coba. Menurut rencana, bibit macadamia yang masih tersisa akan dibagikan kepada petani secara cuma-cuma saat memasuki musim hujan akhir 2020.

Bibit-bibit itu dibagikan oleh Asih dalam rangka pengenalan kepada petani. Selain berpotensi menambah kesejahteraan petani, upaya ini juga diharapkan bisa membantu konservasi lahan. Saat ini, sebagian besar lahan di Batu dan sekitarnya didominasi lahan pertanian, khususnya sayur, dan minim tegakan.

"Harapannya, tanaman ini bisa diterima



KOMPAS/DEFRI WERDIONO

Sri Asih

Lahir: Lamongan, 17 Agustus 1972

Suami: Sugino

Anak: 3

Pendidikan:

- Universitas Islam Balitar, Bitar, Jawa Timur (S-1)
- Universitas Tribhuwana Tunggal, Malang, Jawa Timur (S-2)

Penghargaan: Penyuluh kehutanan yang aktif dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

mulihan lahan," tuturnya.

Meski bagi sebagian petani tanaman ini terbilang baru, Asih tak menemukan kendala saat membagikannya. Semua dilakukan tanpa paksaan dan selaras dengan kemauan petani, misalnya lokasi tanam di pinggir lahan sehingga tak menghalangi sinar matahari yang dibutuhkan sayuran.

"Meski gratis, kami tidak serta-merta langsung menanam. Yang penting, petani mau menerima dulu sambil melihat perkembangan," ucapnya.

Asih dan KTH Panderman mulai mengembangkan bibit macadamia sejak 2019. Selain mengembangkan secara berkelompok, Asih juga mengembankan bibit sendiri. Untuk membuat bibit swadaya, ia me-

masyarakat tanpa mengganggu usaha mereka dalam menanam macadamia. Asih dan KTH Panderman mulai mengembangkan bibit macadamia sejak 2019. Selain mengembangkan secara berkelompok, Asih juga mengembankan bibit sendiri. Untuk membuat bibit swadaya, ia me-

manfaatkan buah macadamia dari hasil panen tetangga yang jumlahnya masih sangat terbatas.

"Untuk bibit macadamia, kami mengembangkan sejak tahun lalu. Kalau bibit tanaman lain, seperti durian, nangka, dan avokad, saya sudah memulai sejak 2006. Bibit-bibit itu juga saya berikan cuma-cuma," kata perempuan yang aktif di sejumlah lembaga di bidang lingkungan dan hutan ini.

Menurut Asih, hal yang ia lakukan tak menganggu kinerjanya sebagai aparatur sipil negara. Bibit lainnya yang berasal dari pemerintah juga tetap disalurkan sesuai sasaran dan lokasi yang telah ditentukan.

Kegiatan sosial

Keterlibatan Asih terhadap upaya rehabilitasi lahan dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan berlangsung sejak 1992. Tahun 1992-2000, ia masih berstatus tenaga honoror dengan insentif Rp 50.000-Rp 100.000 per bulan. Terkadang insentifnya molor sampai tiga bulan. Baru tahun 2000, ia menjadi PNS di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur.

Selama masa itu, ibu tiga anak ini lebih banyak berkecimpung pada bidang sosial. Kegiatannya beraneka ragam, mulai dari mengembangkan bibit tanaman hingga membuat aneka demplot percontohan, seperti demplot tanaman porang, jahe, dan serai merah, hingga budidaya lebah madu dan sengon.

Ia pun kerap merogoh kocek sendiri selama bertugas. "Namun, saya tidak serta-merta menggunakan dana pribadi. Karena terbatas, saya punya anak yang harus dibiayai. Jadi, saya juga menjalin kerja sama dengan mitra perusahaan dalam bentuk CSR (tanggung jawab sosial perusahaan)," katanya.

Asih mencontohkan, jika warga punya lahan kosong, dia akan menghubungkan ke perusahaan untuk menjalin kerja sama CSR. Begitu pula soal pemasaran, dia berusaha mencari solusi pemasaran.

Asih juga aktif mendampingi kelompok tani pada kegiatan penghijauan dan pembuatan

dam penahan menggunakan beronjong yang menjadi program Perum Jasa Tirta I sampai sekarang.

"Dari situ, ada keterampilan yang didapat warga. Mereka bisa menganyam kawat beronjong sehingga bisa menjadi pekerjaan tambahan jika sewaktu-waktu ada yang membutuhkan," ujarnya.

Selama proses pendampingan, Asih selalu menekankan tiga hal kepada komunitas yang didampingin, yakni bagaimana tindakan yang dilakukan itu bermanfaat untuk lingkungan, memberdayakan masyarakat lain di lingkungan tersebut, dan meningkatkan perekonomian diri mereka sendiri.

Apa yang dilakukan Asih tak terbatas hanya kepada warga dan komunitas peduli lingkungan. Tidak jarang ada siswa atau mahasiswa datang ke rumahnya untuk melihat data, meminta bibit untuk penanaman pohon, hingga konsultasi skripsi. Sebaliknya, Asih juga tidak alergi mendekati ke kampus sambil mengajak untuk melakukan penghijauan.

Menurut alumnus Magister Ilmu Pertanian (S-2) Universitas Tribhuwana Tunggal, Malang, ini, komunitas masyarakat yang peduli lingkungan sebenarnya banyak, tetapi mereka masih butuh pihak lain untuk mendapat dukungan. Begitu pula dengan pemulihan lahan tak bisa dilakukan dengan hanya menanam saja, setelah itu ditinggal. Semua harus diikuti dengan perawatan.

"Berasa banyak lahan yang belum tertanami, sedangkan oksigen berasal dari situ. Sementara untuk menanam butuh waktu. Tak bisa hanya sekedar menanam, tetapi juga harus merawat. Karena itu, saya mengubah slogan dari 'Gerakan Menanam' menjadi 'Gerakan Perawatan Pohon' yang aksinya lebih luas," katanya.

Asih sendiri kini punya keinginan bisa mengubah limbah plastik menjadi *paving block* guna mengurangi sampah plastik yang kian banyak. Ia pun berharap ada pihak yang bisa memberikan bantuan peralatan untuk itu.

NAMA & PERISTIWA



KOMPAS/STEFANUS OSA TRIYATNA

JAY SUBIYAKTO

Tetap Optimis

Pembatasan sosial akibat Covid-19 selama beberapa minggu terakhir tidak membuat Jay Subiyakto (59) berkecil hati. Laki-laki yang berprofesi sebagai sutradara ini justru melihat situasi saat ini dengan optimis.

"Selama pembatasan sosial saya melakukan banyak kegiatan positif. Saya jadi memiliki lebih banyak waktu untuk refleksi dan introspeksi diri. Dan, sebelumnya saya sudah membeli buku, jadi sekarang punya banyak waktu untuk membaca," kata Jay saat dihubungi di Jakarta, Kamis (9/4/2020).

Menurut Jay, dirinya adalah orang yang memiliki banyak profesi karena terlibat dalam dunia penyutradaraan, fotografi, dan konser musik. Oleh karena itu, ia kini juga menghabiskan banyak waktunya di rumah untuk mencari ide kreatif dan merancang proyek baru, seperti untuk desain panggung dan film dokumenter.

"Dalam hidup saya, baru sekali ini mengalami isolasi di seluruh dunia. Orang tua kita mungkin *gak* mengalaminya, terakhir pada 1918 ketika pandemi flu menyerang dunia. Pengalaman ini buat saya unik karena bisa merasakan perang dunia ketiga yang musuhnya *gak* kelihatan," tuturnya.

Di tengah kesibukan di rumah itu, Jay mendapat kabar bahagia. Film dokumenternya, *Banda: The Dark Forgotten Trail* (2017), akan tayang di Netflix mulai 31 Maret 2020 sehingga dapat ditonton masyarakat luas di rumah masing-masing.

(LSA)

CANDRA MALIK

Singel Menyambut Ramadhan

Untuk menyambut bulan suci Ramadhan, musikus sufi Candra Malik (42) merilis singel terbarunya, "Shalawat Kinanthi". Candra berharap, melalui singel yang diluncurkan bertepatan dengan malam Nisfu Syaaban 1441 Hijrah, yaitu pada 8 April 2020, dirinya dapat mengajak publik untuk selalu berserah diri kepada Tuhan.

"Dengan bershalawat kepada Nabi SAW, dengan perantaraan Beliau, semoga kita dianugerahi keselamatan dari mara bahaya, baik di dunia maupun akhirat. Saya rasa lagu ini tepat dengan momentum wabah virus Covid-19 yang mengingatkan umat manusia untuk memohon pertolongan-Nya," kata Candra. Video musik "Shalawat Kinanthi" diluncurkan pada Kamis (9/4/2020), di kanal Youtube.

Menurut Candra, "Shalawat Kinanthi" diproduksi bersama oleh Omah Muli Production bekerja sama dengan Forum Komunikasi Pondok Pesantren Indonesia. Lagu tersebut digarap di Omexo Studio, Banyuwangi, Jawa Timur, bersama dua pemusik setempat, Emilio Sing dan Nanda Thegeng. Sementara video digarap di C-mahi, Jawa Barat. "Meski ada kebijakan pembatasan sosial berskala besar, yang sempat juga memengaruhi proses kreatif, kami tidak mau menyerah," ujar Candra.

Di lagu ini, Candra memilih menggunakan bahasa Jawa untuk mewujudkan impian terpendamnya. Ia tidak khawatir akan muncul kendala bahasa bagi penikmat karya-karyanya. "Saya pilih diksi yang saya harap bisa membantu kawan-kawan yang tidak berbahasa Jawa. Lebih dari itu, semoga ajakan untuk selalu bershalawat bisa menyentuh hati," kata Candra. (*DOE)



ARSIP PRIBADI



PROPERTI

APARTEMEN

Apt.Kusuma Chandra,SCBD,3BR 149m²,turun harga lagi,RWCBD Elias 0816960505/021-3925588

Ciptura World 2, L.75, 2KM,2KM FF,nyaman,bagus,sgs, RWPrive Aldia 08128776761/27889488

LaVieApt,Kningn2+1, 136m²,UF stgs,akses mdh, 7M,RWPrive Aldia 08128776761/27889488

RUANG USAHA

DIJUAL

Agung Perkasa 9 blok K Sunter Podomoro.Strgs Gudang/Knt.2 unit.02640m².Toto.0817682805

BandenganRy Ruko gandeng 4.5 Int*9x16*hrq bwh psr*Franses: 087889805147*RW-Commercial

Dijual cpt Kios Pasar Modern Bintaro 3x3m²,ck u/ush,ramal, HGB sd 2037.hub:082114120593

Buncit Raya,Mampang-2.635m² cck kantor-harga menarik-3lantai lok.stgs*Christie 082125642480 bngnan trwt-RayWhiteSenopati

Gedung Ji Mampang Prptn Raya 4Lt, LT.1830/LB.4815 - RWPrive Sylvie 082110611160 / 3925588

Hotel Ibis Tanah Abang, 7 LT 145km², L. 1.283/4.528, RWPrive Aldia 08128776761/27889488

Jual cepat BU kantor minimalis 2lt di kebayoran lama LT525/LB634 dibangun thn 2012 harga 7,5M hub 08111757557

Jual cpt ruko di BSD-Cilenggang SHM,lt/lb.110/162, cck u/usha &kntrgudg,bgs,jln ramal, akses 5mnt dr tol,ltst 2200W,hrq.1.4M 082114120593 / 081513413628

Klapa nunggal, Ek.pabrik mebel +gudang+off siap pakai*1.6H* Franses081380745234RWComm

Metro Pondok Indah, 1347/1500 6KT,6KM.stgs,asri,bgs,RWPrive Aldia 08128776761/27889488

OH,Dijual Permata Hijau 370m² Rumah Bagus, SHM, Termurah! RWBarito7241333-0813 1100 4810

OH,KbyBaruBulungn873m,super murah,hrqa jauh di bawah Pasar RWBarito7241333-0813 1100 4810

OH,Pondok Indah,LT232m,Super murah, mendekati harga NJOP RWBarito7241333-0813 1100 4810

Patra Kuningan IX, LT. 1674m tenang, murah, katak, RWPrive Aldia 08128776761/27889488

PI Ji Alam Elok blkg PIM 2 It. 200m Tmurah 5.4M Time 2 Buy! Pst unting*ERA 081213002033

Rmh 2LT ex aset bank Kemang Selatan thn 1250m K.renang HM 12lt/m bisa kpr 0816972688

Simprug golf, LT601/LB500, 5KT 4KM, tenang, Rp 35M, RW Prive Aldia 08128776761/27889488

Rmh baru 3lt klp gading boule vard, 6x15, lb 200m²,granit tile, mewah, hdp utara 081776122



OTOMOTIF

MOBIL DICARI

A-A abad21 Akan Beli Mobil thn 1997-2019 Hub : Mas Tio : 0812.890.7676 / 0877.8186.1225.TGR

MOBIL DIJUAL

740LI th 2011 hitam km 38rb 581 executive 15 putih km 25rb 0811.970214-08.7878.555255

BMW

Clearance Sale Big disc Nissan Livina & Terra. Bunga 0%, hub Nissan MT Haryana:0218564760

NISSAN

Clearance Sale Big disc Nissan Livina & Terra. Bunga 0%, hub Nissan MT Haryana:0218564760

HONDA

Accord, Brio, BRV, Civic, CRV, Mobilio, Jazz, HRV, Bunga 0% - DP 0%, Clearance Sale Honda Mugen Tpt 7973000,0818931972

Big Promo Spesial Lebaran semua type Honda R.stock dp ringan krd s/d 6 thn Honda Permata Serpong 021-29000123

MERCEDES

Mercc C200 avg th 2016 Putih, electric seat, bagus, msn halus, ada serv record. 08787989572.

New E-250 dsl pk15 km sdkt 525jt, New S-400 AMG pk16 1,3M 0816972688, 08881351818

TOYOTA

Alphard*12*Prado*08*Camry*11* Rush*15 + Yaris*12 Mls istw @oto568.com # 081 680 1214

Camry pk15 hibrid 270jt, Rush 3brs pk15 150jt, Fortuner pk18 400jt 0816972688, 08881351818

Landcruiser 4.5 VX-R 2020 solar hitam ATPM, Jalan 500 htm 0816529896,08120000984

New Avanza 1.3E AT, Th 2015, Putih, Km 36k, Tangan-1, 110jt, JKT. 0811-816-186.

Toyota altis V 1.8AT 2016 hitam an Perusahaan pajak bln Maret hub 08129367662/3855088



RAGAM

KARTU KREDIT

Bantu Tutup CC/KTA/Pinjmn OL Reschedule/disc-80%(pemutihan) Legali Senayan 0812 8783 7798

PERHIASAN

Beli Arloji & Berlian dgr hrg tgg rolex dll.King,Arloji,0817115416 j.l.kyai maja 7C dcn psr mayestik

Beli Jam Mewah Bekas : Rolex, Patek Philippe,dll. Siap Dtnk Ke tnpat.Victor Wei.081310000491

DAERAH-DAERAH

BANDUNG

Apartemen GW 3A8, JL. A.Yani Bandung, 3 KT, 2 K Mandi Hubungi : 081369040485

Rumah JL. Cibunungy Permai V NO. 12 A Bandung, 4 KT, 1 K Pemb, 3 K Mandi. 081369040485

DENPASAR

Djl Tnh SHM 69.22are ada Bungalow 22 Kmr,Fas,Komplit,Jl By Pass Sanur,Bali.Bs byr 2th Tanpa Bunga Hub08135309090

Vila Super Murah,lok Elit Ung asan dkt GWK,omlnia,spmarkit pepito.shm/imb,LT350/200,3BR, S.pool,ckk WFH, hrg psr 4,8m jual 2,8M,bs KPR 081398806460

Hilang BPKK No.0-03300861, MH1K9117GK027927,KC91E10 30434, D-3188-AAK, Tedy S

Hilang BPKK Mtr No: N05840308 NoPol:E6959UH an.Solehudin. Ds Pasir, Kec.Palasah, Majalengka

Hilang BPKK NoC-2744581-H NoPol D-6764-VAR a/n:Zaeni Ahmad,SE Ttd:Aep Juanda

Hilang BPKK No:06850760 No Pol:D-6865-IV an.Raindy Rinaldi ansyah Ttd.Raindy Rinaldiansyah

Hilang BPKK Mtr No: M13841719 No Pol:E2689VQ AnnisaYuanaZakiah Ds.Pasir Kec.Palasah Majalengka

Hilang BPKK No.0824817 NoPol D-1865-RZ a/n:Hj.Yayat Suryati S Ttd:Hj.Yayat Suryati S SOS

Hilang BPKK Mtr No: M13841719 No Pol:E2689VQ AnnisaYuanaZakiah Ds.Pasir Kec.Palasah Majalengka

Hilang BPKK No.0824817 NoPol D-1865-RZ a/n:Hj.Yayat Suryati S Ttd:Hj.Yayat Suryati S SOS

Hilang BPKK Mtr No: M13841719 No Pol:E2689VQ AnnisaYuanaZakiah Ds.Pasir Kec.Palasah Majalengka

Hilang BPKK No.0824817 NoPol D-1865-RZ a/n:Hj.Yayat Suryati S Ttd:Hj.Yayat Suryati S SOS

Hilang BPKK Mtr No: M13841719 No Pol:E2689VQ AnnisaYuanaZakiah Ds.Pasir Kec.Palasah Majalengka

Hilang BPKK No.0824817 NoPol D-1865-RZ a/n:Hj.Yayat Suryati S Ttd:Hj.Yayat Suryati S SOS

Hilang BPKK Mtr No: M13841719 No Pol:E2689VQ AnnisaYuanaZakiah Ds.Pasir Kec.Palasah Majalengka

Hilang BPKK No.0824817 NoPol D-1865-RZ a/n:Hj.Yayat Suryati S Ttd:Hj.Yayat Suryati S SOS

Hilang BPKK No.06401133 NoPol D-2154-AAD a/n:Siti Maryati Ttd:Dandi Nugraha

Hilang BPKK No.R.380534-H NoPol D-1644-WH a/n:Adeng Nurdin Ttd:Adeng Nurdin

Hilang BPKK Mtr No: M13841719 No Pol:E2689VQ AnnisaYuanaZakiah Ds.Pasir Kec.Palasah Majalengka

Hilang BPKK No.0824817 NoPol D-1865-RZ a/n:Hj.Yayat Suryati S Ttd:Hj.Yayat Suryati S SOS

Hilang BPKK Mtr No: M13841719 No Pol:E2689VQ AnnisaYuanaZakiah Ds.Pasir Kec.Palasah Majalengka

Hilang BPKK No.0824817 NoPol D-1865-RZ a/n:Hj.Yayat Suryati S Ttd:Hj.Yayat Suryati S SOS

Hilang BPKK Mtr No: M13841719 No Pol:E2689VQ AnnisaYuanaZakiah Ds.Pasir Kec.Palasah Majalengka

Hilang BPKK No.0824817 NoPol D-1865-RZ a/n:Hj.Yayat Suryati S Ttd:Hj.Yayat Suryati S SOS

Hilang BPKK Mtr No: M13841719 No Pol:E2689VQ AnnisaYuanaZakiah Ds.Pasir Kec.Palasah Majalengka

Hilang BPKK No.0824817 NoPol D-1865-RZ a/n:Hj.Yayat Suryati S Ttd:Hj.Yayat Suryati S SOS

Hilang BPKK Mtr No: M13841719 No Pol:E2689VQ AnnisaYuanaZakiah Ds.Pasir Kec.Palasah Majalengka

Hilang BPKK No.0824817 NoPol D-1865-RZ a/n:Hj.Yayat Suryati S Ttd:Hj.Yayat Suryati S SOS

Hilang BPKK Mtr No: M13841719 No Pol:E2689VQ AnnisaYuanaZakiah Ds.Pasir Kec.Palasah Majalengka

Hilang BPKK No.0824817 NoPol D-1865-RZ a/n:Hj.Yayat Suryati S Ttd:Hj.Yayat Suryati S SOS

Hilang BPKK Mtr No: M13841719 No Pol:E2689VQ AnnisaYuanaZakiah Ds.Pasir Kec.Palasah Majalengka

Jl.Kesehatan No.37A, LT.445 Lb.156, 5 Lantai, SHM, RWPrive Aldia 08128776761/27889488

Jl.Plaju Menteng, LT700/Lb2000 8bdr, komersil,dkk MRT, RW CBD Susi 081310384009 / 3925588

Bangka XIC, LT. 1068 / LB. 300 kotak.pool, nego smp deal, RWP Aldia 08128776761/27889488

Brawijaya 389=17.5M=Simprug Golf 640=25M-Ciasesm 340=19M Wijaya 3 575=35M-0818208848

Hangjebat,KbyBaru,htttngtanah Lt 596m,SHM,sgtrs,jual cpt,BU RWBarito7241333-08788989466

Jl.Mahakam Raya, 514/267m² bisa 8 lantai, komersil, RW CBD Susi 081310384009 / 3925588

Jl.Wijaya 1,LT.691m²-LB.500m² Tersewa, strategis, RWPrive Aldia 08128776761/27889488

Kemang-Semi Apt-LB350m²-3lt renovasi full-hrg&layout mnarik jl lebar*Christie 082125642480 TanahKotak-RayWhite Senopati

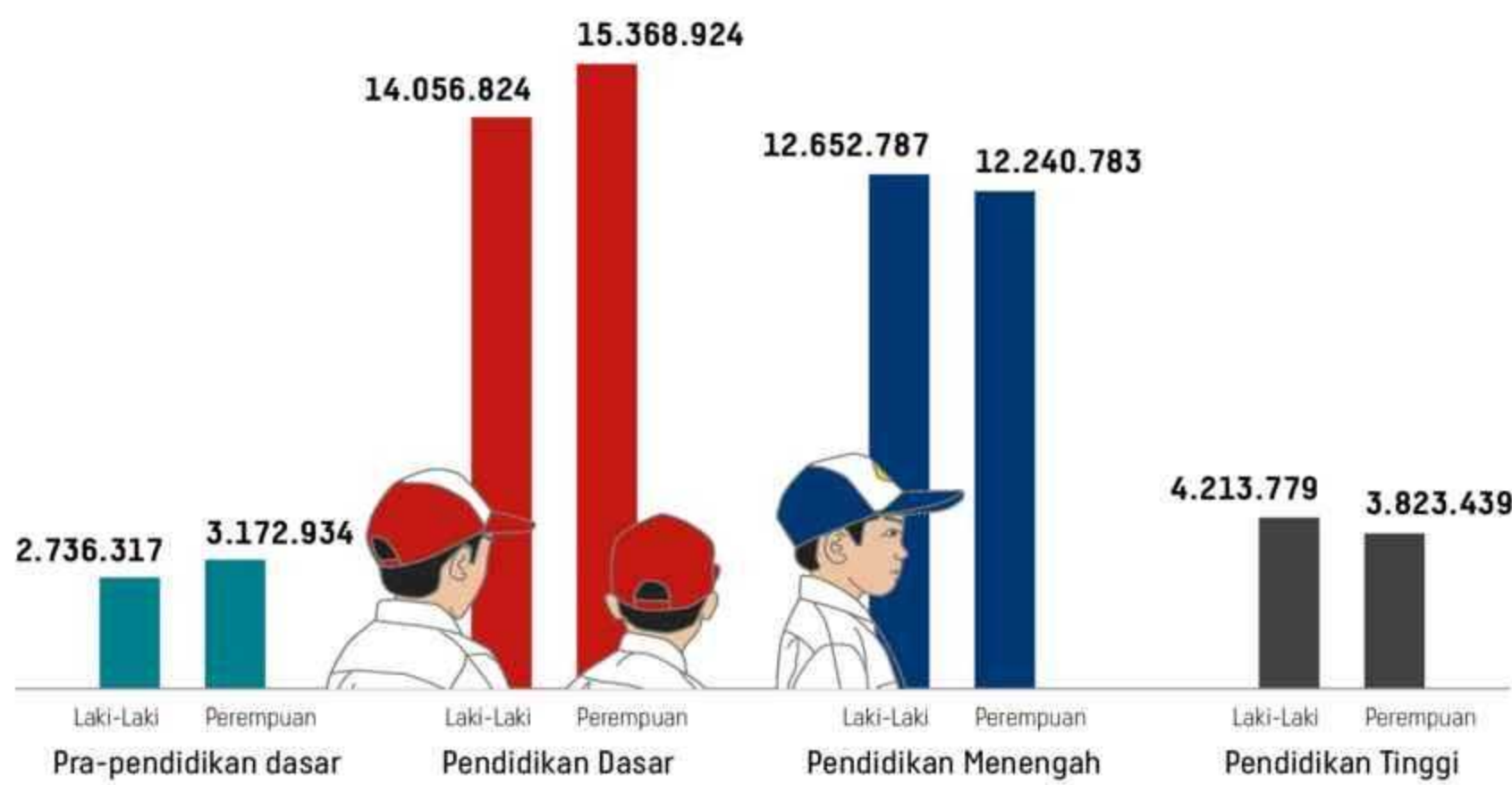
OH, Permata Hijau, LT. 1213m² rmh bgs

Menanti Manggis Berjaya di "Rumah Sendiri"

HLM C

JENDELA

Jumlah Pelajar Terdampak Kebijakan Belajar dari Rumah di Indonesia

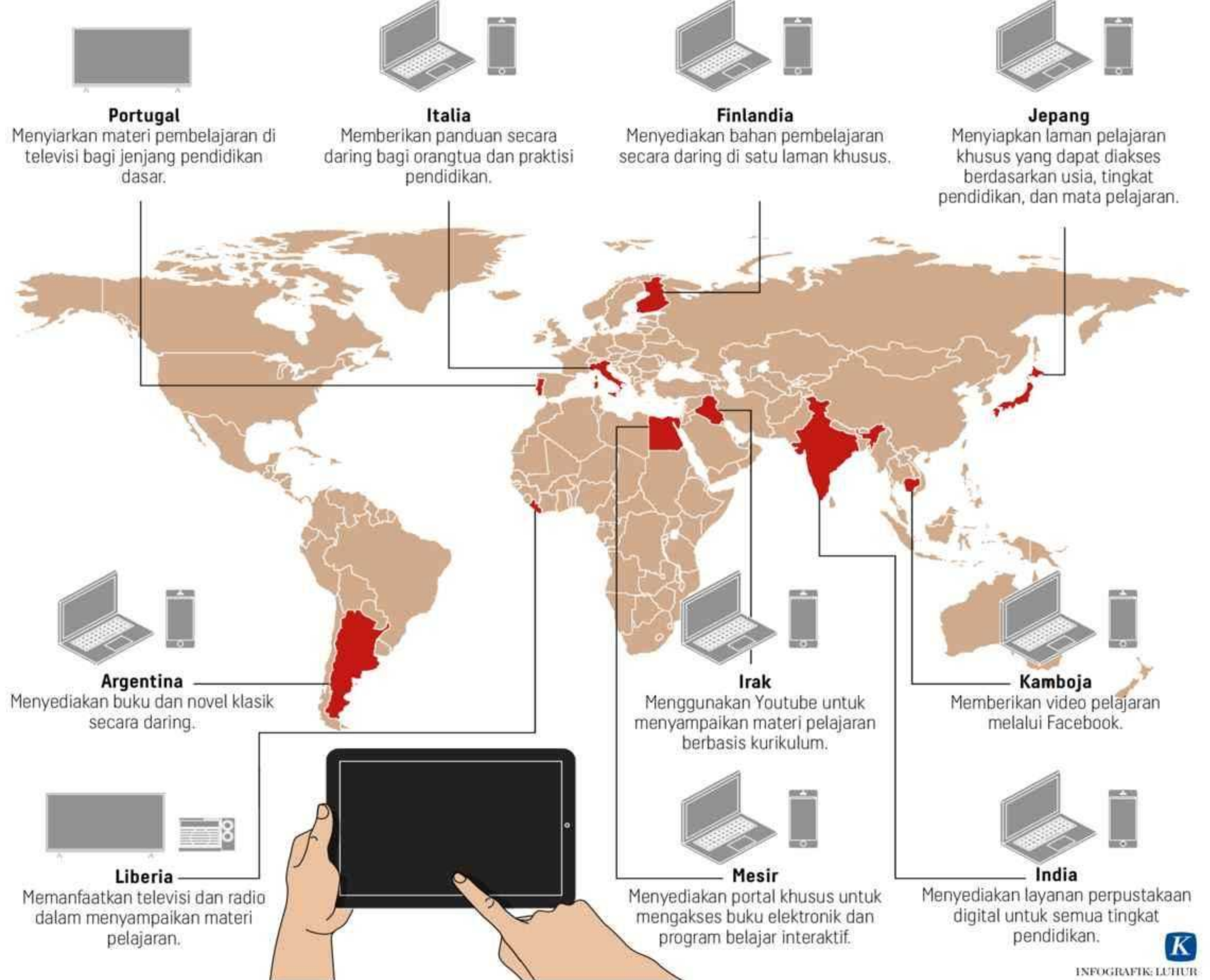


Program Tayangan Belajar dari Rumah yang Diselenggarakan Kemendikbud dan TVRI*



Sumber: UNESCO, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Disarikan oleh Litbang Kompas/DDY

Penunjang Belajar dari Rumah di Sejumlah Negara di Tengah Pandemi Covid-19



MERDEKA BELAJAR DARI RUMAH

Kondisi mendesak, suka-tidak suka, selalu menghasilkan perubahan. Bukan hal yang mustahil, proses belajar-mengajar di Indonesia di masa mendatang akan berubah, andai berhasil menemukan sentuhan tepat dalam proses belajar jarak jauh, yang kini dilakukan di tengah pandemi Covid-19.

Dedy Afrianto

Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) mencatat, sekitar 1,5 miliar pelajar di 191 negara terdampak kebijakan belajar dari rumah. Jumlah ini setara dengan 91,3 persen dari total pelajar di dunia dari jenjang pendidikan pradasar hingga pendidikan tinggi. Kondisi serupa juga terjadi pada semua negara di Asia Tenggara. Singapura, misalnya, 600.587 pelajar tidak lagi dapat melakukan pembelajaran tatap muka seiring bertambahnya kasus positif Covid-19. Kondisi serupa juga dialami sekitar 79 juta pelajar di Malaysia.

Di Indonesia, UNESCO memprediksi sekitar 68,2 juta pelajar dari berbagai jenjang pendidikan kini harus belajar dari rumah. Banyaknya jumlah pelajar yang terdampak tidak terlepas dari semakin meluasnya kasus positif Covid-19 yang kini telah tersebar pada seluruh provinsi.

Bagi Indonesia, ini kali pertama sepanjang usia kemerdekaan, pendidikan formal dilakukan dari rumah secara bersamaan pada seluruh jenjang pendidikan dalam waktu cukup lama. Sebelumnya, tindakan serupa hanya dilakukan secara parsial akibat bencana alam atau bencana sosial dalam jangka pendek. Itu pun hanya di wilayah tertentu di mana ada musibah.

Kesempatan ini tentu menjadi saat yang tepat untuk mempraktikkan skema pembelajaran jarak jauh berbasis pengembangan diri pelajar dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Para pelajar dan guru dapat memanfaatkan kesempatan ini guna mencoba berbagai alternatif yang tepat sehingga pembelajaran jarak jauh efektif dilakukan. Kuncinya, siswa tetap

dapat mengembangkan diri sesuai minat dan bakat yang dimiliki.

Akses yang utama

UNESCO memberikan sejumlah rumusan yang dapat menjadi indikator keberhasilan proses belajar dan mengajar dari rumah. Akses digital, pembelajaran inklusif, hingga sinergi keluarga dengan sekolah menjadi beberapa faktor di antaranya.

Akses digital menjadi infrastruktur utama yang harus dimiliki tenaga pengajar dan pelajar. Dalam kondisi saat ini, para pelajar dan tenaga pengajar dituntut adaptif untuk keluar dari batas pendidikan konvensional menuju lingkungan digital.

Pada satu sisi, infrastruktur digital tidak sepenuhnya menjadi kendala bagi sebagian pelajar di perkotaan. Akses internet, ketersediaan perangkat, hingga kecakapan penggunaan fasilitas digital, menjadi modal awal untuk menerapkan kebebasan belajar bagi siswa dari rumah.

Kegiatan belajar dan mengajar menggunakan konferensi video, aplikasi pesan berbasis internet, hingga beberapa laman daring yang dilakukan para pelajar, adalah wujud konkret dari sikap adaptif para pelajar dan tenaga pengajar.

Belum semua siap

Di sisi lain, belum semua pelajar dan tenaga pengajar siap menggunakan skema belajar jarak jauh. Salah satu faktor utamanya adalah akses internet yang terbatas. Menurut catatan Kementerian Komunikasi dan Informatika, hingga April 2019, sekitar 24.000 desa belum tersentuh internet. Inilah salah satu bagian kesenjangan digital yang menjadi hambatan pelaksanaan belajar dari rumah.

Selain itu, kesenjangan pembelajaran digital antardaerah juga turut ditentukan oleh kesiapan tenaga pengajar. Keluhan dari pelajar di media sosial tentang banyaknya tugas sekolah yang diberikan tentu menjadi lampu kuning dalam proses ini.

Dalam proses belajar dan mengajar jarak jauh, guru tak hanya berperan dalam memberikan tugas kepada para pelajar, tetapi memberikan penjelasan, hingga menjaga kondisi psikis para pelajar, demi adaptasi dengan lingkungan belajar baru.

Antisipasi kesenjangan digital dan kesiapan tenaga pengajar perlu mendapat perhatian, mengingat ini jalan untuk menuju pendidikan inklusif. Meski belajar dari rumah, hak para pelajar untuk memperoleh akses pendidikan secara merata harus tetap menjadi jaminan.

Indikator selanjutnya yang turut menentukan keberhasilan belajar dari rumah adalah komunikasi. UNESCO memperingatkan pentingnya komunikasi pihak sekolah dengan keluarga dalam menjalankan program belajar dari rumah.

Ketika epidemi ebola melanda Afrika, sekitar 5 juta anak-anak terdampak kebijakan penutupan sekolah. Namun, saat aktivitas sekolah berangsur normal lagi, tidak semua pelajar yang diliburkan kembali mengenyam pendidikan.

Sebagian di antaranya harus putus sekolah akibat faktor ekonomi, sedangkan sebagian lainnya tidak bersekolah lagi karena menikah di usia dini. Inilah alasan diperlukannya komunikasi yang intensif antara sekolah dan orangtua untuk memastikan keberlangsungan pendidikan para pelajar di tengah pandemi.

Upaya alternatif

Selain akses dan komunikasi, langkah alternatif perlu dilakukan untuk memberikan kenyamanan bagi para pelajar saat belajar di rumah. Memanfaatkan media yang tengah tren saat ini, seperti Youtube, Instagram, atau media digital lainnya, adalah langkah yang bisa dilakukan.

Menurut catatan UNESCO, hingga 15 April, lebih dari 100 negara di dunia telah menerapkan proses belajar-mengajar melalui media alternatif. Di Benua Eropa, Finlandia salah satunya. Melalui portal daring yang disiapkan secara khusus, kegiatan belajar dapat dilakukan oleh pelajar dengan bimbingan tenaga pengajar dan keluarga.

Selain portal daring, sejumlah negara juga menggunakan Youtube untuk memberikan materi pembelajaran dalam bentuk video. Qatar, Irak, Yaman, hingga Ukraina adalah beberapa negara yang telah menerapkannya.

Facebook juga menjadi solusi alternatif dalam melakukan kegiatan belajar dan mengajar. Kamboja, Timor Leste, hingga Romania menjadi sebagian negara yang memutuskan untuk menggunakan Facebook dalam memberikan video yang berisi materi pelajaran.

Selain video, buku pelajaran juga dapat diunduh secara gratis oleh para pelajar pada beberapa negara. Bahkan, Argentina turut memberikan akses novel klasik sebagai fasilitas yang dapat dinikmati pelajar saat belajar dari rumah.

Kebijakan alternatif lainnya dilakukan oleh Liberia dengan memberikan materi pelajaran melalui radio dan televisi. Langkah ini dapat menjadi solusi bagi pelajar yang kesulitan mengakses bahan pelajaran secara daring.

Di Indonesia, kebijakan alternatif juga telah dilakukan untuk menunjang kegiatan belajar dari rumah. Pada tingkat pendidikan pradasar, dasar, dan menengah, pemerintah telah menyediakan laman khusus melalui portal Rumah Belajar yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran jarak jauh.

Menurut catatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hingga kini terdapat 249.810 guru dan 617.237 siswa yang telah memanfaatkan layanan belajar berbasis digital ini.

Program lainnya adalah fasilitas belajar melalui televisi yang baru dirilis Kemendikbud bersama TVRI. Sejak 13 April lalu, pelajar di Indonesia dapat mengikuti materi pelajaran sesuai jadwal tayang yang ditetapkan. Peserta pendidikan anak usia dini (PAUD), misalnya, dapat mengikuti proses belajar melalui siaran sejak pukul 08.00 hingga pukul 08.30.

Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, program yang sama juga disediakan sejak pukul 08.30 hingga pukul 14.30. Sementara bagi orangtua dan guru, program pengasuhan dan pendidikan anak juga dapat diikuti menjelang sore hari.

Jika dimanfaatkan secara optimal, sejumlah langkah alternatif ini dapat menjadi gerbang menuju reformasi pendidikan di masa yang akan datang. Bisa jadi, pembelajaran jarak jauh kelak akan menjadi pilihan utama dari sistem pendidikan Indonesia jika semua fasilitas telah disiapkan. (LITBANG KOMPAS)

Dalam proses belajar dan mengajar jarak jauh, guru tak hanya berperan dalam memberikan tugas kepada para pelajar, tetapi memberikan penjelasan, hingga menjaga kondisi psikis para pelajar, demi adaptasi dengan lingkungan belajar baru.

CHINA RENGKUH DUNIA VIA "DIPLOMASI KORONA"

Di tengah pandemi virus korona tipe baru saat ini, China boleh jadi negara yang memantik rasa kesal, tetapi juga dirindukan. Rasa kesal itu terkait posisinya sebagai asal munculnya wabah yang membuat kalang kabut dunia. Namun, bantuan negara itu juga dirindukan untuk menangani Covid-19. Ketika negara-negara kelimpungan akibat virus itu, China hadir menggelontorkan bantuannya.

Mh Samsul Hadi

"Terima kasih, Saudara Xi," demikian tulisan di sejumlah papan reklame bergambar foto wajah Presiden China Xi Jinping di beberapa sudut ibu kota Belgrade, Serbia, beberapa hari terakhir ini. Bulan Maret lalu, saat enam tenaga profesional medis dari China menapak tangga turun pesawat Air Serbia di Belgrade, karpet merah terbentang di landasan bandara. Enam tenaga ahli medis China itu diterima bak tamu kehormatan, disambut langsung oleh Presiden Serbia Aleksandar Vucic dan sejumlah anggota kabinetnya di bandara.

Serbia, salah satu negara mitra dekat Beijing di Eropa, merupakan salah satu penerima bantuan China dalam menangulangi wabah Covid-19. Deretan negara penerima bantuan atau produk perlengkapan medis dari "Negeri Tirai Bambu" itu bertebaran di seluruh kawasan, mulai dari Asia, Afrika, Eropa, dan hingga Amerika Serikat. Selain Serbia, negara-negara itu, antara lain, Kamboja, Laos, Pakistan, Iran, Irak, Aljazair, Etiopia, Italia, Venezuela, Argentina, Ekuador, Chile, dan Meksiko.

Sejumlah negara Uni Eropa (UE) juga menerima bantuan China, antara lain Austria, Belgia, Perancis, Hongaria, Belanda, dan Spanyol. "Terbukti, tanpa Anda, Eropa nyaris tidak bisa mempertahankan diri sendiri," ujar Vucic kepada Duta Besar China untuk Serbia.

Indonesia juga merupakan salah satu penerima bantuan dari China. Seperti dirilis Kedutaan Besar China di Jakarta melalui halaman Facebook-nya, Beijing pada 28 Maret lalu memasok bantuan peralatan medis, seperti alat tes korona, masker N95, masker bedah, pakaian pelindung medis, dan ventilator portabel. Pada 2 April lalu, seperti dilansir laman Kementerian Luar Negeri China, Presiden Xi berbicara melalui telepon dengan Presiden Joko Widodo.

"Saya yakin, di bawah kepemimpinan Anda, Indonesia pada akhirnya bakal mampu mengalahkan wabah ini," kata Xi saat itu. "Indonesia berharap untuk memperdalam kerja sama dan hubungan dengan China," ujar Presiden Jokowi. Pada saat awal China mulai menghadapi wabah ini, Indonesia juga mengirim

Pekerja mengeluarkan barang dari pesawat kargo Finnair yang tiba dari China, Rabu (15/4/2020), di Bandara Helsinki, Finlandia. Pesawat ini mengangkut perlengkapan medis yang dibutuhkan dalam memerangi Covid-19.

bantuan ke sana.

Bantuan donasi atau penjualan alat-alat perlengkapan medis dari China itu menjangkau sekitar 90 negara, termasuk AS. Badan Kerja Sama Pembangunan Internasional China juga menyebutkan, sejumlah negara dan lembaga internasional menjalin komunikasi lewat konferensi video untuk mengetahui cara China menangani pandemi Covid-19. Maklum, sejak pertengahan Maret, China mulai mengendalikan persebaran wabah. Pada 8 April lalu, isolasi Wuhan, kota episentrum penyebaran wabah, juga telah dibuka.

Selain berupa perlengkapan medis dan alat-alat terkait pencegahan penularan Covid-19, bantuan dari China itu berupa pengiriman tim medis dan tenaga profesional yang memberi arahan dan masukan tentang penanganan wabah. Mereka, misalnya, memberikan saran kepada negara-negara penerima agar membangun rumah sakit-rumah sakit darurat, menerapkan karantina atau isolasi warga, hingga mengeluarkan pembatasan kedatangan warga dari luar.

Atas saran dari China, Serbia mulai menegakkan wabah yang mengalami gejala ringan agar wabah tidak menyebar. Belgrade juga mengarahkan tenaga untuk membangun rumah sakit-rumah sakit darurat. Mereka juga menggelar tes massal bagi sebanyak mungkin warga Serbia. Menurut pejabat negeri itu, pendekatan ala China yang mereka terapkan telah memperlambat penularan virus.

"Kami telah menerapkan model China, yakni dengan menjangkau dan merawat sebanyak mungkin seluruh warga yang terinfeksi," ujar seorang sumber yang dekat dengan kepresidenan Serbia.

Ubah kebijakan

Atas saran dari China pula, sebuah negara bisa mengubah kebijakan. Kamboja, mitra dekat Beijing di Asia Tenggara, memberlakukan pembatasan berskala besar atas kedatangan pengunjung internasional. Pada April

ini, bersamaan dengan tahun baru Khmer, Kamboja diperkirakan bakal menerima luapan kunjungan pulang warganya dari luar negeri. Mereka yang baru tiba akan menjalani karantina di hotel-hotel atau sekolah-sekolah yang diubah menjadi tempat karantina.

Semua itu dilakukan atas saran tim medis dari China. "Pembatasan terbaru untuk mengurangi mobilitas orang dan melarang warga asing datang ke negeri ini adalah langkah-langkah pengendalian yang dilakukan China," ujar Liang Wenbin, anggota tim medis China yang dikirim ke Kamboja.

Di Aljazair, China mengirim tim medis beranggota 13 orang dan bantuan perlengkapan medis, termasuk respirator, senilai sekitar 450.000 dollar AS. Selain itu, Aljazair juga memesan 100 juta masker wajah, 30.000 alat tes, baju pelindung, dan perlengkapan medis lainnya.

Media China melaporkan, Beijing direncanakan membangun sebuah rumah sakit kecil yang bisa melayani sekitar 5.000 warga Aljazair dan 4.000 warga China yang dipekerjakan perusahaan China State Construction Engineering Corporation (CSCEC). BUMN China ini menggarap banyak proyek infrastruktur di Afrika, termasuk Masjid Agung Aljazair—salah satu masjid terbesar di dunia—dan bermakna di Aljazair.

Kawasan Benua Amerika tak luput dari jangkauan China. Dari Argentina hingga Meksiko, dari Brasil hingga Peru, negara-negara Amerika Latin juga menerima bantuan dari China guna mengatasi wabah Covid-19. Kepada Presiden Argentina Alberto Fernandez yang menerima di kediamannya di permukiman elite suburban Olivos di Buenos Aires, pertengahan Maret lalu, Dubes China Zou Xiaoli menawarkan donasi masker, sarung tangan, termometer, dan baju pelindung diri (APD).

Bagi Argentina, yang kini dililit utang luar negeri sebesar 110 miliar dollar AS dan tengah menegosiasi ulang dengan para kreditor, bantuan dari Beijing itu disambut dengan sukacita. "Ini bagian dari keterkaitan kami dengan China, yang berhubungan secara solid, saling menghormati, melebihi hubungan perdagangan yang kuat," ujar seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Argentina.

Chile setali tiga uang dengan Argentina. Seperti diungkapkan menteri kesehatan, negara itu mengirim pesawat angkut udara ke China untuk mengangkut pasokan donasi Beijing, termasuk peralatan tes dan respirator. Venezuela bahkan tak segan memineral bantuan perlengkapan medis, tetapi kini juga membahas kemung-

kinan dukungan dan dari Beijing.

Nama China pun harum di kalangan pemimpin negara-negara Amerika Latin. "Terima kasih China atas kerja sama dan solidaritas dengan Ekuador!" cuit Otto Sonnenholzner, Wakil Presiden Ekuador, di Twitter, sambil memerinci bantuan dari China, antara lain, termasuk 40.000 masker untuk operasi, termometer inframerah, dan APD.

Kecurigaan Barat

Meski demikian, tidak semua pihak memandang positif terhadap inisiatif China tersebut. Beberapa kalangan di Barat, termasuk pejabat di UE, memperlihatkan pandangan curiga terhadap inisiatif Beijing mengulurkan bantuan ke seluruh pelosok dunia. Sebagian pandangan itu bernada rasis.

Presiden AS Donald Trump pernah menyebut virus korona tipe baru (SARS-CoV-2) penyebab Covid-19 dengan istilah "virus China", sedangkan Menlu AS Mike Pompeo memberi nama "virus Wuhan", memantik kemarahan Beijing. Menteri Pendidikan Brasil Abraham Weintraub mengaitkan pandemi korona dengan rencana China menguasai dunia.

"Kami harus sadar, ada komponen geopolitik, termasuk pertarungan pengaruh melalui pelintiran dan 'politik kedermawanan'," ujar Josep Borrell, Kepala Kebijakan Luar Negeri UE. Dirjen Urusan Eropa Departemen Luar Negeri Perancis Amelie de Montchalin menyatakan, "Kadang-kadang lebih mudah menebar propaganda, foto-foto yang indah, dan kadang-kadang mengeksploitasi apa yang sedang terjadi."

Ada semacam kecurigaan di sebagian kalangan Barat bahwa China memanfaatkan pandemi korona sebagai kesempatan untuk memainkan kekuatan lunak (*soft power*)-nya dengan "diplomasi virus korona". Melalui bantuan ke sejumlah negara itu, China disebut berupaya mengubah narasi: citra sebagai negara tempat asal muncul virus yang kemudian menjadi pandemi global, dipoles dengan citra sebagai pemimpin dunia dalam perang melawan virus korona.

Jika menelusuri jauh ke belakang sebelum pandemi ini terjadi, tak sulit menempatkan persoalan itu dalam kerangka perebutan pengaruh China versus Barat. Pertarungan itu kian meningkat, terutama sejak Beijing gencar melebarkan sayap lewat Prakarsa Sabuk dan Jalan, agresifnya dalam pengembangan basis militer di Laut China Selatan, tekad perusahaan raksasa Huawei menguasai teknologi informasi dunia, serta ambisi China mengimpor AS sebagai kekuatan adidaya dunia. (AP/AFP/REUTERS)



AFP/EMMI KORHONEN

MENANTI MANGGIS BERJAYA DI "RUMAH" SENDIRI

Ancaman pandemi Covid-19 datang bersamaan masa panen manggis (*Garcinia mangostana L*) di Purwakarta, Jawa Barat. Ekspor manggis pun surut sementara waktu. Jika biasanya warga hanya menikmati manggis sisa ekspor, pada tahun ini adalah momentum bagi manggis Purwakarta menjadi primadona di daerahnya sendiri.

Melati Mewangi

Masa panen ditandai dengan acara Festival Manggis yang diadakan setiap tahun. Pemerintah Kabupaten Purwakarta memaknainya sebagai bentuk syukur atas melimpahnya hasil panen manggis para petani. Festival pada tahun ini digelar di Desa Parakan Garokgek, Kecamatan Kiarapedes, Sabtu (14/3/2020) pagi. Sebanyak 3 ton manggis dibagikan secara gratis kepada para pengunjung.

Esem (45), pengunjung asal Desa Mekarjaya, Kecamatan Kiarapedes, antusias memasukkan manggis yang disediakan panitia ke dalam kantong plastik. Setelah kantong itu terisi penuh dengan manggis, dia berjalan menjauhi etalase kayu tersebut dan membagikan manggis yang dibawanya itu kepada teman-temannya.

"Maaf memalukan, ya, tingkah saya (memasukkan banyak manggis ke plastik). Kapan lagi bisa makan manggis enak dan segar kayak gini, gratis pula," kata Esem sambil tertawa.

Jarang-jarang ia bisa menikmati manggis berukuran besar



FOTO-FOTO: KOMPAS/MELATI MEWANGI

Kecamatan Wanayasa, Darangdan, Bojong, dan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat



INFOGRAFIK: ABIE

dan manis. Sebagai buruh tani, Esem harus menyisihkan Rp 30.000 per kilogram untuk membeli manggis langsung dari petani. Ia tak mau melewatkan kesempatan makan manggis gratis ini.

Pengunjung lain asal Desa Sindanganon, Kecamatan Bojong, Purwakarta, Nung (25), tampak sibuk memilih manggis di rak etalase kayu. Manggis berukuran besar menjadi pilihannya untuk diberikan kepada Dewi (5), putrinya.

Dia mengaku tidak bisa membedakan antara manggis varietas Purwakarta dan manggis dari daerah lain secara fisik. Satu hal yang ia yakini, manggis yang disediakan saat festival adalah manggis kualitas ekspor atau terbaik.

"Harga manggis, kan, lumayan mahal, ya. Kalau beli sendiri, sering sebagian yang berukuran kecil dan kadang *zonk* (busuk)," kata Nung.

Ciri khas manggis Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, tertu-

ang dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 571/Kpts/SR.120/9/2006. Dari segi bentuk, manggis Wanayasa berukuran relatif besar dengan diameter berkisar 4,5-5 sentimeter, jumlah siung per buah enam sampai tujuh, dan bobotnya 90-110 gram per buah. Daging buah rasanya manis dan asam, serta memiliki warna kulit buah merah keunguan.

Buah ini tumbuh pada daerah dataran tinggi di empat kecamatan, yakni Kecamatan Wanayasa, Darangdan, Bojong, dan Kiarapedes. Luas perkebunan manggis di Purwakarta hingga 1.500 hektar dengan produksi rata-rata 47 ton per hektar saat panen raya tiba.

Buah manggis menjadi salah satu sektor produksi perkebunan unggulan di Purwakarta. Yang membedakan manggis dari wilayah ini dengan tempat lainnya adalah daya simpan yang mencapai 28 hari. Tak heran manggis Purwakarta menjadi salah satu komoditas

unggulan ekspor Indonesia.

Ekspor surut

Akan tetapi, kondisi pasar ekspor manggis surut akibat tertutupnya keran impor negara utama tujuan ekspor, yakni China. Meski demikian, Bupati Purwakarta Anne Ratna Mus-tika optimistis hasil panen manggis saat ini justru membuka peluang untuk Purwakarta mengisi pasar dalam negeri.

"Selama ini, sebagian masyarakat Purwakarta dan sekitarnya tidak pernah tahu manggis berkualitas ekspor milik Purwakarta itu seperti apa. Ini kesempatan bagi manggis Purwakarta menjadi primadona di daerah sendiri," ucap Anne.

Dalam pengembangan ekspor manggis ke depan, Kementerian Pertanian bakal menjajaki ekspor ke negara di Timur Tengah dan Eropa. Selama ini, produksi manggis dalam negeri paling banyak diekspor ke China. Sejak dibukanya kembali keran ekspor manggis ke China

Kebun buah manggis di Desa Parakan Garokgek, Kecamatan Kiarapedes, Purwakarta, Jawa Barat, Sabtu (14/3/2020). Manggis menjadi buah unggulan ekspor karena ukuran buah yang relatif besar, rasanya manis dan segar, serta daya simpannya mencapai 28 hari (foto atas). Tampilan fisik buah manggis (*Garcinia mangostana L*) varietas Wanayasa yang disediakan pada Festival Manggis di Desa Parakan Garokgek, Kecamatan Kiarapedes (foto bawah).

tahun 2018, jumlah ekspor meningkat signifikan hingga 300 persen atau 38.800 ton. Pada 2017, hanya mengekspor sebanyak 9.200 ton.

Untuk sementara, penyerapan pasar dalam negeri jadi prioritas utama. Setelah berkurangnya wabah Covid-19, Kementan akan menggenjot ekspor kembali. "Komoditas pertanian dalam negeri bisa menyelamatkan kondisi perlambatan pasar pada tahun ini. Kami berupaya untuk mencari pasar ekspor dari negara mitra potensial di seluruh dunia," ujar Direktur Jenderal Hortikultura Kementan Prihasto Setyanto.

Prihasto mengutip data Badan Pusat Statistik tahun 2019, yakni jumlah produksi manggis nasional adalah 242.000 ton. Angka tersebut meningkat 6,2 persen dibandingkan produksi sebelumnya yang 228.000 ton. Produksi manggis di Jawa Barat sebanyak 75.000 ton atau 31 persen dari produksi manggis nasional. Manggis Purwakarta berkontribusi sebanyak 6 persen atau 4.452 ton produksi manggis di Jawa Barat.

Tak kebagian

Puas mengisi kantong plastik dengan manggis, Esem beranjak pulang. Sudah tiga kali ia bolak-balik dari etalase untuk mengisi kantong-kantong plastik yang dibawanya dari rumah dengan manggis. "Ini mau saya bawa pulang biar orang rumah juga merasakan apa yang saya makan," ujarnya.

Beruntung, ia masih bisa mencicipi manggis itu. Berbeda dengan Raras Calista (20), mahasiswa semester enam jurusan Manajemen Agribisnis IPB, yang tak kebagian. Meski begitu, ia merasa senang bisa hadir dan melihat kegembiraan para warga menikmati manggis. "Wajah mereka *happy* habis makan manggis, pasti rasanya manis dan segar semua," katanya.

Sukacita masyarakat dalam festival itu senada dengan filosofi kejujuran manggis. Apa yang ditunjukkan dari luar, yakni buah yang diekspor ke luar negeri, sama dengan kondisi di dalamnya yang bisa dinikmati di negeri sendiri. Suatu kemewahan bisa mencicipi "ratu buah" di tempat asalnya.

JEJAK TERORISME DI CIREBON

Memadamkan Sumbu Bom Intoleransi

Abdullah Filkri Ashri

Pada 15 April 2011, atau sembilan tahun silam, pria Muslim asal Kota Cirebon, Jawa Barat, meledakkan bom bunuh diri di masjid Kepolisian Resor Cirebon Kota. Peristiwa ini mengusik toleransi di "Kota Wali" Cirebon sekaligus menandai tren baru terorisme di Tanah Air.

Bom meledak saat jemaah shalat Jumat di Masjid Adz-Dzikro, Markas Polres Cirebon Kota, pukul 12.20. Muhammad Syarif (32), pembawa bom, tewas. Sedikitnya 28 orang terluka. Serpihan logam, baut, dan paku menghunjam mereka.

Pengajar IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang juga pegiat multikulturalisme, Marzuki Wahid, Rabu (15/4/2020), mengatakan, Syarif menandai target baru terorisme di Tanah Air, yakni aparat pemerintah, termasuk polisi. Sebelumnya, pelaku teror mengincar musuh jauh, seperti Amerika Serikat dan sekutunya, seperti pada kasus bom Bali.

Insiden itu menjadikan Cirebon darurat radikalisme. Meski Syarif telah tiada dan masjid yang diledakkan sudah direnovasi, Cirebon kini menjadi tempat persinggahan dan persembaian teror. "Hingga kini, sekitar 70 warga Cirebon dan sekitarnya tertangkap Densus 88 Antiteror," kata Marzuki.

YF, warga Desa Bojong Lor, misalnya, diringkus tim Densus 88, Oktober 2019. Pimpinan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Cirebon yang bekerja sebagai tukang servis elektronik ini diduga akan mengebom pelantikan Presiden Joko Widodo dan wakilnya, KH Ma'ruf Amin. Sama seperti Syarif, sasaran teror masih mengincar aparat pemerintahan.

Solahudin, peneliti Pusat Pengkajian Terorisme dan Konflik Sosial Universitas Indonesia, menilai, sebagian aksi terorisme menarget polisi demi membalas dendam. Alasannya, banyak teman pelaku teror diringkus polisi.

Hal ini tidak terlepas dari paham organisasi teror Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS) yang mengutuk para

pengganti hukum Allah dan khilafah Islamiyah dengan demokrasi. Polisi dan aparat pemerintah termasuk dalam golongan ini.

Iman seseorang juga dianggap tidak sah tanpa melawan *thaghut*, label setan kepada seseorang karena tidak menegakkan syariat. "Kalau seseorang sudah mengikuti ajaran ini tetapi tidak mengafirkan orang kafir, ia termasuk kufur," katanya.

Berbagai praktik itu merupakan ciri radikalisme dan awal gerakan terorisme. Belakangan, jaringan yang berafiliasi NIIS tumbuh subur. Solahudin mencatat, pada 2015-2019, sebanyak 1.100 tersangka terorisme ditangkap Densus 88. Sebanyak 390 orang tertangkap pada 2018 dan sekitar 300 tersangka di-ringkus tahun berikutnya.

"Ini panen raya terorisme di Indonesia karena biasanya ada 60-100 penangkapan tersangka teroris per tahun," ujarnya. Salah satu pemicunya ialah fatwa maut NIIS pada 2016. Kira-kira bunyinya seperti ini: jika pintu hijrah tertutup bukanlah pintu jihad.

Hijrah yang dimaksud ialah

berpindah ke Suriah untuk mendirikan pemerintahan khilafah. Namun, jika tidak bisa ke sana, pengikutnya diminta melakukan aksi teror yang dianggap jihad di Indonesia.

Modusnya pun kian sederhana agar memungkinkan pengikut NIIS melakukan teror. Jika tak bisa merakit bom, pelaku bisa memukul lawan dengan batu, menusuk menggunakan pisau, hingga meracuni. Salah satunya dalam penusukan Wiranto, Menko Polhukam saat itu, Oktober tahun lalu.

Mendadak radikal

Menurut Solahudin, pelaku

teror saat ini tidak mesti seperti Syarif yang menjadi aktivitas radikal terlebih dahulu. Banyak pelaku teror yang awalnya merupakan pengusaha, pejabat, bahkan pekerja migran Indonesia. Mereka tidak punya riway-

at terjun dalam gerakan radikal. Kaya atau miskin, lulusan SMA bahkan universitas ternama, turut terlibat dalam terorisme.

"Alasan mereka ikut adalah narasi akhir zaman. NIIS mengklaim, akhir zaman sudah dekat dan pengikutnya akan selamat di bawah pimpinan Abu Bakar al-Baghdadi. Padahal, dia sudah tewas," katanya.

Penyebaran paham terorisme salah satunya lewat media sosial. "Hasil studi kami terhadap 75 narapidana terorisme, waktu mereka terpapar radikalisme hingga menjadi pelaku teror kurang dari satu tahun. Pemicunya, konten kekerasan di media sosial," ujarnya.

Ini jauh lebih instan dibandingkan yang dialami pelaku teror 2002-2010 di Indonesia. Mereka membutuhkan 5-10 tahun dari awal terpapar radikalisme hingga menjadi pelaku teror. Masa indoktrinasi hanya rutin sekali sepekan melalui pertemuan langsung. Sementara saat ini, paparan radikalisme melalui konten kekerasan dan intoleransi beredar luas di med-

sos 24 jam tanpa henti.

Di tengah ancaman itu, narasi kontraradikalisme terus dibangun di Cirebon. Salah satunya Fahmina Institute, organisasi nirlaba yang bergerak pada isu keindonesianan, kemanusiaan, dan keadilan. Fahmina mendirikan forum pemuda lintas iman (Pelita) sejak 2011. Hampir setiap tahun, Pelita

membantu persiapan Natal hingga Ramadhan.

Maret lalu, Fahmina menggelar pelatihan kepada 16 pendamping dari berbagai organisasi kepemudaan terkait pemahaman radikalisme. Setiap pendamping akan mengerjakan 10 remaja di enam desa di Cirebon. Mereka mengidentifikasi potensi radikalisme dan mengaktifkan kegiatan sosial yang mengusung keberagaman.

"Bisa acara 17 Agustusan hingga tradisi *mapag sri* (menyambut panen padi). Kalau ada yang anti terhadap kegiatan itu, harus dicari alasannya. Kami memilih pemuda karena mereka mudah berbaur. Kami sudah melakukan ini sejak 2018 di lima desa lainnya," ujar Direktur Fahmina Rosidin.

Rosidin meyakini, toleransi di Cirebon telah hidup berabad-abad silam. Warga Arab, Eropa, dan China hidup damai di Cirebon. Nama Cirebon bahkan berasal dari kata *sarumban* yang berarti tempat percampuran penduduk dari sejumlah daerah. Keberagaman ini seharusnya tidak punah karena ledakan bom.



KOMPAS/TOTOR WIJAYANTO

KERINGANAN CICILAN DIRESPONS BERAGAM

Pandemi Covid-19 di Indonesia telah berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi, yang secara tidak langsung menurunkan kemampuan debitur membayar cicilan kredit ke bank. Perbankan siap merestrukturisasi utang debitur yang terdampak pandemi Covid-19. Langkah ini direspons beragam.

Erika Kurnia

Untuk membantu meringankan beban debitur, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian

Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease.

Aturan itu memungkinkan pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dengan nilai usaha di bawah Rp 10 miliar untuk mendapat keringanan mencicil utang selama minimal enam bulan. Aturan yang terbit akhir Maret itu pun ditanggapi beragam oleh para pelaku usaha.

Mawarni (45), pemilik usaha penatu di kawasan Karet, Jakarta Selatan, yang memanfaatkan kredit usaha rakyat (KUR) di salah satu bank pelat merah, mengatakan sudah mendapatkan keringanan dari bank peminjam.

Keringanan yang didapatnya berupa penundaan angsuran pokok sekitar Rp 4 juta per bulan dan peniadaan bunga 5 persen selama setahun. Penangguhan itu dimungkinkan karena usahanya merugi lebih dari 75 persen akibat pelanggan yang mayoritas karyawan dan penghuni indekos tidak lagi menggunakan jasanya.

"Ini membantu sekali. Untuk sementara, usaha laundry saya tutup dulu karena biaya operasional lebih besar daripada pendapatan. Sembari

ini saya mau cari usaha sampingan dan menabung untuk rapel cicilan kalau ini sudah selesai," ujarnya, Selasa (14/4/2020).

Sementara itu, Juwarni (35), nasabah KUR dan penjual pulsa di Jakarta Barat yang terdampak pandemi, menilai, keringanan itu justru akan memberatkannya di kemudian hari. Pasalnya, keringanan yang diberikan hanya berupa penundaan pembayaran utang. Saat ini, ia berutang dengan angsuran Rp 1 juta per bulan.

"Saya hormati pihak bank yang sempat menawarkan keringanan ini kemarin. Cuma saya enggak ambil. Sebab, kalau menurut saya pribadi, ini malah memperlambat pelunasan KUR saya," ujarnya.

Juwarni pun memilih tetap mengangsur meski harus mengorbankan sedikit pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari. Sebab, kinerja usahanya kini sudah turun 50 persen karena pembeli pulsa di konternya, yang sebelumnya didominasi karyawan, sudah berkurang karena kebijakan kerja dari rumah. "Kalau saran saya pribadi, kenapa angsurannya yang ditunda, bukannya dikurangi nilainya," ujarnya.

Bersyarat

Pemberian keringanan kredit untuk pelaku usaha ini melihat besarnya dampak Covid-19 terhadap debitur.

Berdasarkan kebijakan pemerintah, syarat yang dibutuhkan untuk mengajukan keringanan antara lain nasabah memiliki usaha di lokasi terdampak Covid-19, terjadi gangguan produksi hingga penurunan pendapatan atau omzet terkait Covid-19.

"Selain melihat kondisi usaha, jenis

usaha, dan kemampuan nasabah, kami juga melihat histori pembayaran debitur selama ini," kata Sekretaris Perusahaan PT Bank Mandiri Persero Tbk Rully Setiawan kepada Kompas.

Rully mengatakan, Bank Mandiri saat ini menyiapkan layanan pelanggan agar bisa membantu pelaku usaha yang ingin mengajukan restrukturisasi kredit tersebut.

"Cara mengajukan ke Bank Mandiri bisa ke cabang atau unit kerja Bank Mandiri yang selama ini melayani debitur atau melalui telepon dan saluran elektronik kepada petugas kami," ujarnya.

Bank Mandiri menjadi salah satu bank yang ikut memberikan keringanan kredit bagi UMKM. Berdasarkan laporan OJK, Senin (6/4), saat ini sudah ada 56 bank umum konvensional, 13 bank umum syariah, 7 BPD, dan 64 BPR/S yang memberikan restrukturisasi.

Pada laporan itu disebutkan Bank Mandiri telah merestrukturisasi kredit 10.592 debitur senilai Rp 4,1 triliun. Lalu, BRI sudah merestrukturisasi kredit 134.258 debitur senilai Rp 14,9 triliun. Diikuti BNI sebanyak 6.238 debitur dengan total pinjaman Rp 6,9 triliun dan BTN kepada sekitar 17.481 debitur senilai Rp 2,8 triliun.

"Multifinance"

Selain perbankan, perusahaan pembiayaan atau multifinance juga memberikan keringanan kepada debitur.

Deputi Direktur PT Mandiri Tunas Finance Bonifatius Perana Citra Ketaren menjelaskan, Mandiri Tunas Finance sudah menerima aplikasi pengajuan program relaksasi kredit dari

sekitar 6.000 nasabah.

Saat ini, perusahaan tersebut sedang dalam tahap verifikasi dokumen serta penilaian administrasi terhadap nasabah sebagai syarat penerimaan permintaan restrukturisasi kredit. "Selain itu, ada juga nasabah yang masih dalam tahapan survei kelayakan oleh perusahaan," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Marketing PT Federal International Finance (FIF) Group Antony Sastro Jopoetro mengatakan, hingga 1 April 2020, FIF mencatat sudah ada sekitar 2.500 nasabah yang mengajukan keringanan kredit. Dari jumlah itu, sudah ada beberapa nasabah yang lolos seleksi dan mendapatkan relaksasi berupa penambahan tenor pembiayaan mulai dari 3 bulan, 6 bulan, hingga maksimal 12 bulan.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) OJK Riswinandi mengemukakan, terdapat 138 perusahaan multifinance atau pembiayaan yang berkomitmen menerapkan stimulus dari POJK No 11/2020 untuk restrukturisasi kredit bagi debitur terdampak Covid-19.

Dari 138 perusahaan pembiayaan itu, 79 perusahaan sudah mengumumkan siap restrukturisasi. Dari jumlah itu, sebanyak 14 perusahaan pembiayaan sudah menerima pengajuan, jumlahnya 11.235 permohonan per 31 Maret 2020.

Keringanan lain

Bank juga meningkatkan batas maksimal transfer dana untuk mengakomodasi kebutuhan nasabah di tengah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang ditetapkan pemerintah. Langkah ini sebagai upaya bank membantu pemerintah mencegah penyebaran Covid-19.

Dalam salinan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9/2020 disebutkan, PSBB merupakan kegiatan penduduk dalam suatu wilayah sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19. Pembatasan dalam bentuk meliburkan sejumlah aktivitas, kecuali bagi instansi yang memberikan layanan kebutuhan dasar, antara lain perekonomian dan keuangan.

Wakil Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Hery Gunardi dalam keterangan resmi yang dikutip pada Minggu (5/4/2020), menyampaikan, dalam kebijakan yang berlaku akhir Maret 2020, nasabah yang akan transaksi transfer atau pembayaran dengan nilai di atas Rp 100 juta tak perlu datang ke cabang Bank Mandiri. Bagi nasabah korporasi, batas transfer antarbank melalui fasilitas Mandiri Internet Bisnis dinaikkan dari Rp 100 juta menjadi Rp 200 juta.

"Relaksasi ini menjadi bagian dari kampanye #Dirumahaja yang kami galakkan agar dapat menekan penyebaran Covid-19. Harapannya, pelonggaran ini berdampak pada aktivitas ekonomi nasabah individu dan korporasi," kata Hery.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menaikkan batas harian berbagai kanal transaksi sesuai jenis kartu yang dimiliki nasabah. Hal serupa berlaku untuk transaksi pembayaran pada laman perdagangan secara elektronik (e-dagang).

"Langkah ini kami lakukan agar masyarakat lebih nyaman bertransaksi lewat e-banking dari rumah sekaligus mendukung kebijakan pemerintah," ujar Direktur Konsumer BRI Handayani.

Transaksi transfer antarbank melalui mobile banking yang semula Rp 1 juta-Rp 25 juta naik menjadi Rp 10 juta-Rp 25 juta.

Executive Vice President Secretariat & Corporate Communication BCA Hera F Haryn menuturkan, kenaikan batas transfer berlaku per identitas pengguna (user-ID) untuk transfer antar-rekening BCA dan transfer ke rekening bank lain di dalam negeri. Batas transfer harian melalui klikBCA yang semula Rp 100 juta per hari kini menjadi Rp 250 juta per hari. Kenaikan batas transfer ini berlaku pada 27 Maret 2020-31 Mei 2020.

"Kami mendukung imbauan pemerintah dan otoritas terkait imbauan pembatasan sosial untuk nasabah di Tanah Air dalam rangka mengantisipasi penyebaran Covid-19," kata Hera.

Masih kuat

Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menyatakan, perekonomian terpuak akibat pandemi Covid-19. Namun, industri perbankan masih cukup kuat dengan dukungan modal dan kondisi kualitas kredit.

"Suka atau tidak suka, saat ini semua sektor mengalami gangguan operasional, termasuk perbankan. Berbagai insentif yang diberikan otoritas bertujuan agar perbankan membentuk pencadangan yang kuat sehingga fungsi intermediasi tetap berjalan," ujarnya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana menambahkan, rasio kecukupan modal (CAR) perbankan hingga di level 22,42 persen. Adapun rasio kecukupan likuiditas (LCR) bank umum kegiatan usaha III dan IV di atas 200 persen.

"LCR bank BUKU I dan II di atas 100 persen. Artinya kemampuan bank dalam menyalurkan kredit masih baik. Ditambah rasio kredit bermasalah secara gross masih sekitar 2,79 persen per triwulan I-2020," ujarnya.

Wimboh menambahkan, berbagai sektor usaha yang terkait dengan perbankan mulai terkena dampak pandemi covid-19. "Potensi perlambatan pertumbuhan kredit yang lebih dalam pada tahun ini masih ada. Akan tetapi, saat ini kami lebih fokus pada pemantauan kondisi kesehatan bank. Kami tidak mau terjebak dengan target yang justru bisa berubah sangat cepat dalam kondisi ini," katanya. (DIM)



KOMPAS/LASTI KURNIA

Perajin mengolah kedelai dalam proses pembuatan tahu di sebuah usaha kecil skala rumah di Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, 9 Maret 2020 (atas). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berbincang-bincang dengan Ketua Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso dalam acara pemberian keterangan mengenai stimulus penanganan dampak Covid-19 di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, 13 Maret 2020 (bawah).

Purnawirawan tentara Brasil berusia 99 tahun, Ermando Armelino Piveta, keluar dari rumah sakit tentara di Brasilia, Brasil, Selasa (14/4/2020), setelah dirawat karena positif terinfeksi virus korona tipe baru sejak 6 April. Proses penemuan vaksin Covid-19 hingga kini terus berjalan.



AFP/EVARISTO SA

MENANTI MUNCULNYA VAKSIN COVID-19

Pengembangan vaksin terus dilakukan untuk menghadapi pandemi Covid-19. Hingga 4 April 2020, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat 62 formula vaksin yang diteliti, dua di antaranya telah diuji klinis.

YOESSEP BUDIANTO

Sebagai respons kasus pneumonia yang penyebabnya belum terdeteksi pada 31 Desember 2019, WHO merespons cepat dengan mengaktifkan cetak biru penelitian guna mempercepat penemuan vaksin virus korona jenis baru.

Dalam pengembangannya, WHO mencatat, hingga 4 April 2020 sudah ada 62 formula vaksin Covid-19 yang diteliti. Dua di antaranya telah diuji secara klinis.

Dokumen cetak biru diaktifkan khusus untuk penyakit atau patogen prioritas dalam konteks darurat kesehatan masyarakat. Total ada delapan penyakit yang menjadi prioritas penanganan oleh WHO, salah satunya adalah Disease X.

Jenis Disease X merujuk pada epidemi atau pandemi serius yang bisa muncul karena patogen yang kini belum diketahui dan mampu menyebabkan penyakit pada manusia. WHO menilai, pandemi wabah Covid-19 menjadi fokus utama saat ini sehingga cetak biru penelitian diaktifkan.

Sebagai upaya percepatan penanggulangan suatu wabah, cetak biru memiliki jadwal ketat berbasis tema penelitian. Khusus Covid-19, alur penelitian komprehensif mulai dari vaksin hingga pengobatan, dilakukan dalam durasi setahun, yaitu mulai Februari 2020 hingga Februari 2021.

Februari 2020, agenda global berfokus pada tahapan Global TPP (*target product profile*) building on experience from MERS and Disease X. Seluruh instansi penelitian medis berusaha untuk mengenali dan membangun protokol penelitian Covid-19 berbasis kasus MERS dan penyakit-penyakit baru.

Tahap berikut, Maret 2020, kriteria vaksin diperjelas melalui evaluasi mendalam, termasuk desain dan platform yang akan dibangun. Proses tersebut dijalankan dengan melakukan model pendekatan lanskap karakteristik hewan.

April 2020, riset vaksin sampai pada tahapan *Assay development and validation required for vaccine R&D and Vaccine Phase 2b/3 Master Protocol*. Tahapan medis pengembangan Assay merujuk pada prosedur dalam biologi molekuler, guna menguji dan mengukur aktivitas bahan biokimiawi di dalam suatu organisme.

Pengembangan Assay dilakukan seiring perumusan kriteria untuk validasi vaksin. Setidaknya ada dua validasi utama, yaitu aman dan efektif, serta manfaat lebih tinggi dari risiko. Agenda lain yang dikerjakan yakni memetakan sejarah alami virus korona. Kajian itu akan mengungkap bagaimana transmisi virus dan diagnosis.

Sejarah alami virus, transmisi, dan diagnosis dilakukan secara mendalam hingga Juli 2020. Setelah dokumen selesai, penelitian akan berpindah pada perumusan kode etik dan pengujian pengobatan yang efektif hingga Februari 2021.

Formula vaksin

Percepatan penelitian dan pengembangan penyakit Covid-19 melibatkan puluhan lembaga dan universitas di

seluruh dunia, di antaranya Global Research Collaboration for Infectious Disease Preparedness, Centers for Disease Control and Prevention, Imperial College London, Johns Hopkins School of Medicine, University of Oxford, dan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Anak-anak (Unicef).

WHO mencatat semua formula vaksin yang akan diuji, dari seluruh dunia. Dari semua formula itu, dua jenis vaksin sudah memasuki tahapan fase pertama uji klinis, sementara lainnya masih pada fase praklinis.

Formula vaksin pertama yang sudah masuk fase pertama uji klinis dikembangkan oleh Institut Alergi dan Penyakit Infeksi Nasional Amerika Serikat (NIAID) bekerja sama dengan perusahaan bioteknologi Moderna Inc di AS. Vaksin tersebut terbuat dari susunan genetik berupa RNA yang bertipe LNP-encapsulated mRNA dan diberi nama mRNA-1273.

Kemampuan RNA dijelaskan mampu menghentikan gerakan patologis dan mendukung tahapan pengobatan melalui adaptasi gen dan antibodi. Penggunaan vaksin secara klinis perlu didukung sistem pengiriman gen non-virus yang tepat. Sistem nanopartikel lipid (LNP) saat ini adalah sistem pengiriman utama yang memungkinkan pengobatan berjalan efektif, termasuk eliminasi gen patologis.

Dalam perkembangannya,

NIAID mengumumkan telah melaksanakan uji terhadap manusia pada 16 Maret 2020. Uji klinis dilakukan kepada 45 orang berusia 18-55 tahun dan dalam kondisi sehat.

Evaluasi pemberian dosis dilakukan selama enam minggu. Evaluasi uji terhadap manusia dilakukan dalam beberapa skenario dosis yang berbeda-beda. Hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan data tingkat keamanan dan kemampuan vaksin guna mendorong respons sistem imun manusia.

Vaksin kedua dikembangkan oleh CanSino Biological Inc dan Beijing Institute of Biotechnology di China yang menggunakan bahan *nonreplicating viral vector* dengan tipe vaksin Adenovirus Type 5 Vector.

Adenovirus Type 5 Vector memiliki salinan biokimia yang serupa dengan pengobatan ebola. Tipe adenovirus adalah salah satu vektor yang terbanyak dieksploitasi guna pengembangan virus, salah satunya virus HIV.

Kelebihannya terletak pada kemampuan untuk berkembang dengan cepat dan stabil dalam tubuh manusia, serta memiliki pola antigen yang spesifik bagi virus. Dalam fase terapi gen untuk pengobatan atau imunisasi, adenovirus aman.

Pengembangan vaksin

Semua formula vaksin dikembangkan melalui berbagai macam platform, mulai dari berbasis pada DNA, hingga materi yang belum teridentifikasi. Platform penyusunan vaksin virus korona paling banyak menggunakan protein subunit (36,51 persen).

Pengembangan vaksin tidak dapat dilepaskan dari informasi genetik patogen yang sedang mewabah. Vaksin subunit berbasis protein berisikan protein spesifik yang diisolasi dari patogen dan tidak mengandung partikel dari virus.

Selain platform protein subunit, vaksin juga dibuat dari materi RNA (14,29 persen), *nonreplicating viral vector* (12,70 persen), dan DNA (7,94 persen). Persentase pembuatan vaksin yang terbuat dari materi yang belum teridentifikasi 9,52 persen atau enam kandidat.

Sebelum vaksin diberikan secara massal, uji laboratorium

secara intensif harus dilakukan meski perlu waktu beberapa tahun. Saat uji klinis terhadap manusia digelar, maka tahapan evaluasi dan pengawasan harus dilakukan secara berkala dalam waktu tak singkat.

Lisensi vaksin tidak mudah didapatkan. Efektivitas dan keamanan produk sangat menentukan keberlangsungan hidup manusia. Pada beberapa kasus, ahli virologi meyakini bahwa penelitian tentang vaksin dapat berjalan satu dekade.

Meski ampuh mencegah penularan wabah, penemuan vaksin membutuhkan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Ilmuwan harus menyelidiki wabah penyakit dari awal. Selain itu, vaksin juga harus diuji secara ekstensif pada hewan dan manusia. Untuk tahapan ini, minimal dibutuhkan waktu setahun hingga vaksin dapat diedarkan di masyarakat.

Pada kejadian wabah SARS tahun 2003 dibutuhkan waktu 20 bulan dari rilis kode genom virus untuk menghasilkan vaksin yang siap diujicobakan kepada manusia. Pada epidemi virus zika, peneliti membutuhkan waktu enam bulan untuk mengeluarkan vaksin.

Vaksin yang ditemukan pertama kali oleh Edward Jenner pada 1796 telah berhasil mencegah berbagai penyakit, seperti tetanus, hepatitis, polio, serta wabah ebola dan flu burung. Vaksin-vaksin tertentu wajib disuntikkan ke tubuh pada saat anak berusia di bawah lima tahun.

Penemuan vaksin menjadi bagian dari linimasa munculnya penyakit di dunia. Hingga saat ini, WHO mencatat 26 jenis vaksin telah berhasil dibuat berdasarkan jenis penyakit, seperti kolera, hepatitis, influenza, malaria, dan tak ketinggalan demam kuning.

Saat terjadinya wabah penyakit menular, seperti virus korona jenis baru (SARS-CoV-2) penyebab Covid-19, upaya penemuan vaksin menjadi harapan pencegahan penyebaran. Mengingat, vaksin dapat memberikan sistem kekebalan dalam mengenali dan membangun pertahanan melawan bakteri atau virus penyebab penyakit.

(LITBANG KOMPAS)



REUTERS/DADO RUYAC

Petugas memegang alat suntik dan botol kecil dengan tulisan yang berarti "Vaksin Covid-19" pada 10 April 2020.

Benteng untuk Pala yang Berharga

Kepulauan Banda, inilah wilayah dengan kualitas pala terbaik yang dicari oleh penjajah Eropa. Belanda yang ingin memonopoli perdagangan rempah, terutama pala, mendirikan banyak benteng di sini. Kepulauan Maluku dan Maluku Utara memang banyak benteng peninggalan Belanda, Spanyol, Portugis, dan Inggris. Bangsa-bangsa tersebut berebut wilayah dan pengaruh untuk satu alasan: rempah, dan terutama pala.

Gugusan pulau kecil di tengah Laut Banda ini menjadi saksi bagaimana bangsa Belanda, Portugis, dan Inggris bergantian datang untuk mengambil pala sebelum negara Republik Indonesia berdiri. Komoditas pala yang digunakan untuk bahan pengawet, penyedap, parfum, dan kosmetik berharga sangat tinggi di pasar Eropa. Kini yang tersisa dari Kepulauan Banda adalah wisata sejarah dan wisata bawah lautnya yang indah. Pala Banda sudah tidak berjaya lagi di pasar internasional.

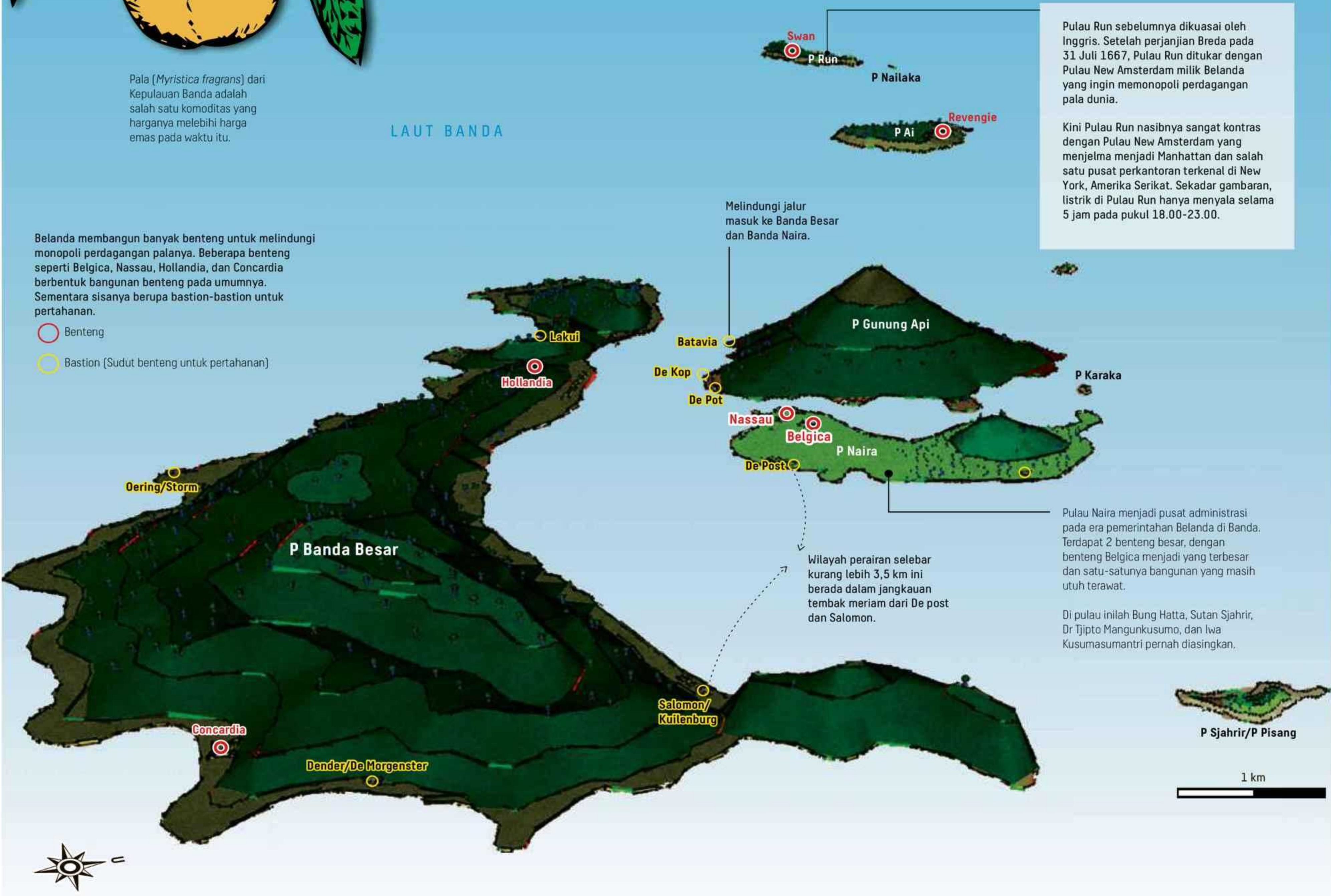


Pala (*Myristica fragrans*) dari Kepulauan Banda adalah salah satu komoditas yang harganya melebihi harga emas pada waktu itu.

LAUT BANDA

Belanda membangun banyak benteng untuk melindungi monopoli perdagangan palanya. Beberapa benteng seperti Belgica, Nassau, Hollandia, dan Concardia berbentuk bangunan benteng pada umumnya. Sementara sisanya berupa bastion-bastion untuk pertahanan.

- Benteng
- Bastion (Sudut benteng untuk pertahanan)



Pulau Run sebelumnya dikuasai oleh Inggris. Setelah perjanjian Breda pada 31 Juli 1667, Pulau Run ditukar dengan Pulau New Amsterdam milik Belanda yang ingin memonopoli perdagangan pala dunia.

Kini Pulau Run nasibnya sangat kontras dengan Pulau New Amsterdam yang menjelma menjadi Manhattan dan salah satu pusat perkantoran terkenal di New York, Amerika Serikat. Sekadar gambaran, listrik di Pulau Run hanya menyala selama 5 jam pada pukul 18.00-23.00.

Melindungi jalur masuk ke Banda Besar dan Banda Naira.

Wilayah perairan selebar kurang lebih 3,5 km ini berada dalam jangkauan tembak meriam dari De post dan Salomon.

Pulau Naira menjadi pusat administrasi pada era pemerintahan Belanda di Banda. Terdapat 2 benteng besar, dengan benteng Belgica menjadi yang terbesar dan satu-satunya bangunan yang masih utuh terawat.

Di pulau inilah Bung Hatta, Sutan Sjahrir, Dr Tjipto Mangunkusumo, dan Iwa Kusumasumantri pernah diasingkan.

Benteng di Pulau Naira

Fungsi benteng di Banda:

- Mengamankan monopoli perdagangan pala.
- Pertahanan dan perlindungan dari perampok dan pemberontak.
- Gudang rempah

Benteng Belgica

Benteng Belgica dibangun Belanda untuk bertahan dan melawan serangan dari penduduk Banda yang tidak terima dengan monopoli perdagangan pala yang dilakukan VOC. Benteng ini dibangun dalam beberapa fase dan selesai pada tahun 1673. Tahun 1896, sempat diserang dan jatuh ke tangan kekuasaan Inggris.

Benteng Belgica dapat menampung hingga 400 tentara lengkap dengan senjata meriam.

Terletak 30 meter di atas permukaan air laut

Benteng Nassau

Benteng Nassau yang dibangun lebih dulu oleh Portugis daripada benteng Belgica mempunyai posisi yang rendah dan dekat dengan pantai. Hal ini menjadikan benteng Nassau sangat mudah diserang. Akhirnya, dibangunlah benteng Belgica di daratan yang lebih tinggi dan hanya berjarak sekitar 200 meter dari benteng Nassau.

